

DIALOG GLOBAL

9.3

3 edisi per tahun dalam 17 bahasa

Membahas Sosiologi
dengan Qingzhi Huan

Christine Schickert

Brigitte Aulenbacher
Andreas Novy
Fred Block
Margaret R. Somers
Antonino Palumbo
Alan Scott
Gareth Dale
Jonathan D. London
Attila Melegh
Chris Hann

Transformasi Besar
(75 tahun kemudian)

Dalam Kenangan:
Ann Barden Denis

Linda Christiansen-Ruffman
Angela Miles
Marilyn Porter

Migrasi

Karin Scherschel
Gerda Heck
Carlos Sandoval
Bediz Yilmaz
Sarah Schilliger

Perspektif
Teoretis

Julia Kaiser
Jasper Stange

Sosiologi dari
Senegal

Moustapha Tamba
Souleymane Gomis
El Hadji Malick Sy Camara
Samba Diouf
Mouhamed Moustapha Dieye

Seksi Terbuka

› **Menjadikan Hak-Hak Perempuan sebagai
Bagian dari Kehidupan Sehari-hari**

MAJALAH



International
Sociological
Association
isa



VOLUME 9 / EDISI 3 / DESEMBER 2019
<http://globaldialogue.isa-sociology.org/>

DG

› Editorial

Di negara-negara Global Utara maupun Selatan perdebatan seputar perubahan iklim dan krisis ekologis telah mengemuka dalam beberapa tahun terakhir. Dalam sebuah wawancara, Qingzhi Huan, profesor politik komparatif di Beijing, Tiongkok dan pendukung kebijakan eko-sosialis, memberikan wawasan tentang perdebatan Tiongkok dan bagaimana kebijakan lingkungan dan pendekatan terhadap perlindungan lingkungan telah berubah selama beberapa dekade terakhir.

Karya unggulan Karl Polanyi yang diterbitkan pada tahun 1944, *Transformasi Besar (The Great Transformation)*, telah menginspirasi banyak penelitian dalam ilmu sosial dan politik, dalam sosiologi, antropologi, dan ekonomi. Simposium pertama kami, yang diselenggarakan oleh *Dialog Global* dan presiden International Karl Polanyi Society, Andreas Novy, merayakan ulang tahun ke-75 bukunya. Para penulis buku-buku yang luar biasa tentang kehidupan dan pekerjaan Polanyi, seperti Fred Block, Gareth Dale, Chris Hann dan Margaret R. Somers, dan para ahli dari jalinan penelitian yang berbeda yang sedang mempelajari karya Polanyi untuk zaman kita, membahas berbagai topik, dari refleksi pada konteks intelektual yang relevan bagi *Transformasi Besar* hingga analisis perkembangan ekonomi, sosial, dan politik selama beberapa dekade terakhir melalui kacamata perspektif Polanyi.

Ann Barden Denis meninggal pada Februari 2019. Dia akan dikenang bukan hanya karena pekerjaannya di bidang penelitiannya, tetapi juga karena keterlibatannya yang kuat di ISA, seperti yang disorot oleh Linda Christiansen-Ruffman, Angela Miles dan Marilyn Porters dalam penghormatan mereka padanya.

Simposium kedua kami, yang diselenggarakan oleh Karin Scherschel meneliti migrasi, sebuah topik yang sudah menjadi tradisi panjang dalam sosiologi yang telah menarik banyak perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Kumpulan karya-karya dari berbagai negara menggabungkan perspektif historis dengan analisis mengenai penyebab migrasi, situasi migran dan khususnya pengungsi, regulasi politik yang dipertentangkan, dan keterlibatan masyarakat sipil.

Jumat untuk Masa Depan (*Fridays for Future*) telah menjadi gerakan sosial yang sangat luar biasa terhadap perubahan iklim, menjadikan protes kaum muda yang sedang tumbuh menghadapi bencana ekologis yang mengancam mata pencaharian generasi berikutnya makin terlihat. Artikel oleh Julia Kaiser dan Jasper Stange memetakan pendekatan lintas kelas untuk memobilisasi dan membangun koalisi yang merupakan perkembangan baru dalam gerakan lingkungan.

Moustapha Tamba mengorganisir koleksi artikel dari para sosiolog Senegal. Mereka fokus pada sosiologi pendidikan dan memberi kita wawasan mendalam mengenai organisasi dan aksesibilitas pendidikan serta mengenai berbagai jenis sekolah dan peraturannya.

Di Bagian Terbuka kami Bengi Sullu, seorang wakil pemuda untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk ISA, melaporkan mengenai sesi ke-63 Komisi tentang Status Perempuan yang dia hadiri. ■

Brigitte Aulenbacher dan **Klaus Dörre**,
editor *Dialog Global*

› ***Dialog Global* dapat ditemukan dalam 17 bahasa pada [website ISA](#).**

› **Naskah dapat dikirim ke globaldialogue.isa@gmail.com.**

ISA International
Sociological
Association

**GLOBAL
DIALOGUE**



›Dewan Redaksi

Editor: Brigitte Aulenbacher, Klaus Dörre.

Asisten Editor: Johanna Grubner, Christine Schickert.

Rekan Editor: Aparna Sundar.

Editor Pelaksana: Lola Busuttil, August Bagà.

Konsultan: Michael Burawoy.

Konsultan Media: Juan Lejárraga.

Editor Konsultasi:

Sari Hanafi, Geoffrey Pleyers, Filomin Gutierrez, Eloísa Martín, Sawako Shirahase, Izabela Barlinska, Tova Benski, Chih-Jou Jay Chen, Jan Fritz, Koichi Hasegawa, Hiroshi Ishida, Grace Khunou, Allison Loconto, Susan McDaniel, Elina Oinas, Laura Oso Casas, Bandana Purkayastha, Rhoda Reddock, Mounir Saidani, Ayse Saktanber, Celi Scalón, Nazanin Shahrokni.

Editor Wilayah

Dunia Arab: Sari Hanafi, Mounir Saidani, Fatima Radhouani, Habib Haj Salem, Souraya Mouloudji Garrouddji, Abdelhadi Al Halhouli, Saida Zine.

Argentina: Alejandra Otamendi, Juan Ignacio Piovani, Martín Di Marco, Pilar Pi Puig, Martín Urtaun.

Bangladesh: Habibur Haque Khondker, Hasan Mahmud, Juwel Rana, US Rokeya Akhter, Toufica Sultana, Asif Bin Ali, Khairun Nahar, Kazi Fadia Esha, Helal Uddin, Muhaimin Chowdhury, Md. Eunus Ali.

Brasil: Gustavo Taniguti, Angelo Martins Junior, Lucas Amaral Oliveira, Andreza Galli, Dmitri Cerboncini Fernandes.

Prancis/Spanyol: Lola Busuttil.

India: Rashmi Jain, Nidhi Bansal, Pragya Sharma, Manish Yadav, Sandeep Meel.

Indonesia: Kamanto Sunarto, Hari Nugroho, Lucia Ratih Kusumadewi, Fina Itriayati, Indera Ratna Irawati Pattinasarany, Benedictus Hari Juliawan, Mohamad Shohibuddin, Dominggus Elcid Li, Antonius Ario Seto Hardjana, Diana Teresa Pakasi, Nurul Aini, Geger Riyanto, Aditya Pradana Setiadi.

Iran: Reyhaneh Javadi, Niayesh Dolati, Abbas Shahrabi, Sayyed Muhammad Mutallebi, Ehsan Pournajati.

Jepang: Satomi Yamamoto, Sara Maehara, Takeshi Kunitake, Riho Tanaka, Ekaterina Steposhyna, Yusuke Yotsugi.

Kazakhstan: Aigul Zabirowa, Bayan Smagambet, Adil Rodionov, Almash Tlespayeva, Kuanysh Tel, Almagul Mussina, Aknur Imankul.

Polandia: Jakub Barszczewski, Aleksandra Biernacka, Iwona Bojadzjijewa, Katarzyna Dębska, Monika Helak, Sara Herczyńska, Kinga Jakiela, Justyna Kościńska, Adam Müller, Weronika Peek, Zofia Penza-Gabler, Jonathan Scovil, Marcjanna Szczepaniak, Agnieszka Szypulska, Aleksandra Wagner.

Romania: Cosima Rughiniş, Raisa-Gabriela Zamfirescu, Luciana Anăstăsoaie, Cristian Chira, Alexandra-Ioana Dragomir, Diana Alexandra Dumitrescu, Radu Mihai Dumitrescu, Iulian Gabor, Dan Gîţman, Iulia Jugănar, Ioana Mălureanu, Bianca Mihăilă, Rareş-Mihai Muşat, Oana-Elena Negrea, Mioara Paraschiv, Alina Cristina Păun, Codruţ Pînzaru, Susana Maria Popa, Adriana Sohodoleanu, Gabriela Stoian, Maria Stoicescu, Maria-Cristina Titea, Carmen Eugenia Voinea.

Rusia: Elena Zdravomyslova, Anastasia Daur, Valentina Isaeva.

Taiwan: Jing-Mao Ho.

Turki: Gül Çorbacıoğlu, İrmak Evren.



Transformation Besar, magnum opus Karl Polanyi yang diterbitkan pada tahun 1944, melacak sejarah ekonomi, sosial, dan budaya dari kapitalisme dalam kaitan dengan perkembangan yang telah disaksikannya antara tahun 1920-an dan 1940-an. Ini merupakan suatu penelitian yang tajam mengenai apa yang telah terjadi dan dapat terjadi dalam sejarah kapitalisme. Simposium pertama ini merayakan 75 tahun buku yang bernas ini dengan artikel-artikel mengenai sejarah karya Polanyi maupun perspektif dan pendekatan yang terinspirasi olehnya.



Migrasi tidak dapat dianggap sebagai suatu fenomena tersendiri melainkan sebagai kesalingterkaitan antara banyak faktor seperti hak-hak sosial, ekonomi, budaya, dan politik, pembagian negara-bangsa, kewarganegaraan, globalisasi, dan pengawasan yang membatasi prose-proses migrasi. Artikel-artikel yang dikumpulkan di sini menggabungkan perspektif sejarah dengan suatu analisis mengenai sebab-sebab migrasi, situasi para migrant dan lebih khusus para pengungsi, kontestasi terhadap pengaturan politik, dan keterlibatan masyarakat sipil.



Seksi ini menyajikan wawasan teoretis dan empiris mengenai **sosiologi dari Senegal** dengan gambaran informatif mengenai sistem sekolah Senegal dan analisis mendalam mengenai berbagai aspeknya yang berbeda seperti sekolah Arab-Prancis publik dan swasta dan relevansi agama.



Global Dialogue dapat terselenggara berkat dana hibah dari **SAGE Publications**.

› Dalam Edisi Ini

Editorial **2**

› MEMBAHAS SOSIOLOGI

Demi Satu Visi Eko-Sosialis: Wawancara dengan Qingzhi Huan
oleh **Christine Schickert, Jerman** **5**

› TRANSFORMASI BESAR (75 TAHUN KEMUDIAN)

75 Tahun *Transformasi Besar*
oleh **Brigitte Aulenbacher dan Andreas Novy, Austria** **9**

Buku Polanyi *Transformasi Besar* di Usia Tujuh Puluh Lima
oleh **Fred Block dan Margaret R. Somers, AS** **11**

Pasar sebagai Ketrampilan Kenegaraan:
Pembacaan Atas Polanyi
oleh **Antonino Palumbo, Italia dan Alan Scott, Australia** **13**

Polanyi, Akuntansi, dan 'Melampaui PDB'
oleh **Gareth Dale, Inggris Raya** **15**

Transformasi Besar: Marketisasi Asia Timur
oleh **Jonathan D. London, Belanda** **17**

Ketakutan akan Penggantian Penduduk
oleh **Attila Meleg, Hungaria** **19**

Jalan Menuju Populisme
oleh **Chris Hann, Jerman** **21**

Warisan Tak Lekang Karl Polanyi
oleh **Andreas Novy, Austria** **23**

› DALAM KENANGAN

Ann Barden Denis: Suatu Apresiasi
oleh **Linda Christiansen-Ruffman, Angela Miles, dan Marilyn Porter, Kanada** **25**

› MIGRASI

Migrasi, Dalam Perjalanan
oleh **Karin Scherschel, Jerman** **27**

Imajinasi Eropa dan Kenyataan Mobilitas Orang Afrika
oleh **Gerda Heck, Mesir** **29**

Karavan Amerika Tengah: Eksodus Abad ke-21
oleh **Carlos Sandoval, Kosta Rika** **31**

Pengungsi sebagai Angkatan Kerja Tidak-bebas:
Catatan dari Turki
oleh **Bediz Yilmaz, Turki** **33**

Meruntuhkan Perbatasan di Kota-Kota Solidaritas
oleh **Sarah Schilliger, Swiss** **35**

› PERSPEKTIF TEORETIS

Pelajar untuk Masa Depan: Menuju Politik Kelas Ekologis
oleh **Julia Kaiser dan Jasper Stange, Jerman** **37**

› SOSIOLOGI DARI SENEGAL

Pendidikan Katolik Swasta di Senegal
oleh **Moustapha Tamba, Senegal** **40**

Sosiologi Sistem Sekolah Senegal
oleh **Souleymane Gomis, Senegal** **42**

Penyesuaian Strategis dalam Pendidikan Arab-Prancis
di Senegal
oleh **El Hadji Malick Sy Camara, Senegal** **44**

Pendidikan Swasta Sekuler di Senegal
oleh **Samba Diouf, Senegal** **46**

Kajian Sosio-Antropologis Kepemimpinan Agama di Senegal
oleh **Mouhamed Moustapha Dieye, Senegal** **48**

› SEKSI TERBUKA

Menjadikan Hak-Hak Perempuan sebagai Bagian
dari Kehidupan Sehari-hari
oleh **Bengi Sullu, AS** **50**

“Kesemua inisiatif yang memobilisasi dengan slogan Kota Solidaritas ini memiliki suatu kesamaan, yaitu bangkitnya suatu utopia yang konkret. Utopia konkret tersebut memiliki potensi untuk menghindari kendala politik dengan cara mengaitkan migrasi dengan isu-isu kebijakan sosial, alih-alih mengadu domba satu sama lain”

Sarah Schilliger

› Demi Satu Visi Eko-Sosialis

Wawancara dengan Qingzhi Huan

Qingzhi Huan adalah guru besar perbandingan politik pada Universitas Peking di Tiongkok. Pada 2002-2003 ia menjadi Harvard-Yenching Visiting Scholar pada Universitas Harvard di AS dan pada 2005-2006 menjadi Humboldt Research Fellow pada Universitas Mannheim di Jerman. Penelitiannya berpusat pada politik lingkungan, politik Eropa dan politik kiri. Dia mengarang dan menyunting sejumlah buku mengenai isu-isu tersebut, termasuk *A Comparative Study on European Green Parties* pada 2000 dan *Eco-socialism as Politics. Rebuilding the Basis of Our Modern Civilisation* pada 2010.

Dia diwawancarai oleh **Christine Schickert**, direktor administrasi Gugus Penelitian mengenai Masyarakat Pascapertumbuhan pada Universitas Friedrich Schiller di Jena, Jerman dan asisten editor pada *Dialog Global*.



Qingzhi Huan. Kredit: FSU Jena.

CS: *Perubahan iklim telah menjadi salah satu isu politik yang paling banyak diperbincangkan selama beberapa tahun terakhir, setidaknya di negara-negara Utara Global. Bisakah Anda jelaskan apa peran yang dimainkan oleh diskusi mengenai hal ini pada politik dan masyarakat Tiongkok saat ini?*

QH: Penanganan masalah perubahan iklim sebagai salah satu dari sejumlah isu utama politik lingkungan global telah menempuh jalan panjang sejak penandatanganan the *UN Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) pada pertemuan puncak Rio di tahun 1992. Secara umum dapat dikatakan bahwa, sebagaimana negara berkembang lainnya, posisi Tiongkok dalam memerangi perubahan iklim adalah jelas dan koheren—yakni apa yang disebut sebagai “Prinsip mengenai Tanggung Jawab Bersama namun Berlainan” (*Principle of Common but Differentiated Responsi-*

bility, CBDR). Pertama, perubahan iklim adalah tantangan atau krisis bersama bagi seluruh masyarakat manusia ketimbang hanya bagi negara-negara maju atau berkembang semata; kedua, beberapa negara atau wilayah yang disebut maju, khususnya UE dan AS, harus memikul tanggung jawab historis mereka dengan menawarkan ataupun mentransfer sumber daya dan teknologi yang diperlukan kepada negara-negara berkembang; ketiga, negara-negara berkembang, termasuk Tiongkok, harus meningkatkan kontribusinya pada pengendalian dan adaptasi perubahan iklim sesuai dengan peningkatan kapasitas mereka.

Berdasarkan pada posisi kebijakan ini, partisipasi Tiongkok dalam politik perubahan iklim internasional selama beberapa tahun silam dapat dibedakan ke dalam tiga tahapan: pra-1992, 1992-2012, dan 2012-sekarang. Sampai dengan 2012, pemahaman yang dominan adalah bahwa ne-

gara-negara maju seperti negara-negara UE dan AS adalah pihak-pihak yang harus melakukan serangkaian tindakan dengan segera. Sejak 2012, pemerintah Tiongkok secara berangsur-angsur telah meningkatkan atau menggeser posisinya ke arah kerja sama internasional di bidang perubahan iklim, khususnya di bawah kerangka UNFCCC. Di sini contoh terbaiknya adalah peran baru Tiongkok dalam mencapai dan menjalankan Kesepakatan Paris.

Sejujurnya, dorongan utama dari penyesuaian posisi kebijakan Tiongkok ini bukanlah berasal dari penandatanganan dan implementasi Kesepakatan Paris, melainkan dari implementasi strategi nasional untuk mempromosikan konstruksi eko-peradaban (*eco-civilization*). Ringkasnya, dalam Kongres Nasional ke-18 Partai Komunis Tiongkok (Communist Party of China, CPC), modernisasi atas “sistem dan kapasitas tata kelola lingkungan ekologis nasional” telah diakui sebagai salah satu dari sejumlah tujuan utama politik dan kebijakan CPC dan pemerintah Tiongkok, dan bahwa bergabung dalam kerjasama internasional yang lebih aktif di bidang perubahan iklim merupakan kasus simbolik yang ideal untuk memperlihatkan kemauan politik. Sebagai contoh, Tiongkok memberikan perhatian yang terus meningkat pada implementasi Konvensi PBB mengenai Keragaman Hayati (*Convention on Biological Diversity*, CBD) dengan mengorganisir berbagai aktivitas internasional penting yang terkait selama 2019-2020.

CS: Perlindungan lingkungan bukanlah isu baru di Tiongkok. Pada 1972, Tiongkok, berbeda dengan negara lain yang diperintah oleh partai sosialis, mengambil peran dalam Konferensi PBB mengenai Lingkungan Manusia, di mana disepakati sejumlah prinsip dan rekomendasi mengenai perlindungan lingkungan. Dapatkah Anda menggambarkan perkembangan dan perubahan dalam kebijakan lingkungan di Tiongkok sejak masa itu?

QH: Adalah benar bahwa perlindungan lingkungan sebagai kebijakan publik telah dimulai secara formal di Tiongkok pada 1972 ketika delegasi Tiongkok menghadiri Konferensi Stockholm mengenai Lingkungan Manusia. Hasilnya adalah bahwa pada 1973 Tiongkok menyelenggarakan konferensi nasional yang pertama mengenai perlindungan lingkungan dan membentuk satu badan nasional yang secara khusus bertugas menangani isu kebijakan ini. Sejak itu, kebijakan lingkungan di Tiongkok telah mengalami setidaknya empat tahap perkembangan: 1973-1989, 1989-1992, 1992-2012, dan 2012-sekarang.

Pada tahap pertama, seiring dengan pembentukan dan pelaksanaan kebijakan “pembaruan dan keterbukaan” pada 1978 di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping, perlindungan lingkungan segera menjadi isu kebijakan yang menonjol dan, sebagai konsekuensinya, “perlindungan lingkungan sebagai kebijakan dasar negara” secara resmi diakui pada 1983 dan kemudian menjadi salah satu

panduan kebijakan kunci bagi perlindungan lingkungan di Tiongkok hingga saat ini. Selama tahap kedua, di bawah kepemimpinan politik Jiang Zemin, pembangunan berkelanjutan menjadi ekspresi utama dalam ekologi politik dan strategi tata kelola lingkungan CPC dan pemerintah Tiongkok. Sejak 2002 hingga 2012—suatu tahap peralihan dengan lebih dari satu cara—di bawah kepemimpinan politik Hu Jintao, konsep “konstruksi masyarakat dua pola” (masyarakat yang hemat sumber daya dan ramah lingkungan) ditetapkan pada 2005 dan menjadi istilah yang sentral dari CPC dan pemerintah Tiongkok pada masa itu. Pada 2007, istilah “konstruksi eko-peradaban” dimasukkan dalam laporan kerja Kongres Nasional CPC ke-17. Sejak 2012, perubahan yang nyata bukanlah bahwa “konstruksi eko-peradaban” menjadi ungkapan payung bagi ekologi politik dan strategi tata kelola lingkungan CPC dan pemerintah Tiongkok, melainkan bahwa perlindungan dan tata kelola lingkungan diakui sebagai bagian integral dari “modernisasi sosialis dengan karakteristik Tiongkok di era baru” yang hendak dicapai, baik secara teoritis maupun praktis.

CS: Untuk waktu yang cukup lama, karya-karya Anda berpusat pada gagasan eko-sosialisme. Anda menyatakan bahwa “menghijaukan” kapitalisme bukanlah jawaban terhadap krisis ekologi saat ini, demikian pula dengan “menghijaukan” sosialisme tradisional. Bisakah Anda mengelaborasi argumen ini dan menjelaskan apa makna eko-sosialisme?

QH: Secara ringkas, eko-sosialisme sebagai filsafat politik hijau mencakup dua aspek utama. Pada satu sisi, ia mendalihkan bahwa tantangan ekologis dan lingkungan pada aras lokal, nasional dan global, khususnya di bawah kerangka kelembagaan dominan kapitalisme dewasa ini, bukanlah sekedar masalah atau cacat yang bersifat parsial atau sementara, melainkan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka bersangkutan: kesemuanya itu mengikuti logika penyebaran kapital dan perlindungan kepentingan para pemilik kapital. Dalam pengertian ini, maka berbagai langkah di bawah rezim kapitalis—apa yang disebut sebagai “kapitalisme hijau” atau “eko-kapitalisme”—tidak dapat menyelesaikan masalah lingkungan. Tentu saja, sebagaimana Ulrich Brand dan Markus Wissen telah uraikan secara jernih dalam buku mereka *The Limits to Capitalist Nature*, hal ini tidak berarti bahwa langkah kapitalis untuk memerangi kerusakan lingkungan, atau bahkan “kapitalisme hijau”, adalah sesuatu yang secara menyeluruh mustahil dalam realitas (kendati selalu dijalankan dengan cara yang selektif).

Di sisi lain, apa yang ditekankan dalam eko-sosialisme sebagai sebuah filsafat politik adalah bahwa ia merupakan tipe baru sosialisme, atau satu versi peningkatan dari sosialisme, dan dengan demikian berbeda dari sekedar menghijaukan sosialisme tradisional yang disederhanakan atau difalsifikasi. Patut dicatat bahwa sosialisme ilmiah atau komunisme yang disarankan Karl Marx dan Friedrich Engels

hampir dua abad yang lampau adalah suatu cita-cita yang sejauh ini belum terwujud, baik di bekas Uni Soviet maupun di Tiongkok saat ini. Dan diduga bahwa di masa mendatang cita-cita ini tidak akan dapat diwujudkan dalam negara atau wilayah manapun. Ini membawa implikasi bahwa apa yang kita cita-citakan atau perjuangkan adalah orientasi eko-sosialis atas dunia kita saat ini ketimbang masyarakat sosialis yang baru sama sekali. Dengan kata lain, salah satu dari tugas utama para eko-sosialis saat ini adalah untuk memberikan kejelasan mengapa berbagai langkah di bawah rezim kapitalis pada akhirnya akan gagal memecahkan masalah yang mereka klaim dapat selesaikan, dan mengapa berbagai inisiatif eko-sosialisme sebagai alternatif nyata atau radikal benar-benar dapat membawa perubahan yang substansial dalam semua masyarakat, sehingga “suatu dunia yang lain benar-benar dimungkinkan”.

CS: Dalam berbagai wacana yang telah saya ikuti, eko-sosialisme didiskusikan sebagai alternatif terhadap kapitalisme hijau dengan visinya sendiri mengenai masa depan yang tidak hanya menawarkan solusi atas krisis ekologis namun juga menjawab isu-isu ketimpangan; ia bertujuan untuk menautkan keadilan lingkungan dengan keadilan ekologis. Namun Anda menyatakan bahwa dewasa ini konsep-konsep eko-sosialis tidak menarik bagi banyak orang. Mengapa demikian?

QH: Saya akui, konsep eko-sosialisme masih belum populer seperti yang orang harapkan atau nyatakan, tidak hanya di negara-negara kapitalis namun juga di negara-negara sosialis termasuk Tiongkok. Dalam pandangan saya, terdapat sejumlah alasan yang menjelaskan anomali ini. Pertama, eko-sosialisme sebagai ideologi politik dan kebijakan publik masih sangat dipengaruhi oleh reputasi sosialisme tradisional yang ternoda di bekas Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur yang jelas-jelas telah gagal dalam menginstusionalisasi gagasan-gagasan dan nilai-nilai sosialis dalam menangani isu-isu lingkungan, seperti yang Saral Sarkar telah ulas secara meyakinkan dalam bukunya *Eco-socialism or Eco-capitalism?* Selain itu, hegemoni neoliberalisme di seluruh penjuru dunia menyusul kebangkrutan blok sosialis di awal 1990-an dan propaganda politis dan ideologisnya merupakan kesuksesan yang tak terbantahkan; hal mana membuat kebanyakan orang meyakini bahwa tidak ada alternatif sama sekali terhadap kapitalisme. Yang paling menarik dan/atau disayangkan, krisis ekonomi dan finansial di Eropa dan AS pada 2008 juga tidak berhasil mengubah situasi struktural secara substansial yang akan memungkinkan kelahiran politik radikal atau alternatif, termasuk eko-sosialisme. Kemunculan dan perkembangan popularitas “kapitalisme hijau” atau “eko-kapitalisme” pada beberapa tahun terakhir ini dapat dianggap sebagai bukti yang mendukung argumen ini.

Kedua, sejauh yang meyangkut Tiongkok, persaingan interpretasi politik dan ideologis atas “konstruksi eko-per-

adaban” dan “konstruksi eko-peradaban sosialis” merupakan contoh yang baik untuk menunjukkan bahwa eko-sosialisme masih belum menjadi ideologi politik dan ekologi politik yang mapan. Salah satu titik pisah yang lebar adalah apakah orientasi atau arah sosialis merupakan prasyarat kelembagaan untuk memodernisasi sistem perlindungan dan tata kelola lingkungan di Tiongkok saat ini atautah tidak. Dari perspektif eko-Marxis, penekanan berlebihan atas pemberlakuan apa yang disebut institusi atau mekanisme modern dari AS dan UE untuk perlindungan dan tata kelola lingkungan akan mengundang risiko pengabaian atas pembentukan ulang secara sosialis tatanan keseluruhan masyarakat yang sangat esensial bagi masa depan eko-peradaban sosialis.

CS: Apa yang diperlukan untuk membuat eko-sosialisme lebih menarik sebagai sebuah visi bagi masyarakat masa depan?

QH: Tak perlu dikatakan, hal ini adalah tugas mendesak dan sangat menantang bagi para eko-sosialis dewasa ini. Pertama sekali, partai dan politik sosialis/Kiri-hijau masih merupakan kekuatan utama untuk membuat visi eko-sosialis bagi masyarakat masa depan lebih diinginkan dan menarik di kalangan publik, dan banyak pekerjaan yang dapat mereka lakukan [untuk mewujudkan hal ini]. Sebagai contoh, pesan yang penuh dorongan dari pemilihan Parlemen Eropa 2019 ialah bahwa para pemilih Eropa, khususnya generasi muda, ternyata memiliki posisi yang sangat suportif terhadap penanganan perubahan iklim dan isu-isu lingkungan global lainnya, namun sayangnya kubu Kiri secara keseluruhan tidak terlalu banyak memperoleh manfaat dari hal ini. Kedua, dialog dan kolaborasi internasional di antara akademisi mengenai semua isu yang terkait eko-sosialisme harus lebih diperkuat lagi. Tentu saja, hal itu harus merupakan proses yang lebih setara dan lebih terbuka serta bersifat dua arah antara negara-negara Barat dan negara-negara berkembang. Jujur saja, Tiongkok adalah murid Barat yang “baik” selama beberapa dekade silam dalam arti berusaha melakukan yang terbaik untuk meniru apa yang negara-negara maju telah atau sedang lakukan untuk memodernisasi negaranya. Namun, mulai sekarang, Tiongkok perlu menjadi mitra yang lebih independen dan reflektif bagi komunitas akademis internasional, dengan benar-benar memusatkan pada bagaimana membuat secara sungguh-sungguh negaranya menjadi lebih baik lagi. Ketiga, salah satu dari tugas kunci untuk membuat eko-sosialisme lebih menarik, khususnya di Tiongkok, adalah dengan menjadikan “Sosialisme dengan Karakteristik Tiongkok di Era Baru” lebih menarik. Dalam pandangan saya, cara yang krusial untuk ini adalah dengan secara sadar memperkenalkan dan menjalankan prinsip dan kebijakan “konstruksi eko-peradaban sosialis”.

CS: Anda membedakan antara “ekonomi yang tumbuh” (growing economy) dan “ekonomi pertumbuhan” (growth economy), di mana yang terakhir sangat



bergantung pada pertumbuhan ekonomi yang tiada henti; sesuatu yang nampaknya bersifat merugikan bagi pemecahan krisis ekologi. Apa makna dari perbedaan ini dikaitkan dengan Tiongkok?

QH: Saya memakai istilah “ekonomi yang tumbuh” pada 2008 untuk mengkonseptualisasi sifat pembangunan ekonomi di Tiongkok pada masa itu, untuk memperlihatkan bagaimana saya agak berbeda dengan Takis Fotopoulos, pemikir Yunani yang berbasis di London, yang menganalisis sesuai-tidaknya pembangunan berkelanjutan dengan globalisasi melalui penyelidikan atas pembangunan di Tiongkok. Argumen utama saya adalah sebagai berikut: baik dalam arti legitimasi, desirabilitas maupun keberlanjutan dari dukungan sumber daya dan kapasitas lingkungan, laju pertumbuhan ekonomi Tiongkok di awal abad ke-21 hingga taraf tertentu diperlukan dan dapat dibela. Tentu saja, situasi keseluruhan pembangunan ekonomi Tiongkok dalam satu dekade silam sudah berubah dramatis dan saat ini Tiongkok harus menghadapi situasi yang bahkan lebih menantang lagi karena sengketa/perang dagang dengan AS.

Dalam kaitan ini, pertanyaan sebenarnya adalah apakah ekonomi Tiongkok secara bertahap bergerak menuju ekonomi pertumbuhan seperti yang Takis Fotopoulos artikan ataukah tidak. Refleksi saya adalah bahwa tetap tidak ada jawaban yang sederhana atas pertanyaan ini. Di satu sisi, laju pertumbuhan ekonomi per tahun sebesar 6-7% sejak 2015 hanyalah nyaris separuh dari apa yang terjadi sepuluh tahun sebelumnya (11,4% pada 2005); suatu indikasi bahwa Tiongkok terus mengoptimalkan ekonominya sesuai dengan tahap-tahap pembangunan yang berlainan, dan bahwa, setidaknya di wilayah tengah dan barat Tiongkok, laju pertumbuhan ekonomi yang sesuai, masih diperlukan dan dapat dicapai pada masa mendatang yang tidak lama lagi. Di sisi yang lain, mempertimbangkan agregat ekonomi Tiongkok saat ini—menurut Bank Dunia, pada 2018 secara keseluruhan mencapai 13,608 triliun dolar AS dan mencakup 15,86% dari agregat ekonomi seluruh dunia—bahkan laju pertumbuhan tahunan sekitar 5% dapat membawa dampak yang luas dan dahsyat pada lingkungan ekologis kita. Inilah alasan utama kenapa kami mendalihkan bahwa perspektif eko-sosialis atau “konstruksi eko-peradaban sosialis” berpotensi untuk menciptakan kontribusi pada kombinasi yang lebih baik antara keharusan memenuhi kebutuhan dasar rakyat banyak dan melindungi lingkungan ekologis: yaitu dengan mewujudkan ekologisme dan sosialisme yang lebih kuat lagi.

CS: Di negara-negara Eropa dan di Amerika Utara, gagasan mengenai kapitalisme hijau adalah jawaban arus utama atas tantangan ekologis dewasa ini. Apa yang bisa mereka dapatkan dari visi-visi alternatif mengenai masa depan seperti yang Anda sodorkan ini?

QH: Boleh dibbilang, “kapitalisme hijau” atau “eko-kapitalisme” merupakan pendekatan paling praktis atau bahkan paling “rasional” untuk mengatasi tantangan ekologis dewasa ini di negara-negara Eropa dan di Amerika Utara, sebab, berkat tatanan ekonomi dan politik internasional yang hirarkis dan kian meluasnya penerimaan “cara hidup imperial” di negara-negara berkembang, maka negara-negara “maju” tersebut dapat mengatur penggunaan sumber daya global dan terpuruk untuk keuntungan mereka sendiri. Apabila konfigurasi struktural semacam ini tetap tak dirombak, siapapun dapat membayangkan betapa kecil peluang yang akan tersedia bagi dunia ini untuk bergerak menuju masa depan eko-sosialis.

Meski demikian, tampaknya konfigurasi ini secara sosial dan ekologis telah benar-benar bermasalah dalam beberapa tahun terakhir. Di satu sisi, seiring kebangkitan ekonomi beberapa negara berkembang yang utama, termasuk Tiongkok, menjadi kian sulit bagi AS dan negara-negara Eropa untuk mempertahankan status quo tatanan internasional, yang akan mengancam bukan saja posisi hegemoni mereka dalam arti tradisional, namun juga model hijau mereka berupa “eko-kapitalisme”. Dengan kata lain, semakin kecil ruang atau peluang yang tersedia di dunia nyata bagi negara-negara “maju” ini untuk mempertahankan kualitas lingkungan lokal mereka, sambil mereka dapat terus menikmati tingkat konsumsi material yang tinggi. Hingga taraf tertentu, peningkatan ketegangan antara Tiongkok dan Barat yang dipimpin oleh AS saat ini bisa ditafsirkan dengan cara ini. Di sisi lain, semakin banyak negara-negara berkembang, khususnya yang ekonominya sedang tumbuh seperti Tiongkok, yang menganggap masalah lingkungan ekologis serius dengan berbagai alasan yang berlainan. Ini akan berimplikasi pada semakin ketatnya pembatasan yang diterapkan negara-negara berkembang pada penerimaan kapital dan teknologi yang “kotor”, apalagi limbah dan sampah, seperti diperlihatkan secara jelas oleh sengketa impor limbah antara Filipina dan Kanada.

Dalam dua pengertian seperti tersebut di atas, dalam pandangan saya, prinsip-prinsip dan cara-cara penalaran eko-sosialisme dapat berkontribusi untuk mendorong negara-negara Eropa dan Amerika Utara agar pada akhirnya menyadari batas-batas dan cacat-cacat dari “kapitalisme hijau” atau “eko-kapitalisme”. Penyelesaian masalah secara lokal dan dalam jangka pendek sementara pihak lain harus membayar ongkosnya perlu diakhiri, dan suatu proses transformasi sosial-ekologis yang radikal perlu diinisiasi secepat mungkin. Dunia yang lebih adil dan masyarakat yang lebih setara adalah prasyarat bagi lingkungan yang lebih bersih. ■

Semua korespondensi ditujukan kepada Qingzhi Huan <qzhuan@sdu.edu.cn>

› 75 Tahun Transformasi Besar

oleh **Brigitte Aulenbacher**, Universitas Johannes Kepler di Linz, Austria dan anggota Komite Penelitian ISA tentang Ekonomi dan Masyarakat (RC02), Kemiskinan, Kesejahteraan Sosial dan Kebijakan Sosial (RC19), Sosiologi Pekerjaan (RC30), dan Perempuan, Gender dan Masyarakat (RC32) dan **Andreas Novy**, Universitas Ekonomi dan Bisnis Wina (WU), Austria



Arti penting dan relevansi berkelanjutan dari buku Karl Polanyi Transformasi Besar tercermin dari penerjemahannya ke dalam banyak bahasa. Kredit: Ana Gomez.

Transformasi Besar, magnum opus dari Karl Polanyi, yang diterbitkan untuk pertama kali pada tahun 1944 dengan judul *The Great Transformation, The Political and Economic Origins of Our Time*, Boston: Beacon Press, 2001 (*Transformasi Besar, Asal-usul Politik dan Ekonomi Zaman Sekarang*, alih bahasa: M. Taufik Rahman, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), merekonstruksi sejarah ekonomi, sosial, dan budaya kapitalisme dalam menghadapi perkembangan yang telah beliau saksikan antara tahun 1920-an dan 1940-an [mulai dari]: fundamentalisme pasar setelah Perang Dunia I, krisis yang mengikutinya dan keruntuhan pasar saham pada tahun 1929, Depresi Besar, upaya fasis dan sosialis untuk mengatur kembali ekonomi dan masyarakat, [program-program] *the New Deal* dan, akhirnya, Perang Dunia II.

Transformasi Besar adalah investigasi tajam tentang apa yang [telah] terjadi dan mungkin [akan] terjadi dalam sejarah kapitalisme jika ekonomi dan masyarakat diorganisasikan dengan “kredo liberal” mengenai “pasar yang mengatur diri sendiri” dan masyarakat semakin menjadi “masyarakat pasar,” yang didorong oleh mekanisme permintaan, penawaran, harga, dan dinamika pasar yang berorientasi laba. Dalam sistem seperti itu, di mana “masyarakat manusia telah menjadi aksesori dari sistem ekonomi,” elemen-elemen yang tidak pernah disediakan dan diproduksi untuk dijual—seperti tanah (alam), tenaga kerja, dan uang—juga menjadi “komoditas fiktif:” “Namun tenaga kerja dan tanah tidak lain sebenarnya adalah manusia itu sendiri yang merupakan bagian dari setiap masyarakat dan lingkungan alami di mana ia berada. Memasukkan mereka ke dalam mekanisme pasar berarti menundukkan substansi masyarakat itu sendiri pada hukum pasar dan mengarah pada “pembongkaran.” Karl Polanyi menganalisis sejarah kapitalisme abad kesembilan belas sebagai hasil dari “gerakan ganda (*double movement*),” “gerakan” marketisasi dan “gerakan-tandingan (*countermovement*)”—gerakan buruh, perundang-undangan, proteksionisme, dll.—melalui mana masyarakat manusia mencari keamanan dan perlindungan.

Dalam pidatonya sebagai presiden di Kongres Sosiologi Dunia ISA di Yokohama pada tahun 2014, Michael Burawoy menekankan pentingnya *Transformasi Besar* dengan menguraikan bagaimana “gelombang” baru “marke-

tisasi” yang dimulai pada tahun 1970-an, fase globalisasi pasca-komunis setelah 1989, krisis keuangan 2007-8, dan protes sosial yang mengikutinya dapat dipahami sebagai gerakan ganda Polanyi. Dan memang, khususnya sejak 1990 telah ada minat yang meningkat pada karya Karl Polanyi. Para sarjana dari seluruh dunia merujuk pada analisisnya tentang “gerakan ganda” dan mencoba memanfaatkan motifnya tentang “komoditas fiktif.” Selain itu, mereka juga menemukan kembali visinya tentang “kebebasan dalam masyarakat yang kompleks” dan gagasannya tentang sebuah masyarakat yang adil dan bebas yang dimungkinkan “ketika eksperimen utopis tentang pasar yang mengatur diri sendiri tidak akan lebih dari sekedar kenangan” dalam sejarah peradaban industri.

Simposium ini merayakan 75 tahun *Transformasi Besar* dengan menghadirkan artikel-artikel yang merujuk pada sejarah kumpulan karya Karl Polanyi serta perspektif dan pendekatan yang memanfaatkannya. Fred Block dan Margaret R. Somers membaca karya Karl Polanyi di masanya dengan merujuk pada mentor neoliberalisme, Hayek dan Mises, serta fasisme, dan menunjukkan relevansinya untuk memahami kecenderungan otoriter hari ini. Antonino Palumbo dan Alan Scott mengatasi persoalan dikotomi pasar negara yang bersifat menyederhanakan dan menjelaskan mengapa dan bagaimana negara mendukung pasar. Gareth Dale memberikan ulasan kritis tentang sejarah akuntansi nasional karena telah menstabilkan tatanan ekonomi berdasarkan laba dan, berangkat dari refleksi tersebut, permasalahan penafsiran Polanyian terhadap debat “*Beyond GDP*” (melampaui PDB). Jonathan D. London menyelidiki transformasi besar di Asia Timur dan berkuat pada kontradiksi peningkatan simultan dalam marketisasi dan kebijakan kesejahteraan. Attila Melegy dan Chris Hann menggabungkan pemahaman yang mendalam tentang karya Karl Polanyi di masanya dengan refleksi kontemporer tentang populisme sayap kanan terkait migrasi dan pembangunan di Eropa. Andreas Novy menyusun kesimpulan dengan menekankan warisan abadi Polanyi, inspirasinya terhadap gerakan sosial, kritiknya terhadap kapitalisme “global” kontemporer, dan pencariannya akan berbagai alternatif. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada:
Brigitte Aulenbacher <brigitte.aulenbacher@jku.at>
Andreas Novy <andreas.novy@wu.ac.at>

› Buku Polanyi Transformasi Besar di Usia Tujuh Puluh Lima

oleh **Fred Block**, Universitas California, Davis, AS dan **Margaret R. Somers**, Universitas Michigan, AS



| Karl Polanyi, Perang Dunia I. Kredit: Kari Polanyi Levitt.

Ketika Karl Polanyi meninggal pada tahun 1964, sumbangan pemikirannya tidak terlalu dikenal kecuali di kalangan antropolog ekonomi dan para pakar Yunani dan Romawi kuno. Sebagai seorang intelektual pengungsi, kehidupan Polanyi merentang di empat negara berbeda—Austria, Inggris, AS dan Kanada. Selain itu, karyanya bukan hanya di satu bidang ilmu melainkan meliputi sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, ilmu politik dan ilmu-ilmu klasik. Keluasan ini membuatnya sulit menghimpun cukup pengikut yang bisa memelihara reputasinya seperti yang dinikmati oleh para intelektual pengungsi lainnya.

Selain itu, Polanyi bukan seorang nabi yang bisa diandalkan dalam bukunya yang paling penting, *Transformasi Besar* (*The Great Transformation*). Dalam bab-bab akhir buku itu, ia berpendapat bahwa dunia akhirnya mengakui bahwa gagasan untuk menciptakan suatu pasar bebas global itu keliru. “Liberalisme yang melekat” (*embedded liberalism*) dalam tata ekonomi pasca Perang Dunia II tidak sedestruktif sistem standar emas (*gold standard*) di periode sebelum perang. Akan tetapi munculnya negara kesejahteraan Keynesian pada masa 1940-an, 1950-an dan 1960-an masih jauh dari sosialisme yang dibayangkan oleh Polanyi. Bahkan, Polanyi gagal meramalkan terjadinya Perang Dingin atau ambisi Amerika Serikat untuk menata ulang ekonomi dunia di mana lalu lintas barang dan modal dapat mengalir bebas melintasi perbatasan bangsa-bangsa.

Ironisnya, peristiwa-peristiwa yang terjadi sesudah kematiannya justru mengabadikan reputasi Polanyi sebagai seorang nabi. Pada masa 1920-an di Wina, Polanyi telah menyusun gagasannya yang menentang fundamentalisme pasar yang didengungkan Ludwig von Mises dan muridnya, Friedrich Hayek. Sepuluh tahun sesudah kematian Polanyi, Hayek mendapatkan hadiah Nobel bidang ekonomi, dan beberapa tahun setelah itu, ia dipuji sebagai inspirator di balik kebijakan pasar bebas yang dijalankan oleh Margaret Thatcher dan Ronald Reagan. Ringkasnya, kebijakan fundamentalisme pasar selama empat dekade terakhir ini mengubah Karl Polanyi dari seorang nabi gagal menjadi seorang analis masa depan yang paling terkenal tentang kuasa dan bahaya pasar bebas.

› Penghematan di zaman standar emas dan fasisme

Dalam buku *The Great Transformation*, Polanyi terang-terangan menyalahkan pemberlakuan kembali standar emas internasional di masa sesudah Perang Dunia I sebagai penyebab kebangkitan fasisme; suatu keputusan yang menjadi tanggung jawab semua politisi dengan latar belakang yang berbeda-beda, termasuk para Bolshevik. Akan tetapi, begitu penghematan (*austerity*) akibat standar emas itu mulai terasa di antara kaum ekonomi lemah

di seluruh Eropa, para politisi sosialis dan liberal sama-sama menolaknya—bukan hanya karena [menyebabkan] pembekuan kenaikan upah dan belanja negara, tetapi juga karena [menyebabkan] pemberangusan demokrasi.

Para bankir dan kebanyakan majikan, di sisi lain, bersikukuh bahwa standar emas merupakan perwujudan hukum ekonomi yang alami, dan mengutak-atik mekanisme tersebut akan mengakibatkan bencana ekonomi. Argumen-argumen mereka mungkin bisa diabaikan karena dianggap sebagai himbauan yang berdasarkan kepentingan diri-sendiri, tetapi bagi von Mises dan Hayek ini justru dipakai sebagai alasan teoretis untuk membenarkan kebijakan pemerintah untuk tidak bertindak di kala menghadapi ketidakstabilan ekonomi dan pengangguran besar-besaran. Bagi Polanyi, von Mises dan Hayek bukan hanya mendukung kebijakan ekonomi yang jahat dan tak bermoral; sangat tidak realistis untuk membayangkan bahwa jutaan keluarga yang tak mempunyai jaminan sosial akan dengan pasrah beradaptasi pada privatisasi ekonomi. Polanyi juga melihat bahwa di kala para pekerja dalam pemilihan umum mendukung kebijakan layanan publik, upah layak, dan tunjangan pengangguran, upaya-upaya tersebut dihalangi dengan mengatasnamakan penghematan. Akibat langsungnya ialah kekecewaan mendalam dengan pemerintahan demokratis, karena ketentuan standar emas telah menginjak-injak kedaulatan rakyat.

Partai-partai fasis memanfaatkan kekecewaan tersebut dengan menjanjikan keamanan yang tidak diberikan oleh para penganjur globalisasi. Karena itu, menurut Polanyi “kemenangan fasisme benar-benar tak bisa dihindari berkat penolakan kaum liberal [ekonomi] terhadap tiap reformasi yang terkait dengan perencanaan, regulasi atau kontrol.” Akan tetapi begitu berkuasa, Hitler mengabaikan kendala-kendala terhadap standar emas tersebut. Dengan bergerak cepat untuk memulihkan *full employment*, kaum Nazi dapat merebut dukungan rakyat dan berhasil mengkonsolidasikan kediktatoran mereka.

› **Fundamentalisme pasar dan otoriterisme**

Relevansi hal tersebut bagi keadaan masa kini sangat mencolok. Penerapan fundamentalisme pasar selama empat puluh tahun telah menciptakan suatu rezim penghematan yang permanen di mana pemerintah, sekali lagi, secara efektif dihalangi untuk dapat mendorong tingkat partisipasi kerja atau melindungi rumah tangga dari ketidakstabilan pasar. Suatu pemerintah yang mempertimbangkan untuk menantang pembatasan-pembatasan tersebut akan segera menghadapi pembalasan dalam bentuk penjualan besar-besaran surat utang negara dan larinya modal ke luar negeri. Bahkan pemerintah kiri pimpinan Syriza di Yunani, yang menang dalam pemilihan umum berkat penolakan terhadap kebijakan penghematan, dipaksa oleh Komunitas Eropa untuk melanjutkan kebijakan penghematan tersebut.

Saat ini kembali meluas kekecewaan terhadap lembaga-lembaga demokrasi dan kegagalan mereka untuk mengendurkan penghematan permanen itu. Partai-partai sayap kanan makin menguat dengan memanfaatkan kejengkelan pada norma dan lembaga demokrasi tersebut. Akhirnya, satu generasi baru pemimpin otoriter hasil pemilihan umum telah menganut “demokrasi iliberal” (*illiberal democracy*) yang dicirikan oleh manipulasi elektoral, kendali atas lembaga peradilan, pemberangusan media independen, dan politik kebencian yang memecah-belah “rakyat” dari “liyan” yang bukan bagian dari rakyat.

Jelasnya, para pemimpin otoriter masa kini tidak sama dengan para pemimpin fasis di abad ke dua puluh. Akan tetapi terlalu bodoh bila kita tenang-tenang saja saat melihat tiadanya barisan paramiliter berseragam seperti di masa itu. Mimikri sejarah bukan ukuran yang bisa dipegang sebagai perbandingan. Polanyi mengamati bahwa ancaman fasisme di periode antarperang dunia merupakan reaksi terhadap krisis demokrasi yang terjadi karena kukuhnya otoritas standar emas. Kita sekali lagi sedang menghadapi suatu krisis yang muncul karena lembaga-lembaga yang menguasai ekonomi dunia. Seperti para pendahulunya, para pemimpin otoriter zaman ini telah melangkah ke dalam kekosongan yang tercipta karena krisis tersebut dan dalam beberapa kasus bahkan telah mulai mempersekusi “lawan-lawan” mereka atas nama melindungi “kaum yang terlupakan.”

Pelajaran untuk saat ini adalah mendesaknya suatu proyek reformasi ekonomi global yang bisa memutus belenggu kebijakan penghematan permanen dan membongkar krisis demokrasi yang impoten. Memang, luar biasa berat tantangan untuk menciptakan gerakan reformasi global yang kuat. Bukan perkara sepele memulai kerjasama global yang diperlukan untuk menghadapi krisis seperti perubahan iklim, melonjaknya secara dramatis jumlah pengungsi global, dan ekonomi dunia yang makin kacau ini. Akan tetapi pada saat ini kita mungkin bisa menyatukan kebanyakan penduduk dunia lewat suatu proyek Kesepakatan Hijau Baru (*Green New Deal*) global yang akan membagikan sumberdaya dari Utara Global (*Global North*) ke Selatan Global (*Global South*), menanggapi darurat perubahan iklim, dan mentransformasi lembaga dan aturan yang menguasai perekonomian dunia. Inisiatif global ini akan membuka ruang di dalam lingkup bangsa-bangsa dan wilayah-wilayah antarbangsa untuk suatu pembaruan politik demokratis dan gelombang reformasi demi menciptakan ekonomi yang bermanfaat bagi semua orang. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada:
 Fred Block <fiblock@ucdavis.edu>
 Margaret R. Somers <peggs@umich.edu>

› Pasar sebagai Ketrampilan Kenegaraan: Pembacaan Atas Polanyi

oleh **Antonino Palumbo**, Universitas Palermo, Italia dan **Alan Scott**, Universitas New England, Australia dan anggota Komite Penelitian ISA mengenai Sosiologi Pembangunan Perkotaan dan Regional (RC21)



Karl Polanyi di Pickering, Ontario, di akhir 1950-an. Kredit: Kari Polanyi Levitt.

Kecuali ekonom (ortodoks), para ilmuwan sosial—khususnya sosiolog dan antropolog sosial—telah lama bersepakat bahwa pasar kompetitif murni bukanlah kondisi alamiah di dalam kehidupan manusia. Melalui konsensus ini, sudah tidak terhitung pembelaan mereka terhadap kedaulatan negara sebagai upaya membenarkan perluasan bentuk intervensi negara. Upaya ini semakin berlipatganda sejak Krisis Finansial Global (*Global Financial Crisis/ GFC*) tahun 2008. Setelah GFC, yang telah dibingkai sebagai krisis hutang negara (*crisis of sovereign debt*) dan diselesaikan melalui langkah-langkah penghematan, dukungan terhadap tindakan negara ini menggunakan satu dari dua bentuk utama: (i) pembelaan terhadap prinsip Keynesian dan pembangkitan intervensi mikro-ekonomi untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi; (ii) dorongan langkah yang bersifat nostalgia mengenai negara kesejahteraan pascaperang, dengan mendukung seruan bagi langkah-langkah redistributif yang ditujukan bagi pengurangan ketidakadilan sosial. Respon ini, yang banyak dianut kalangan kelompok progresif, gagal baik dari segi landasan konseptual maupun normatif. Keduanya gagal dalam menentang—dan bahkan malah melanggengkan—klaim neoliberal, yang sekarang ini sudah diterima secara umum meski tidak berdasar, bahwa pasti ada suatu pertukaran (*trade-off*) antara negara dan pasar.

› Negara sebagai pemenang pasar

Sejarah sosial dan politik dalam dua abad terakhir tidak mendukung penjelasan menang kalah (*zero-sum*) dalam hubungan antara negara dan pasar. Buku Karl Polanyi *Transformasi Besar* (*The Great Transformation*, dipublikasikan pertama kali tahun 1944) masih menyajikan pendekatan teoretis terbaik. Merangkum kritik teori sosial klasik dari ekonomi politik liberal, Polanyi berargumen bahwa politik *laissez-faire* yang didesain untuk menghasilkan suatu masyarakat pasar merupakan hasil dari suatu perencanaan politik, sedangkan tekanan sosial yang mendorong gelombang regulasi protektif adalah reaksi spontan untuk melawan ketegangan yang dihasilkan oleh kebijakan tersebut. Dengan menjadikan pasar sebagai suatu tindakan kenegaraan, penolakan Polanyi terhadap asumsi-asumsi pemikiran ekonomi politik lebih radikal

daripada pendekatan-pendekatan Marxis. Polanyi memandang negara sebagai pemrakarsa dorongan untuk membentuk ekonomi pasar, dan sekaligus pemimpin yang harus menyelamatkan pasar dari siklus krisis yang mereka cenderung hasilkan. Alih-alih menjadi komite eksekutif kaum borjuis, negara terlibat dalam penciptaan dan modifikasi pasar untuk alasan-alasan politis semata—untuk memperkuat kekuasaan kedaulatan mereka—dan bukan karena hegemoni yang didapatkan oleh ide-ide liberal atau neoliberal di antara elit-elit politik dan teknokratis.

Bagaimana pasar bisa membantu negara memperbesar kekuasaan kedaulatan mereka? Jawaban yang kami turunkan dari pemikiran Polanyi mengenai perubahan adalah bahwa pasar memiliki kemampuan untuk meruntuhkan hubungan kooperatif yang menjadi landasan bagi kehidupan komunal dengan menjadikan sub-kelompok yang beragam berkompetisi satu sama lain. Dalam hal yang seperti ini, pasar merepresentasikan kekuasaan halus (*soft power*) sebagai alternatif dari kekuatan militer dan represif. Mereka meruntuhkan koherensi internal dan otonomi normatif komunitas, menyebabkan aktor-aktor negara bebas dalam mengatasi oposisi sosial, melalui usaha dari atas ke bawah (*top-down*) untuk memaksakan kehendak sentralistik para birokrat. Pertempuran melawan otoritas feodal, organ perantara, asosiasi profesi dan serikat yang dibentuk oleh negara absolutis dan lantas dilanjutkan oleh negara liberal menempatkan hal ini sebagai tujuan utamanya. Minat yang ditunjukkan oleh penguasa Soviet di sosialisme pasar, dan penerimaan Partai Komunis Tiongkok terhadap pasar neoliberal mencerminkan logika ini pula. Kita pun tidak boleh mengabaikan cara-cara di mana pola pasar telah diterapkan secara selektif dan strategis untuk meruntuhkan komunitas dan kelompok yang selama ini aktif melawan kekuasaan birokrasi negara. Berbeda dengan Marx (dan para pengikutnya), kritik Polanyi terhadap pasar tidak difokuskan pada pertanyaan mengenai eksploitasi dan/atau alienasi pekerja, melainkan dengan hasilnya yang anomi: pada pengikisan kemampuan kelompok untuk mengatur hubungan sosial dan merawat kohesi normatif.

› **Suatu Logika Kolonial**

Dalam mengejar dorongan sentralis ini, otoritas negara menerapkan logika kolonial baik pada tingkat dalam negeri (untuk menundukkan komunitas-komunitas adat dan musuh-musuh internal) maupun pada tingkat internasional (untuk memaksakan kekuasaan negara terhadap wilayah dan penduduk asing). Dilihat secara historis, kedua aktivitas ini terhubung secara erat. Ekspansi eksternal telah menjadi alat utama bagi negara untuk mampu meredam meningkatnya konflik sosial internal yang dihasilkan dari reformasi pasar—atau apa yang disebut sebagai “pertanyaan sosial.” Kesamaan antara bentuk kolonisasi internal dan eksternal juga bisa dilihat dari hubungan kerja sama yang diciptakan otoritas negara dengan aktor-aktor sosial lainnya. Dalam tingkat domestik, proses konsolidasi negara telah mensyaratkan pembentukan koalisi-koalisi kolusif dengan berbagai

elit sosial dan ekonomi yang mau membagikan baik beban maupun keuntungan. Demikian pula di tingkat internasional, kekuasaan-kekuasaan kolonial selalu mengandalkan dukungan dari kelompok etnik atau elit sosial yang taat dengan siapa mereka telah berbagi hasil rampasan usaha kolonial. Dalam kedua kasus, koalisi kolusif yang telah diciptakan dengan cara ini bersifat kompetitif, memaksa anggoutanya untuk secara berkala menegosiasiasi ulang persyaratan kemitraan melalui cara-cara yang mementingkan diri sendiri. Krisis-krisis ekonomi dan politik dengan demikian merepresentasikan kesempatan untuk memindahkan tanggung jawab kepada mitra lain dan untuk memperbaiki sistem pasar, sehingga memproduksi siklus peraturan dan deregulasi yang digambarkan oleh Polanyi.

› **Menghubungkan kembali sosial dan politik**

Mengingat konteks strategi yang kompleks dan ketergantungan antara negara dan pasar, penekanan pada kedaulatan negara dan seruan untuk lebih banyak [peran] negara dan lebih sedikit [peran] pasar bukan hanya naif, tetapi buruk. Dukungan sosial kepada tindakan negara dalam kenyataannya dilakukan secara sistematis untuk menempuh langkah-langkah darurat yang mendorong kekuasaan posisi tawar aktor-aktor negara dalam proses negosiasi ulang koalisi di mana mereka terlibat di dalamnya. Demikian pula, ketakutan terhadap penolakan negara berdaulat untuk membayar utang (*sovereign currency default*), kenaikan pajak, pelarian modal (*capital flight*) dieksploitasi untuk memperkuat tangan ekonomi monopolistik dan elit sosial yang duduk di meja perundingan. Dekade terakhir melambangkan pergerakan dan pergerakan tandingan yang dibuat oleh para anggota koalisi kolusif yang bertanggungjawab terhadap pembentukan konsensus neoliberal yang diruntuhkan oleh GFC. Untuk tidak mengulang kesalahan sebelumnya, kita membutuhkan solusi yang lebih dari advokasi langkah-langkah kesejahteraan yang bertujuan melindungi kaum miskin. Pertanyaan sosial perlu dihubungkan kembali dengan pertanyaan politik: demokratisasi pasar maupun pemerintah. Himbauan Polanyi pada hak-hak-hak sosial dan pada demokrasi industrial adalah pengakuan terhadap kebutuhan pokok semacam ini. Tetapi perluasan suatu demokrasi dengan tujuan untuk memberdayakan warga saat ini harus diperluas melebihi konteks ketenagakerjaan yang harus mencakup—di antaranya—hak-hak konsumen, penempatan batas legal pada pemantauan (baik negara maupun korporasi), ukuran pembatasan perumahan dan spekulasi keuangan, dan fokus ulang pada pertanyaan mengenai lingkungan, alam, dan sumber daya alam jauh dari kepentingan ekonomi sempit ke arah tanggung jawab kepada generasi-generasi mendatang. Alternatifnya adalah dengan hidup dengan konsekuensi ekonomi, politik, dan sosial di masa kini dan akan datang yang dihasilkan dari kegagalan suatu utopia neoliberal. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada
 Antonino Palumbo <antonino.palumbo@unipa.it>
 Alan Scott <ascott39@une.edu.au>

› Polanyi, Akuntansi, dan ‘Melampaui PDB’

oleh **Gareth Dale**, Universitas Brunel London, Inggris Raya



Karl Polanyi di Wina, 1923. Kredit: Kari Polanyi Levitt.

Waktu mendebat Ludwig von Mises mengenai masalah akuntansi sosialis, Karl Polanyi menyampaikan ungkapan berikut: “Akuntansi adalah suatu gambaran kuantitatif mengenai kegiatan ekonomi. Ekonomi kapitalis, misalnya, berkisar sekitar laba, maka akuntansinya memberikan gambaran mengenai hubungan antara tiap unsur modal dengan laba. Kegiatan tentara membatasi diri pada pencapaian tujuan teknis militer dengan menghabiskan uang dan barang, sehingga gambarannya menjadi, dalam artian tertentu, suatu tujuan tersendiri: hal itu memungkinkan pengendalian...” Tugas masing-masing sistem akuntansi, lanjutnya, “oleh sebab itu hanya se-

bagai berikut: akuntansi harus menawarkan kepada kita jawaban kuantitatif pada pertanyaan yang perlu kita ajukan mengenai kegiatan ekonomi yang ada. Ciri dari pertanyaan-pertanyaan ini menentukan ciri dari sistem akuntansi yang akan memberikan jawaban-jawaban padanya. Ekonomi kapitalis, misalnya, menjadikan laba sebagai tujuan praktisnya, dan oleh sebab itu sistem akuntansinya diberi tugas untuk memberikan gambaran yang secara kuantitatif menyajikan hubungan antara masing-masing unsur yang menjadi cirinya (unsur-unsur modal yang berbeda) dengan keharusan meraih laba.”

Dalam kalimat ini, Polanyi mengidentifikasi prinsip inti

ekonomi kapitalis, yaitu: berkisar di sekitar laba. Ia pun memberikan contoh mengenai akuntansi tentara (yang “memungkinkin pengendalian”) sebagai suatu contoh mengenai suatu tipe yang berbeda. Marilah kita menjajaki hal ini sejenak, dengan memulai dengan perdebatan besar tentang akuntansi dan transformasi pada periode antarperang. Yang satu adalah perdebatan akuntansi sosialis, dalam mana Polanyi ikut berpartisipasi. Yang lain revolusi dalam akuntansi pendapatan nasional. Di sini seorang pelopornya adalah Wesley Mitchell, seorang ahli ekonomi institusionalis. Ia mengkritik teori neoklasik sebagai “kualitatif” dan menyerukan diterapkannya kuantifikasi ke dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi harus ditempatkan di bidang yang dapat diukur, dan dengan demikian kokoh.

› Lahirnya akuntansi pendapatan nasional

Pada tahun 1920, menjelang intervensi Polanyi dalam perdebatan akuntansi sosialis, Mitchell mendirikan Biro Penelitian Ekonomi Nasional. Biro tersebut bertugas untuk mengumpulkan data secara sistematis, dan untuk mengembangkan suatu gambaran statistik yang cermat mengenai ekonomi secara keseluruhan. Mitchell merupakan salah seorang pembuat disain konsep modern mengenai suatu pendapatan nasional. Ia membuatnya dengan menyediakan angka-angka yang nyata, yang dimaksudkan untuk mewakili konsep tersebut. Dengan melakukan hal tersebut, ia menciptakan apa yang oleh Philip Mirowski dalam bukunya *The Birth of the Business Cycle* disebut “suatu entitas teoretis baru” (a new theoretical entity). Karya ini mempersiapkan panggung bagi revolusi makroekonomi dalam ilmu ekonomi: bagi *General Theory* dari Keynes, dan juga bagi Produk Domestik Bruto (PDB) (Gross Domestic Product/GDP). Pada tahun 1932 Kongres AS menugaskan Simon Kuznets—seorang mahasiswa Mitchell—untuk menciptakan cara untuk mengukur penghasilan (*output*) nasional. Karya Kuznets akhirnya menghasilkan Produk Nasional Bruto (PNB) (*Gross National Product/GNP*) dan PDB. Tahun 1930-an menyaksikan pula upaya Colin Clark untuk secara statistik memperkirakan “angka pertumbuhan penghasilan nyata per kepala,” maupun “model dinamis pertama yang mengklaim mewakili suatu perekonomian secara keseluruhan” yang diterbitkan Jan Tinbergen pada tahun 1936.

Pada awalnya, akuntansi pendapatan nasional dilaksanakan oleh suatu arus reformis. Jika pemerintah akan melakukan intervensi secara efektif untuk mengurangi penderitaan selama tahun-tahun Depresi, pemerintah perlu bantuan dari para ahli statistik. Rancangan awal Kuznets berupaya mengembangkan akuntansi nasional melalui jalur berbasis kesejahteraan, mencakup [hal yang] “baik” (*goods*) tetapi mengurangi pengeluaran sebagai [hal yang] “buruk,” (*bads*), seperti persenjataan. Tetapi, sebagaimana dicatat oleh Marion Fourcade dalam *Economists and Societies*, perhatian Kuznets dan Mitchell terhadap kesejahteraan dikesampingkan manakala desakan perencanaan untuk perang dan kemudian makroekonomi Keynesian dan manajemen permintaan didahulukan. Kuznets sendiri menangani perencanaan militer di Dewan Produksi Perang dengan menggunakan teknik akuntansi pendapatan nasional yang telah ia bantu kembangkan di Departemen Perdagangan. Dengan proses yang sama, pengeluaran militer—

personel, gaji dan pembelian senjata—menjadi dimasukkan dalam PDB, meskipun pengeluaran untuk kesejahteraan (jaminan sosial dan tunjangan pengangguran) tereksklusi.

› Masalah dengan PDB

Pada intinya PDB menyajikan suatu survei mengenai kegiatan ekonomi dari sudut pandang nilai tukar berdasar transaksi legal. PDB memberikan “imbalan” bagi komodifikasi: nyanyikan sebuah lagu dan PDB tidak naik, tetapi nyanyikan lagu yang sama dan tuntutan agar yang hadir membeli tiket, dan PDB akan naik. PDB tidak mencakup transaksi dalam mana uang tidak berpindah tangan—pekerjaan rumah, pekerjaan yang dilakukan sendiri, dan pekerjaan sukarela. PDB buta gender dan buta kelas. PDB mengabaikan distribusi penghasilan. Seperti nilai tukar, PDB juga buta terhadap alam. PDB memperlakukan penjualan sumber daya alam sebagai penghasilan, tanpa melakukan pengurangan yang sepadan bagi penyusutan sumber daya. PDB tidak memperhitungkan eksternalitas.

PDB, dengan demikian, adalah suatu ukuran yang secara khusus tepat bagi suatu dunia yang didominasi oleh nilai tukar; PDB adalah suatu ukuran kapitalis yang esensial. Namun, PDB pun merupakan suatu indeks yang dikembangkan oleh negara-negara dan digunakan untuk memberikan suatu gambaran mengenai “ekonomi nasional,” dengan perhatian utama pada persaingan geopolitik. PDB adalah suatu indeks yang mencerminkan sifat dan kebutuhan negara-negara kapitalis. Mereka tidak langsung tertarik pada laba, melainkan pada pengelolaan masyarakat demi kepentingan modal. Oleh sebab itulah bentuk-bentuk gambaran statistik tentara, meskipun di kala menyangkut perencanaan, tidak boleh dipertentangkan dengan yang berlaku di bisnis kapitalis.

Di masa kini, PDB diperdebatkan dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Salah satu konsekuensinya ialah agenda “Melampaui PDB” (*Beyond GDP*). Apakah dengan alasan skeptisisme terhadap pertumbuhan atau kekhawatiran bahwa jika pertumbuhan PDB tetap kendur maka keabsahan kinerja pemerintah akan menderita pula, para pemimpin politik, pegawai negeri dan akademisi—di antaranya Nicolas Sarkozy, Jacinda Ardern, Gus O’Donnell, Joseph Stiglitz, dan Amartya Sen mempromosikan tolok ukur alternatif.

Bagi David Yarrow, ekonom politik Polanyian, agenda Melampaui PDB mempunyai potensi untuk mengakibatkan destabilisasi pada susunan “perekonomian” sebagai suatu obyek pasar-sentris yang terpadu. Seandainya hal ini terjadi, ini akan merupakan perkembangan yang diharapkan. Namun PDB tidak mendefinisikan tujuan pokok sistem ekonomi. Tujuan tersebut adalah akumulasi modal secara kompetitif, dan prinsip-prinsip akuntansi yang memandunya berada pada jenjang perusahaan, bukan pada negara. Jika analisis di atas benar, jika kritik terhadap pertumbuhan (*growthism*) hanya difokuskan pada metrik PDB namun tertutup terhadap modal, mereka menghalangi penyebab yang lebih mendalam. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Gareth Dale
<Gareth.Dale@brunel.ac.uk>

› Transformasi Besar:

Marketisasi Asia Timur

Oleh **Jonathan D. London**, Universitas Leiden, Belanda



| Karl Polanyi. Kredit: Kari Polanyi Levitt.

Ekspansi pasar berskala dunia serta pendalaman pasar dan hubungan pasar menempati peringkat sangat penting di antara berbagai perkembangan paling transformatif di zaman kita. Kita dapat menggambarkan proses-proses ini dengan sebuah istilah baru yang generik meski sedikit kurang elegan, yaitu marketisasi (*marketization*). Akselerasi proses-proses marketisasi yang telah berlangsung secara global dalam beberapa dekade terakhir tersebut sangatlah bersifat “Polanyian,” yang mencerminkan baik dialektika ekspansi pasar dan habitasi maupun strategi-strategi politik yang dengan sengaja dijalankan oleh para aktor politik elit yang ingin mengatur kehidupan sosial guna memenuhi kepentingan-kepentingan khusus dan tujuan-tujuan instrumental. Meskipun begitu, cara-cara di mana marketisasi

telah berkembang, respon-respon lokal yang telah dimunculkannya, dan pengaruh-pengaruhnya terhadap kesejahteraan serta ketidaksetaraan, sangatlah bervariasi di seluruh maupun di dalam berbagai wilayah dunia.

Secara global, marketisasi telah diasosiasikan dengan peningkatan perdagangan dan investasi, industrialisasi dan finansialisasi, serta akumulasi modal dalam skala besar, dan pertumbuhan pendapatan dan kekayaan yang tidak merata; tetapi juga dengan lonjakan ketimpangan, keresahan ekonomi yang meluas dan sistemik, dan bencana ekologis. Kesemuanya ini telah dimungkinkan dan dipercepat oleh keberhasilan luas dari berbagai kepentingan kapitalis yang berkeinginan membuat dunia ini aman bagi akumulasi [modal], berapa pun besar biayanya. Di seluruh dunia, percepatan marketisasi telah berjalan seiring dengan difusi praktik korupsi yang dilakukan dalam kedok prinsip-prinsip “ramah pasar.” Ini telah menyebabkan perkembangan rezim-rezim akumulasi yang semakin global namun secara politis tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga [di satu sisi] menghasilkan kekayaan tetapi [di sisi lain] juga meningkatkan ketidaksetaraan, dengan mempertahankan ketidakamanan ekonomi dan penderitaan yang [tidak] dapat dihilangkan bahkan ketika pendapatan rata-rata meningkat dan konsumsi meningkat.

Tetapi apakah seluruh situasinya seburuk itu? Bagaimanapun juga, dengan adanya marketisasi, dunia telah tumbuh lebih kaya, terutama di Asia Timur, yang dalam hal ini mencakup 20 atau lebih negara di antara Jepang dan Indonesia. Eksplorasi tentang dinamika marketisasi dan dinamika yang menyertainya di Asia Timur dapat berkontribusi pada analisis Polanyian di zaman kita.

› “Gerakan ganda” di Asia Timur

Di antara data mengenai tiga dekade terakhir marketisasi yang paling banyak dikutip adalah data yang menyoroti kontribusi marketisasi terhadap perbaikan standar kehidupan di negara-negara sedang berkembang, khususnya di Asia Timur. Menurut Bank Dunia, antara tahun 1990 hingga 2016 bagian penduduk Asia Timur yang hidup dalam “kemiskinan ekstrim” menurun dari lebih dari 60% menjadi kurang dari 3%. Namun, angka-angka khusus ini tidak mencakup masyarakat pasar yang relatif lebih miskin dan tumbuh lebih lambat di Asia Tenggara. Dan angka-angka tersebut didasarkan pada garis kemis-

kinan rendah yang meragukan dan representasi kemajuan yang melayani kepentingan-kepentingan dominan yang mendorong kekuatan pasar. Meskipun tidak sebagaimana yang diharapkan dan bagaimanapun bervariasinya hal tersebut, kecenderungan regional tersebut jelas. Proses marketisasi di negara-negara berpenghasilan tinggi, menengah, dan rendah di Asia Timur telah memfasilitasi pertumbuhan dan peningkatan standar hidup maupun meningkatkan ketidaksetaraan dan terkadang tingkat eksploitasi yang mengejutkan. Namun marketisasi Asia Timur juga mencerminkan elemen “gerakan ganda” Polanyian.

Suatu aspek yang secara khusus sangat menarik dari pasar dunia kontemporer adalah bahwa walaupun perluasannya telah difasilitasi oleh hegemoni gagasan dan kepentingan neoliberal (Dale, 2012), kemajuannya diiringi pula oleh peningkatan skala yang cepat dan berbagai kebijakan sosial di seluruh negara berpenghasilan menengah dan rendah di dunia. Alih-alih menghasilkan gerakan kontra, perluasan kebijakan sosial di negara-negara berpenghasilan menengah dan rendah yang telah menyertai marketisasi justru mencerminkan pembentukan dan institusionalisasi berskala dunia dari masyarakat pasar global atau *tatanan-tatanan sosial*, yang masing-masing dibentuk oleh elemen-elemen hubungan sosial dan kelembagaan yang spesifik bagi setiap negara.

Di Asia Timur, skala, ruang lingkup, kecepatan, dan kompleksitas yang terlokalisasi dari proses-proses ini sangatlah mengesankan, [dan] terjadi dengan latar belakang perkembangan yang tidak merata dan berkombinasi. Di seluruh wilayah, skala dan ruang lingkup sistem pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial telah berkembang pesat seperti halnya pengeluaran publik dan swasta di bidang-bidang ini. Di Korea dan Taiwan, dan bahkan di Thailand, Indonesia, dan Filipina, ekspansi kebijakan sosial telah dipercepat oleh insentif-insentif yang diperoleh melalui pemilihan umum (*electoral incentives*) yang memberi imbalan kepada para elit yang berjanji untuk meningkatkan perlindungan sosial. Di Singapura, Hong Kong, dan Malaysia yang relatif lebih kaya, negara-negara yang tidak demokratis telah meluncurkan layanan-layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial dengan skala yang mengesankan, meskipun dilihat secara stratifikasi hal tersebut mempertahankan kemiskinan yang berkelanjutan. Di Tiongkok dan Vietnam, partai-partai komunis yang secara nominal anti-kapitalis telah melembagakan masyarakat pasar yang menunjukkan kerangka kerja politik korporatis yang sangat otoriter yang telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan suatu basis pelayanan dasar untuk bagian yang makin besar dari penduduk, sekalipun akses kepada layanan di luar tingkat dasar memerlukan modal politik dan ekonomi. Bahkan Kamboja, Laos, dan Myanmar memperlihatkan rangkaian kebijakan sosial yang diperluas.

› **Memperdebatkan hakekat dari gerakan ganda**

Dilihat secara global, beberapa pendapat menganggap perkembangan di Asia Timur sebagai bukti dari gerakan ganda Polanyian yang melakukan de-komodifikasi, di mana integrasi yang sedang berlangsung pada masyarakat-masyarakat Asia Timur yang industrialisasinya terlambat ke dalam pasar dunia yang berkembang disertai dengan diluncurkannya kebijakan-kebijakan sosial negara yang bertujuan untuk melindungi penduduk-penduduknya dari guncangan-guncangan pasar domestik dan pasar dunia sambil juga mendukung pengembangan kemampuan yang diperlukan untuk bersaing dan mendorong mobilitas ke atas di dalamnya. Menyikapi ekspansi global kebijakan sosial, Harris dan

Scully berpendapat bahwa komodifikasi di kawasan Selatan Global telah lama mendahului neoliberalisme dan bahwa, meskipun ada penekanan neoliberalisme pada pengembangan dan perluasan peran pasar, kemajuannya telah mengaburkan “perubahan nyata menuju *de-komodifikasi* dari kehidupan ekonomi politik.” Memang, ILO melaporkan bahwa pada tahun 2019 sekitar separuh dari penduduk dunia dilindungi oleh setidaknya satu [program] tunjangan sosial.

Orang-orang yang skeptis terhadap perluasan kebijakan sosial di Asia Timur mendeteksi suatu [praktik] neoliberal yang berbeda dan bahkan gerakan ganda Polanyian yang *palsu*, suatu gerakan yang membawa orang-orang Asia Timur menjauh dari prinsip-prinsip universalisme dan dekomodifikasi dan justru mengarah pada moda-moda tata kelola dan kewargaan pasar yang mengisolasi akumulasi pasar dari mekanisme-mekanisme yang demokratis. Gerakan ganda neoliberal ini mencerminkan suatu asumsi bahwa kesejahteraan sebaiknya dipromosikan dan ditentukan di dalam maupun melalui pasar, bahkan diarahkan agar kebijakan-kebijakan sosial itu sendiri mendorong logika-logika ekonomi pasar. Melonjaknya ketidaksetaraan dan komersialisasi luas serta adanya stratifikasi dalam layanan yang terlihat di wilayah tersebut mendukung pandangan ini. Memang, kebijakan-kebijakan sosial negara di wilayah tersebut telah menjadi situs utama dari akumulasi modal.

Jadi, apa yang harus kita simpulkan dari transformasi besar Asia Timur, yang telah dikaitkan dengan perbaikan signifikan—meskipun tidak merata—dari standar kehidupan, ketergantungan luas penduduk pada masyarakat pasar yang dibangun dan dipelihara untuk melayani kepentingan para elit, tetapi juga meningkatkan pendapatan dan ekspansi yang signifikan dalam skala dan ruang lingkup kebijakan sosial?

› **Pelebagaan dalam tatanan sosial**

Untuk memahami pentingnya transformasi Asia Timur, diperlukan analisis tentang negara-negara Asia Timur sebagai tatanan sosial dan, bersama dengan itu, eksplorasi mendalam tentang elemen-elemen hubungan sosial dan kelembagaan yang dinamis. Hanya di Korea dan Taiwan kami benar-benar mengamati bahkan menemukan indikasi tentang isyarat-isyarat melekatnya kembali pasar yang sesuai dengan pandangan Polanyi. Di Tiongkok dan Vietnam, gerakan ganda telah terjadi melalui konsolidasi tatanan pasar yang Leninis. Di seluruh wilayah, kebijakan-kebijakan sosial, seperti halnya pasar, telah berkembang di dalam relasi-relasi kuasa dan dialihkan melalui relasi kuasa yang ada tersebut. Jika ada suatu kecenderungan yang luas, adalah bahwa para elit Asia Timur yang telah melembagakan tatanan sosial dan jenis-jenis kewarganegaraan pasar yang ditandai oleh kebijakan sosial universalis yang lemah yang memperluas landasan layanan yang kurang lebih memadai tetapi menciptakan akses ke layanan di luar dengan prinsip berbayar dan koneksi-koneksi politik. Dengan demikian, di Asia Timur, peningkatan yang signifikan dalam standar kehidupan, konsumsi massal, dan konsumerisme, serta kebijakan sosial di tengah meningkatnya ketidaksetaraan, ketidakamanan ekonomi yang berkelanjutan, dan bencana ekologis memang mewakili transformasi besar, meskipun bukan jenis yang dibayangkan oleh Polanyi dan yang mungkin masih harapkan oleh orang-orang lain. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Jonathan London
<j.d.london@hum.leidenuniv.nl>

› Ketakutan akan

Penggantian Penduduk

oleh **Attila Meleg**, Direktur Pendiri Karl Polanyi Center di Universitas Corvinus Budapest, Hungaria

Penduduk Eropa Timur (sekali lagi) sedang dalam proses memahami wawasan [salah satu] putra [terbaik] mereka, Karl Polanyi. Setelah menulis *Transformasi Besar* dan menjelaskan mengapa utopia pasar mengarah pada kebutuhan untuk mendapatkan kembali “selubung pelindung” terhadap sistem “fiksi mentah,” pada tahun 1945 Polanyi juga berpendapat bahwa pengenalan pasar bebas akan menyebabkan nasionalisme yang gila di Eropa Timur:

“Jika Piagam Atlantik benar-benar berkomitmen untuk memulihkan pasar bebas di tempat di mana mereka telah menghilang, kita mungkin membuka pintu untuk mengenalkan kembali nasionalisme yang gila ke wilayah-wilayah tempat ia telah menghilang.” (Polanyi, “Kapitalisme Universal atau Perencanaan Wilayah”)

Chris Hann, dalam bukunya yang terbaru *Repatriating Polanyi*, juga mengklaim bahwa penyebab yang lebih dalam dari bangkitnya nasionalisme di Eropa adalah keberadaan lembaga-lembaga “tatanan neoliberal global.” Dalam makalah singkat ini saya berpendapat bahwa perubahan demografis dalam era neoliberal global telah mendorong umat manusia—termasuk di Eropa, Eropa Timur dan (sebagai kasus uji), yang sangat penting, masyarakat Hungaria—untuk mencari perlindungan terhadap utopia pasar global. Masyarakat-masyarakat ini menolak kepentingan modal yang ingin mengganti penduduk domestik yang hilang atau keluar dengan para migran yang tercerabut dari wilayah-wilayah di luar negara-negara tetangga.

› Faktor tingkat global

Era neoliberal yang dimulai pada akhir 1980-an telah menyaksikan sejumlah perubahan yang sangat penting dalam proses demografis global yang dapat membuat migrasi menjadi masalah yang jauh lebih kontroversial daripada di periode sebelumnya.

- Selama periode globalisasi, migrasi telah meningkat lebih cepat daripada [pertumbuhan] penduduk, sementara kesuburan terus menurun, menyebabkan penuaan penduduk yang serius. Sementara itu, peningkatan angka kematian telah melambat sedikit dibandingkan dengan periode sebelumnya.

- Di balik pertumbuhan migrasi ada peran kunci yang dimainkan oleh mobilitas modal yang meningkat, yang menggeser dan mencabut segmen besar masyarakat secara global. Restrukturisasi ekonomi yang dihasilkan dan hilangnya pekerjaan yang stabil telah membuat pekerjaan sehari-hari dan kehidupan keluarga jauh lebih tidak stabil dan meningkatkan rasa tidak aman.

- Perdebatan tentang migrasi (berdasarkan pada pola diskursif yang diwariskan secara historis dalam mengendalikan atau mempromosikan migrasi) telah menjadi semakin sengit karena meningkatnya jaminan kesejahteraan dan kompetisi tenaga kerja. Hal ini terkait dengan faktor-faktor yang saling terkait berikut: penuaan yang berkelanjutan dari populasi global akibat menurunnya kesuburan; penurunan yang terlihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja dalam kelompok usia aktif; konvergensi kecil upah dalam mana kelompok-kelompok istimewa dari Barat mengalami sedikit atau tidak ada kenaikan upah; dan stagnasi keseluruhan tingkat redistribusi sejak pertengahan 1990-an, seperti yang dijelaskan oleh Böröcz dalam makalah 2016 tentang “Ketimpangan Global dalam Redistribusi.”

› Faktor-faktor di tingkat Eropa

Tingkat kesuburan di Eropa yang secara historis lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata kesuburan di tingkat global, dan penuaan yang terus-menerus di atas rata-rata sementara juga kehilangan beberapa manfaat mortalitas di benua tersebut, menunjukkan semakin pentingnya faktor-faktor demografis dalam menjelaskan mengapa seluruh Eropa menjadi sedemikian cemas dengan migrasi. Ini terkait dengan paradoks migrasi versus persaingan kesejahteraan di era neoliberal. Mobilitas modal sudah sangat tinggi (batas aliran dari Investasi Langsung Asing telah berada di atas tingkat global). Ekonomi sosialis Eropa yang tertanam secara rumit dibongkar demi mobilitas ini, yang dengan sendirinya menyebabkan hilangnya pekerjaan dan mobilitas penduduk besar-besaran di ruang yang terbuka, tetapi tidak berkembang dengan setara. Kita juga melihat bahwa Eropa sebagai wilayah istimewa, dalam arti kesejahteraan ekonomi per kapita, telah menurun signifikansinya di tingkat global, sementara terus migrasinya terus meningkat dan berada di atas tingkat migrasi global.

› **Faktor-faktor tingkat regional dan lokal**

Jika kita membandingkan lapangan pekerjaan dalam jangka panjang kita dapat melihat bahwa, dari tingkat tertinggi sepanjang masa yang jauh di atas tingkat global 1980 pada 1980-an di negara-negara Eropa Timur, tingkat partisipasi angkatan kerja turun jauh di bawah tingkat Eropa dan bahkan global pada 1990-an dan 2000-an, sebelum naik kembali di tahun 2010-an. Jadi, ada dua dekade yang hilang, yang memiliki dampak besar pada masyarakat ini.

Periode guncangan ekonomi ini menandakan adanya pergusuran dan pencabutan besar-besaran. Seperti yang diperdebatkan Hann, ini berarti bahwa perubahan tingkat makro radikal secara terang-terangan bertentangan dengan norma-norma dan praktik sehari-hari orang-orang dalam transisi ke “masyarakat pasar.” Mengenai imigrasi, karakteristik kuncinya adalah bahwa seluruh wilayah, termasuk Hongaria, mengirimkan arus besar orang ke Barat tetapi hanya menerima migran dari wilayah terdekat; tautan selanjutnya jarang dan relatif lemah. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada tahun 2015 lebih dari 25 juta orang yang lahir di negara-negara kecil Eropa Timur tidak tinggal di negara kelahiran mereka; sementara itu, jumlah total imigran, terutama dari wilayah terdekat, hanya melebihi 10 juta, yang menunjukkan kerugian populasi dalam skala besar.

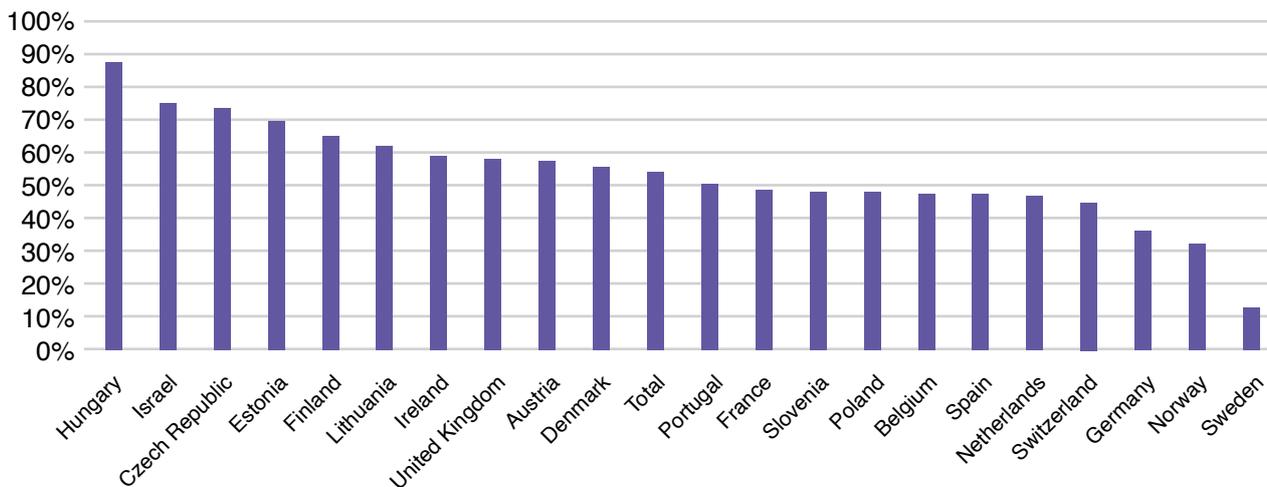
Konsekuensi dari pertukaran yang tidak merata dengan negara-negara Barat (modal masuk dan tenaga kerja keluar)—hilangnya tenaga kerja dan keterampilan; meningkatnya ketidakcocokan antara permintaan tenaga kerja dan persediaan tenaga kerja; dan hilangnya pembayaran sosial dan pajak, terutama dalam keseluruhan proses penuaan—merupakan hal yang serius dari sudut pandang negara-bangsa dan sistem

kesejahteraan sosialnya. Mungkin saja dapat diperdebatkan bahwa, berlawanan dengan kecenderungan global—dan sampai batas tertentu bahkan kecenderungan Eropa—kecenderungan terhadap pertumbuhan populasi yang stabil terdapat ancaman bahwa beberapa negara di Eropa Timur tidak akan dapat berfungsi dari sudut pandang demografis tanpa ketegangan besar. dalam sistem kesejahteraan sosial mereka yang sudah terpotong. Ini dapat menjelaskan mengapa beberapa penduduk Eropa Timur sangat terbuka terhadap kekawatiran mengenai pertukaran penduduk.

Kita dapat berargumen bahwa kepentingan bisnis dan modal jelas berada dalam “pertukaran tenaga kerja migran yang fiktif.” Dalam kerangka kerja neoliberal mereka dengan senang hati mengeluarkan tenaga kerja dan menawarkan daerah pengirim kesempatan untuk “mengimpor” tenaga kerja yang sama-sama abstrak. Hal ini yang ditolak oleh komunitas lokal dan beberapa pemerintah nasionalis sebagai pilihan malapetaka di tengah kerapuhan demografis. Paradoksnya, dan dalam beberapa hal tragis, kepanikan ini sangat efektif ketika masalahnya adalah krisis pengungsi baru-baru ini yang disebabkan oleh ketegangan dan perang dalam 30 tahun terakhir neoliberalisme. Tetapi tidak ada jawaban nasional atau nasionalis untuk ketegangan dan kontradiksi semacam itu. Hanya gerakan ganda global yang dapat merumuskan jawaban yang mungkin menunjukkan jalan keluar dari ketegangan saat ini, alih-alih pertahanan mekanis, otoriter dari “badan demografis” nasional atau lokal. Langkah keluar dari tatanan neoliberal mungkin merupakan satu-satunya cara untuk menjamin martabat migran dan non-migran di seluruh dunia secara bersamaan. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Attila Melegh <melegh@demografia.hu>

Hanya mengizinkan sedikit atau tidak mengizinkan imigran dari negara lebih miskin di luar Eropa, Survei Sosial Eropa 2014 (sebelum apa yang dinamakan krisis pengungsi)



Sumber: Survei Sosial Eropa (ESS), putaran 2014/2015, https://www.europeansocialsurvey.org/download.html?file=ESS7e02_2&y=2014, diakses 15 Oktober 2019.

› Jalan Menuju Populisme

oleh **Chris Hann**, Institut Max Planck untuk Antropologi Sosial, Jerman



Para migran di stasiun kereta api Keleti di Budapest, Hungaria pada tahun 2015. Kredit: Chris Hann.

The *Road to Serfdom* (Jalan Menuju Perbudakan) karya Friedrich Hayek menjadi sebuah pelengkap bagi terbitnya buku *The Great Transformation* (Transformasi Besar) karya Karl Polanyi yang diterbitkan di London sebelumnya, yakni pada bulan Maret 1944. Buku-buku tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai karya sosiologi profesional maupun ilmu sosial. Keduanya merupakan buku populer yang ditulis oleh para ilmuwan yang bertujuan untuk menjangkau khalayak luas. Namun ketika buku Hayek mencapai tujuannya dengan sangat cepat (sebagian karena munculnya versi singkatnya yang diterbitkan di majalah *Reader's Digest* di AS), karya Polanyi yang jauh lebih panjang hanya dapat menikmati angka penjualan yang sederhana. Meskipun Polanyi dan Hayek keduanya berakar dalam ekonomi Austria, mereka sangat berbeda dalam gaya dan substansi. Polanyi merinci sejarah ekonomi dan etnografi kolonial Inggris untuk memnbuat kesimpulan dengan argumen-argumen yang mendukung sosialisme demokratis. Karya Hayek lebih abstrak dan retorik. Ia berpan-

dangan bahwa doktrin-doktrin ekonomi liberalisme yang menurut Polanyi bertanggungjawab atas malapetaka berupa fasisme, merupakan kunci kebebasan individu serta efisiensi ekonomi. Bagi Hayek, perencanaan sosialis mengarah pada totaliterisme. Dia merekomendasikan pasar bebas dengan intervensi negara yang minimal saja. Tulisan ini tidak mengeksplorasi kompleksitas sejarah intelektual yang terjadi sebelum penerbitan kedua buku pada tahun 1944, melainkan melihat keterkaitan kedua filosofi ekonomi yang kontras tersebut dengan apa yang terjadi di kemudian hari, dan akibatnya bagi masyarakat dunia di saat ini, 75 tahun kemudian.

› **Kebangkitan dan kejatuhan liberalisme yang melekat**

Dekade-dekade pertama di masa pascaperang umumnya dianggap sebagai era di mana ekonomi “melekat kembali” (*re-embedded*) di dalam masyarakat (dengan menggunakan metafora terkenal di dalam buku *Transformasi Besar*). Ketegangan-ketegangan “gerakan ganda” (*double movement*) menurut Polanyi (di satu sisi, penetrasi prinsip pasar, dan di sisi lain, “perlindungan diri” oleh masyarakat) dimitigasi oleh prinsip-prinsip manajemen ekonomi Keynesian untuk menjaga ketersediaan lapangan kerja yang luas dan konsolidasi negara-negara kesejahteraan. Karl Polanyi yang sosialis tidak terkesan dengan kompromi-kompromi tersebut, bahkan tidak terkesan dengan kuatnya negara-negara kesejahteraan di Skandinavia. Meskipun demikian, ekonomi-ekonomi campuran pada periode ini dan sistem keuangan yang dinegosiasikan di Bretton-Woods telah memungkinkan demokrasi-demokrasi liberal untuk menjadi makmur di generasi ini.

Perkembangan-perkembangan ini terganggu oleh politik hidrkarbon dan keruntuhan Bretton-Woods pada 1970-an. Menjelang tahun 1980-an, Presiden Reagan dan Perdana Menteri Thatcher (yang mengutip Hayek sebagai gurunya) menyerang keseimbangan pragmatis liberalisme yang melekat, dan sebaliknya menyatakan keutamaan pasar bebas. Dogma-dogma neoliberal disebarluaskan secara global setelah keruntuhan blok Soviet. Dengan runtuhnya perencanaan pusat, privatisasi dan marketisasi radikal menghasilkan dislokasi yang ekstrim. Sebagian besar negara-negara pascasosialis di Eropa Timur akhirnya bergabung dengan Uni Eropa. Elit-elit baru dari Timur bergabung dengan para elit lama di Barat untuk melupakan bab yang mengatur masalah sosial di Perjanjian Maastricht. Penciptaan mata uang euro menjamin bahwa, di kala dominasi prinsip pasar mendorong mobilitas modal dan tenaga kerja yang semakin besar, cita-cita terdahulu mengenai “Eropa yang sosial” kini menjadi usang. Tanggapan dalam bentuk penghematan (*austerity*) terhadap krisis keuangan internasional yang dimulai pada 2007 sekali lagi menunjukkan kontradiksi-kontradiksi pada suatu kapitalisme yang tampaknya semakin dilanda ketidaklekat-an sosial (*disembedded*).

› **Pasar yang dilembagakan dan politik populis**

Baik dalam hal keputusan untuk menabung ataupun untuk mengkonsumsi, untuk bermigrasi demi mencari upah yang lebih tinggi ataupun untuk menerima kondisi ekonomi yang tersedia di tanah air (*Heimat*), kehidupan ekonomi selalu bermain da-

lam konteks yang terstruktur baik secara sosial budaya maupun kelembagaan. Metafora “ketidaklekat-an sosial” (*disembedding*) tidak dapat ditafsirkan terlalu harfiah: kita perlu menilik apa yang disebut Polanyi sebagai “proses yang dilembagakan.” Kajian yang lebih cermat mengungkapkan bahwa rezim pasar bebas sangat bergantung pada negara yang kuat untuk mempertahankan hak-hak milik dan menegakkan kepentingan kaum kapitalis pada umumnya. Seandainya Polanyi menulis hari ini, ia mungkin akan memperhatikan cara-cara di mana kekuasaan negara-negara yang terkuatpun telah diabaikan oleh perusahaan-perusahaan transnasional, yang secara cerdas menghindari pajak dan hanya bertanggung jawab pada para pemegang saham mereka sendiri. Dia akan terkejut dengan cara di mana rezim neo-patrimonial, terutama di Hungaria yang merupakan tanah kelahirannya, telah memanipulasi lembaga-lembaga (seperti mekanisme Uni Eropa), bukan untuk perencanaan pragmatis demi melayani kepentingan rakyat mereka melainkan untuk memperkuat hubungan ketergantungan klientelistik dalam suatu partai semi-monopolistik yang sedang berkuasa.

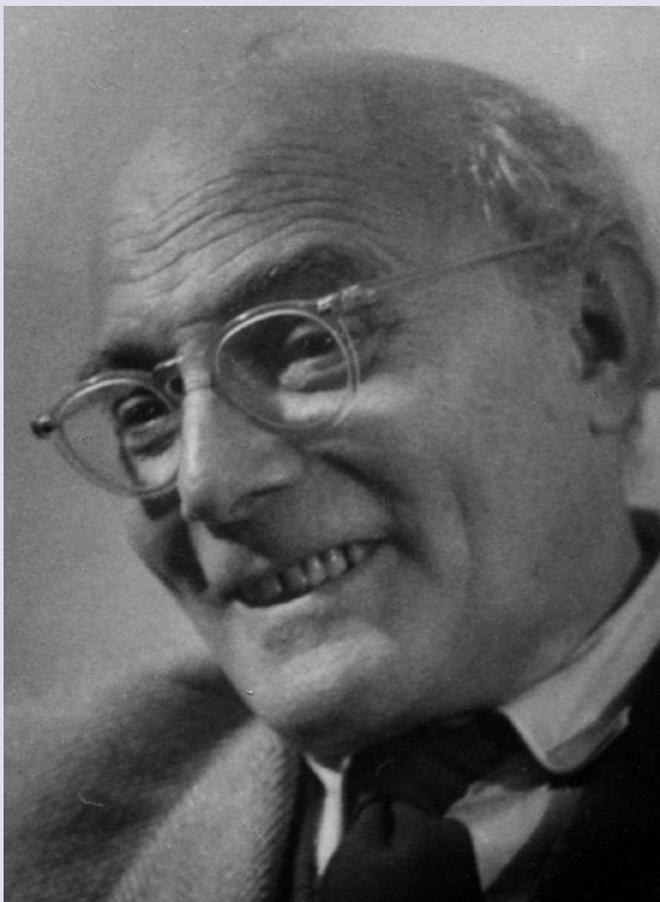
Kemunculan pelembagaan ekonomi yang baru disertai dengan peningkatan politik “populis” secara mengkhawatirkan di seluruh dunia. Pemimpin seperti Orbán di Hungaria atau Trump di AS mempertanyakan kesepadanan kapitalisme dengan demokrasi. Dengan adanya keadaan seperti ini, analisis Karl Polanyi tentang ketegangan-ketegangan dari gerakan ganda telah dapat diramalkan. Ketika sebuah masyarakat seperti Hungaria, yang telah melakukan eksperimen yang agak berhasil dalam “sosialisme yang melekat” (*embedded socialism*) sejak pertengahan 1960-an, tiba-tiba terkena pengaruh gerakan *laissez-faire* global, ia merespons dengan berusaha membela diri dengan menegaskan kembali nilai-nilai yang tampaknya terancam di pasar global baru. Dalam praktiknya, ini berarti memberikan kamufase terhadap divisi kelas baru dengan membangkitkan sentimen etnonasionalisme. Sementara kaum Roma dan Yahudi menjadi kambing hitam di dalam negeri, Brussels (kursi Uni Eropa neoliberal) telah menggantikan Moskow (yang merupakan kursi sistem lama perencanaan pusat) sebagai musuh eksternal utama. Rinciannya mungkin berbeda, namun nexus populisme dalam hal ini adalah salah satu yang kemungkinan akan ditemukannya Polanyi mengingat kesamaan dengan akar fasisme di Eropa.

Transformasi Besar merupakan analisis definitif mengenai arah yang dituju dogma-dogma anti-sosialis, *laissez-faire* yang terkandung dalam *The Road to Serfdom*. Kedua buku telah dicetak ulang berkali-kali dan diterjemahkan secara luas, tetapi karya Polanyi tidak pernah dipadatkan ke dalam format *Reader's Digest*. Penjualan Hayek juga selalu dan secara terus-menerus mengungguli penjualan Polanyi. Di atas segalanya, di negara-negara Anglo-Saxon, 30 tahun setelah berakhirnya Perang Dingin, kebutuhan untuk menjelekkkan sosialisme adalah kebiasaan yang sulit dilenyapkan. Karl Polanyi menawarkan suatu alternatif yang komprehensif terhadap gagasan simplistik yang berpendapat bahwa spontanitas pasar bebas adalah jaminan terbaik bagi kebebasan individu. Pertanyaan paling penting saat ini adalah apakah krisis ideologi Hayekian saat ini dapat diselesaikan melalui kebangkitan kembali liberalisme Keynesian, atau apakah ini benar-benar merupakan “endgame” (tahap akhir) untuk kapitalisme. Polanyi yang optimis akan berharap agar yang terjadi adalah yang terakhir. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Chris Hann <hann@eth.mpg.de>

› Warisan Tak Lekang Karl Polanyi

oleh **Andreas Novy**, Universitas Ekonomi Dan Bisnis Wina (WU), Austria



Karl Polanyi di tahun 1964. Kredit: Kari Polanyi Levitt.

properti, dan kontrak. Dalam sosiologi, Mark Granovetter mempopulerkan konsep kelekatan (*embeddedness*) yang dekat dengan Polanyi, namun menggunakannya untuk meneliti berfungsinya pasar dalam masyarakat pasar, sedangkan Polanyi mempermasalahkan kelangsungan hidup dari masyarakat pasar pada umumnya. Untuk Polanyi, kurangnya kohesi kemasyarakatan dalam masyarakat pasar disebabkan oleh kemandirian fungsional dan—lebih parah lagi—supremasi dari motif serta kepentingan ekonomi di atas kepedulian kemasyarakatan dan kepentingan politik.

› Analisis spasial implisit Polanyi

Karl Polanyi merupakan pendukung kuat dari gerakan koperasi dan pengagum Robert Owen, proponent awal mula dari gerakan tersebut. Gerakan anti-globalisasi, ekonomi sosial, dan ekonomi solidaritas, semua gerakan akar rumput kontemporer ini bertujuan memberdayakan warga, petani, dan buruh untuk membentuk kehidupan pribadi mereka serta masyarakat. Mereka telah bereksperimentasi dengan pengelolaan diri dan bentuk tata kelola partisipatoris serta telah sering dimotivasi oleh keyakinan yang mantap pada kemampuan khalayak dan komunitas untuk mengendalikan kehidupan mereka, untuk “melekatkan ekonomi dalam masyarakat,” pada nilai-nilai yang lebih kooperatif, dan kebutuhan serta hasrat yang kurang materialistis. Karenanya, mereka telah mempromosikan demokratisasi sosio-ekonomi dengan tujuan terkait untuk mendudukkan kembali ekonomi di tempatnya serta memperluas demokrasi di luar ranah politik. Pembiayaan, produksi, dan perawatan dianggap terlalu penting untuk dipisahkan dari pengambilan keputusan kolektif, akuntabilitas publik, serta pengelolaan bersama. Banyak di antara gerakan masyarakat sipil ini, yang paling mutakhir adalah gerakan transisi dan kepentingan bersama,

Setelah kematiannya pada tahun 1964, Karl Polanyi paling dikenal dalam disiplin antropologi, untuk perannya sebagai pembela gigih pemahaman yang lebih kontekstual tentang ekonomi sebagai “pengorganisasian kehidupan.” Terangkatnya kembali namanya sebagai ilmuwan sosial di berbagai disiplin secara luas terjadi sejak 1970-an. Dalam ilmu ekonomi, lewat karya Douglass North, yang memperoleh Hadiah Nobel lantaran menekankan pentingnya institusi dalam pembangunan ekonomi. Berbeda dengan Polanyi, ia berfokus pada pasar,

telah mempromosikan inovasi sosial dari bawah ke atas. Namun, acap kali mereka telah menjadi korban dari jebakan lokalis, tidak dapat memantik perubahan kelembagaan serta struktural yang melampaui proyek atau lingkungan permukiman mereka.

Hal ini mengarahkan kita kepada aspek dari pemikiran Karl Polanyi yang pokok tetapi terlupakan: analisis spasialnya yang implisit. Kritik Polanyi terhadap pasar yang mengatur dirinya sendiri yang acap disitir bukanlah penolakan terhadap setiap bentuk pasar. Ia merupakan kritik terhadap kemunculan “Satu Pasar Besar” (*One Big Market*), satu pasar yang serba terhubung di mana semuanya dapat dipertukarkan—bahkan barang-barang yang tidak diproduksi untuk dijual. Institusi kunci yang menyangga “Satu Pasar Besar” hingga 1930-an adalah standar emas. Ia menjadikan semua aktivitas sosio-ekonomi di seluruh belahan dunia terbandingkan, dan karenanya, dapat dipertukarkan. Utopia liberalisme ekonomi ini merupakan distopia dalam perspektif Polanyian. Bahkan, sebelum istilah “globalisasi” diciptakan pada akhir abad ke-20, Polanyi merupakan pengkritik gigih dari “kapitalisme universal” maupun persebaran tak terkendali dari teknologi di “era mesin.”

› **Neoliberalisme dan kebutuhan alternatif berskala majemuk**

Namun, setelah pecahnya gelembung *dotcom* pada 2000 serta krisis finansial 2008-9, barulah kritiknya terhadap konsekuensi sosial dan ekologis yang bersifat merusak dari “ekonomi pasar bebas” yang terencana dijadikan bahan refleksi kritis tentang bagaimana masyarakat kontemporer menanggapi komodifikasi kehidupan. Empat dekade dari neoliberalisme terencana dan ekonomisasi semua aspek kehidupan telah berujung pada meningkatnya penelitian inter- dan trans-disiplin. Dalam sosiologi, Michael Burawoy telah menerapkan konsepsualisasi Polanyi untuk memahami komodifikasi alam, pengetahuan, serta data yang terjadi saat ini. Dampak neoliberalisme bagi kehidupan sehari-hari, dari pembagian kerja berbasis gender hingga marketisasi dari pendidikan dan kesehatan, telah semakin diperdalam sebagai akibat dominasi dari pasar finansial.

Perlawanan terhadap neoliberalisme yang mendunia, di ranah akademis maupun politik, menjadikan Polanyi inspirasi kunci bagi mereka yang berminat memahami dan mengubah dunia yang dikuasai oleh logika pasar. Banyak cendekiawan terkemuka mengkritik globalisasi neoliberal, yang diistilahkan sebagai hiperglobalisasi oleh Dani Rordik dan “finansialisasi besar” oleh Kari Polanyi Levitt. Sebagaimana yang ditekankan oleh Wolfgang Streeck, tatanan ekonomi global kontemporer mengancam demokrasi, rezim kesejahteraan, dan kedaulatan nasional. Pilihan alternatifnya adalah bentuk integrasi ekonomi yang lebih moderat, peningkatan ruang bagi kebijakan nasional, serta perumusan ulang demokrasi.

Pikiran-pikiran ini telah dipertimbangkan oleh Konferensi Perdamaian dan Pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa

(UNCTAD) dalam himbauannya untuk adanya suatu Kesepakatan Global Baru (*New Global Deal*) yang menanggulangi keterbatasan, melekatkan kembali pasar finansial, dan membatasi kekuatan ekonomi, khususnya kekuatan kapital finansial serta platform digital. Hal ini boleh jadi merupakan kontribusi paling penting para ekonom heterodoks untuk sosiologi ekonomi yang, sejak karya tonggak Granovetter, cenderung mengabaikan dinamika ekonomi makro. Di sisi lain, perspektif sosiologi dapat memperkaya definisi ekonomi Polanyi sebagai “pengorganisasian penghidupan” lewat penelitian terhadap agensi, kekuasaan, konteks serta integrasi sistem. Hal ini memungkinkan pemahaman yang lebih berbasis tempat tentang ekonomi sebagai sesuatu yang melekat, terdiri atas institusi spesifik yang tidak menghasilkan kapitalisme yang seragam melainkan pusparagam.

Dalam pemahaman saya, alternatif dari hiperglobalisasi terletak pada penguatan demokrasi dalam tatanan ekonomi yang lebih terkontekstualisasi dan peka terhadap skala. Polanyi menekankan pentingnya perencanaan regional supra-nasional; pakar geografi mengingatkan kita bahwa penghidupan dalam aspek-aspek yang penting dibentuk oleh lingkungan permukiman, kota, serta wilayah. Dan ekonomi politik menekankan bahwa akuntabilitas demokratis maupun keamanan sosial utamanya masih diorganisasi di tataran nasional. Pemerintahan yang demokratis, berkelanjutan, dan solider membutuhkan perspektif yang bertataran majemuk (*multilevel*).

Akhirnya, dan pada tataran yang paling mendasar, warisan Polanyi terletak pada inspirasinya mengenai alternatif peradaban sebagai ganti masyarakat pasar saat ini yang menjadikan pasar, properti, serta kompetisi sebagai institusi kuncinya. Bagi Polanyi, dialektika perbaikan dan habitasi dari kemajuan ekonomi dan keamanan sosial budaya mengiringi masyarakat pasar kapitalis. Dalam jangka panjang, peradaban yang semata mengandalkan perkembangan ekonomi akan runtuh, sebagaimana peradaban liberal runtuh pada 1930-an. Ancaman bencana ekologis yang disebabkan oleh eksploitasi planet yang melampaui batas menjadikan refleksi ini urgen kembali. Batasan biofisik beralih menjadi batasan kemasyarakatan, memilah pemilik sumber daya yang kaya dengan mereka yang tak memiliki apa-apa, Utara Global dengan yang Selatan. Seiring dengan peningkatan eksklusi dan ketimpangan, otoriterisme maupun politik kebudayaan reaksioner dapat menyebar. Namun, melawan eksklusi dan ketimpangan dapat pula memperkuat gerakan perlawanan yang bertujuan memulihkan perasaan memiliki, keamanan, serta habitasi dan mempertahankan iklim yang wajar. Mengikuti Polanyi, kebebasan serta tanggung jawab individual memungkinkan sejumlah skenario masa depan, yang menghindari prediksi-prediksi deterministik. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Andreas Novy
<Andreas.Novy@wu.ac.at>

› Ann Baden Denis: Suatu Apresiasi

oleh **Linda Christiansen-Ruffman**, Universitas Saint Mary, **Angela Miles**, Universitas Toronto, dan **Marilyn Porter**, Universitas Memorial, Kanada



| Ann Barden Denis. Kredit: USC Kanada.

Pada 5 Februari 2019, Ann Barden Denis mendadak meninggal dunia karena serangan jantung. Ia baru berusia 73 tahun. Ann mendedikasikan sebagian besar hidupnya untuk sosiologi, keilmuan interdisipliner, kesetaraan dalam masyarakat, serta mengupayakan terciptanya hubungan sosial lintas keragaman atas dasar saling menghormati. Ia meninggalkan banyak rekan, mahasiswa, teman, dan mentor yang berkah, yang akan merindukan kehadiran sosoknya nan tenang dan penuh perhatian, serta keterampilan, pengetahuan dan keterandalan yang bersifat kolaboratif, dan eksekutif.

Baru-baru ini Ann mulai menggunakan nama tengahnya, Barden, untuk menghormati akar keluarga pihak ibunya yang kuat. Ia sangat menghargai kebijaksanaan dan nasihat praktis yang disampaikan nenek dan ibunya berdasarkan pengalaman mereka dalam keluarga besar Kanada Prancis yang patriarkal. Dari para wanita ini, Ann belajar pentingnya pendidikan dan pekerjaan untuk menegaskan kemerdekaannya sebagai wanita di dunia pria. Pemahamannya mengenai bagaimana isu-isu ini terkait dengan kekuatan individu dan sosial memberi Ann

kekuatan dan kepercayaan diri dalam peran perorangan serta kepemimpinan sosiologisnya. Hal tersebut turut membantunya untuk berkembang dan berubah sebagai seorang feminis sepanjang kariernya. Meskipun apresiasi ini berfokus pada kehadiran publik Ann dan kontribusinya pada keilmuan dan aktivisme, ia juga menjalani kehidupan yang terlibat dan peduli secara sosial serta tetap mandiri sebagai seorang wanita.

Kepergian Ann menyentuh banyak organisasi yang telah didukung dan dibentuk, atau direvitalisasi berkat pekerjaannya. Ia memberikan kontribusi administratif dan ilmiah yang luar biasa kepada Asosiasi Sosiologi dan Antropologi Kanada (CSAA), sekarang CSA, dan Kelompok Penelitian Sosiologi Feminis; kepada Asosiasi Sosiologi Internasional (ISA) dan dua komite penelitiannya, RC05 (saat itu, Hubungan Etnis, Ras dan Minoritas, sekarang Rasisme, Nasionalisme, Masyarakat Adat, dan Etnisitas) dan RC32 (dahulu Perempuan dalam Masyarakat, kini Perempuan, Gender, dan Masyarakat); dan kepada Lembaga Penelitian Kanada untuk Kemajuan Perempuan (CRIA-WICREF), terutama dalam beberapa tahun terakhir. Di setiap asosiasi dan komite ini, dan di Universitas Ottawa yang dwi-

bahasa, Ann bekerja tanpa henti dalam peran kepemimpinan utamanya (seringkali sebagai presiden) dan dalam posisi di belakang layar untuk memastikan efektivitas organisasi tersebut serta keberlanjutan relevansinya secara sosial, akademik, dan praktis. Ia juga bekerja untuk melindungi dan mengembangkan prinsip-prinsip dasar keadilan sosial, keterbukaan, akses, dan inklusivitas di dalam dan di antara mereka. Selain itu, ia menggunakan keterampilannya sebagai penulis dan editor untuk berkontribusi pada buku, jurnal, edisi khusus, lembar fakta, dan buletin. Ia senantiasa berkiprah sebagai penasihat berbagai dewan jurnal dan Bantuan Kanada untuk Publikasi Akademis. Keilmuan sosiologi dan penelitian feminis Kanada serta internasional telah mendapat banyak manfaat dari kepemimpinan feminis dan kecemerlangan administrasinya.

Ann juga lama menjabat sebagai anggota ACSALF, organisasi Kanada berbahasa Prancis (*francophone*) yang setara dengan CSAA, Asosiasi Studi Etnis Kanada (CESA-SCEE), dan, sejak konstitusi pertamanya, Perempuan, Kajian Gender, serta Penelitian Feminisme (WGSRF). Ia memiliki peran teramat penting dalam komunitas sosiologi berbahasa Prancis dan bahasa Inggris dan mempertahankan pengucapan bahasa Prancis dari nama keluarganya, "Denis." Ketegasannya untuk mempertahankan pelafalan bisu "s" dalam namanya memungkinkannya untuk mengibarkan isu-isu bahasa Prancis dan kesetaraan etnis sejak kariernya dimulai di Kanada, di antara para sosiolog berbahasa Inggris. Kemudian ia bergabung dengan kolega Quebec dan rekan kerja Kanada lainnya pada pertemuan berbahasa Prancis, memperjuangkan bahasa dan budaya Prancis secara internasional.

Pada 2011, Ann turut memprakarsai Sesi Interdisipliner Feminis di Kongres Kanada untuk Ilmu Humaniora dan Ilmu-ilmu Sosial (CHSS) dan dari 2013 menjadi ketua bersama Cluster Feminis CSA. Dalam mengorganisir dan sebagian besar mengelola kedua program yang saling terkait, ia secara pribadi menerjemahkan dokumen berbagai gugus penelitian sosial ke dalam bahasa Prancis untuk memfasilitasi partisipasi berbahasa Prancis dan sesi-sesi dwibahasa. Berkat hasil dari masa kerja yang penuh dedikasi dan advokasi seumur hidupnya, perhatian terhadap kedwibahasaan dalam CSA dan CHSS semakin meningkat.

Pendekatan administrasi feminisnya yang sangat sosiologis dan holistik berkontribusi pada kelangsungan eksistensi CRIAW-ICREF, yang didirikan pada tahun 1976 untuk memfasilitasi penelitian tentang feminisme lebih mudah diakses oleh wanita untuk kepentingan advokasi. Sejak 2009 hingga 2015, Ann menjadi anggota dewan dan menjabat sebagai presiden (wakil presiden, presiden dan mantan dan presiden). Pada masa-masa itulah CRIAW dan organisasi feminis lainnya terancam punah. Selama era penhematan yang ketat dan pemotongan anggaran pemerintah, Ann menyumbangkan apa yang diperlukan untuk menjamin keberlangsungan CRIAW, termasuk membentuk kembali komite sukarelawannya dengan kehadiran aktifnya. Wawasan global dan keterampilan administratifnya membuatnya memahami persyaratan bagi CRIAW untuk memperoleh kembali mandatnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebagai perwakilan CRIAW di PBB, ia mengambil peran penting dalam status organisasi nonpemerintah terkait pertemuan perempuan PBB sebagai penyelenggara, penyaji, dan pembimbing, termasuk berkomunikasi dengan warga Kanada menyangkut isu-isu PBB.

Salah satu contoh kepekaan Ann dan keterampilan multifa-

setnya terjadi di ISA pada tahun 1994. Setelah pra-konferensi RC32 di kota lain, kelompok kami tiba di meja daftar ulang ISA untuk memperoleh akomodasi penginapan kelompok di salah satu perumahan yang telah ditunjuk. Pihak pengurusan akomodasi ISA telah melakukan eksklusi terhadap salah seorang di antara kami, seorang cendekiawan senior Asia. Di tengah protes kami terhadap pemisahan anggota kelompok, Ann mempertimbangkan semua perspektif. Ia menenangkan situasi dan memimpin dalam menerapkan apa yang ternyata menjadi strategi *win-win-win* (menang-menang-menang). Pagi berikutnya, ia mengatur ulang rumah tempat kami tinggal untuk mengakomodasi anggota kami yang dipisahkan dan meyakinkan otoritas akomodasi ISA untuk menyetujuinya. Strateginya memungkinkan kami untuk mengunjungi kolega Asia kami di kompleks "perumahan khusus" yang berpagar dan dijaga, ditujukan khusus untuk peserta yang tidak berkulit putih. Kami sangat terganggu dengan tindakan rasisme tersebut, demikian pula anggota ISA dan pembuat keputusan lainnya. Tindakan Ann dalam insiden kritis ini menjadi sangat penting dalam membantu ISA menjadi lebih egaliter dan berwajah internasional.

Tentu saja, Ann juga seorang cendekiawan teladan dan meninggalkan warisan tulisan ilmiah yang mumpuni. Disertasi doktornya, *The Changing Role of Students in Relation to the Government of British Universities (1935-1968)* (Perubahan Peran Mahasiswa dalam Relasi Mereka dengan Pimpinan Universitas-universitas Inggris [1935-1968]), menunjukkan imajinasi sosiologisnya secara eksplisit berkaitan dengan realitas biografis dan dalam struktur kekuasaan historis. Karya-karya ilmiah berikutnya terutama membahas Kanada dan difokuskan pada pendidikan, pekerjaan wanita, tenaga kerja, Internet, dan pada topik-topik seputar wanita, kelas, dan etnisitas. Penelitiannya menjadi lebih komparatif setelah konferensi ISA 1986 di India dan sabatikal di negara-negara Kepulauan Karibia yang berbahasa Inggris, khususnya Barbados. Ia mengepalai tim penelitian internasional untuk meneliti *Ke(tidak)setaraan, Identitas, dan Penggunaan Internet oleh Kaum Minoritas di Dunia yang Mengglobal: Penggunaan Internet Kaum Muda di Barbados dan Ontario Frankofon*.

Sebagai Wakil Presiden ISA untuk Penelitian (2002-2006), Ann menyelenggarakan konferensi Komite Penelitiannya. Setelah terpilih kembali menjadi jajaran eksekutif ISA, ia bersama-sama mengedit *The ISA Handbook in Contemporary Sociology: Conflict, Competition, Cooperation and The Shape of Sociology for the 21st Century: Tradition and Renewal*. (Buku Pegangan ISA untuk Sosiologi Kontemporer: Konflik, Persaingan, Kerjasama dan Bentuk Sosiologi untuk Abad ke-21: Tradisi dan Pembaruan). Selain inisiatif-inisiatif ini, Ann menangani isu-isu jangka pendek dan lebih panjang dalam ISA maupun masalah-masalah yang menggantung seperti praktik-praktik tidak demokratis dan ketiadaan keragaman bahasa dan geografis di beberapa komite penelitian.

Kontribusi Ann yang mendasar dan beragam bagi praktik dan pengembangan sosiologi Kanada dan internasional pada umumnya, serta pada khususnya bagi studi feminis dan etnis yang beririsan, tak terhitung banyaknya.

Ia dirindukan, dikenang, dan diapresiasi. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada:
Linda Christiansen-Ruffman <ruffman@smu.ca>
Angela Miles <angela.miles@utoronto.ca>
Marilyn Porter <mporter2008@gmail.com>

› Migrasi Dalam Perjalanan

oleh **Karin Scherschel**, Rhein Main University of Applied Sciences, Jerman



Kredit: Nick Youngson (Creative Commons 3).

Dinamika migrasi dan perpindahan, sederhananya, adalah akibat dari distribusi hak-hak sosial, ekonomi, budaya dan politik yang tidak adil di seluruh dunia. Kita tidak akan berpikir atau berbicara tentang migrasi andaikata dunia modern yang mengglobal ini tidak terbagi-bagi dalam negara-bangsa. Tata politik dunia modern ditentukan oleh struktur-struktur nasional dan supranasional yang mendaku hak untuk menetapkan kewarganegaraan dan wilayah kekuasaan. Kebijakan-kebijakan yang makin mengekang tentang proses migrasi ini, terutama yang menyangkut arus pencari suaka, telah menjadi ciri khas dari migrasi saat ini, misalnya di sepanjang perbatasan Eropa atau di Amerika Serikat, dua contoh yang populer dan banyak dibicarakan orang.

Kewarganegaraan merupakan prestasi zaman modern, di satu sisi, tetapi di sisi lain ia juga sebuah mekanisme eksklusif dan pendorong ketimpangan sosial. Orang perlu melintasi perbatasan untuk belajar, bekerja, atau untuk mendapatkan kondisi yang lebih baik agar bisa mencari nafkah karena hidup dalam situasi yang tidak memadai. Meskipun demikian, migrasi adalah suatu fenomena kuno: orang sudah bermigrasi sejak awal sejarah umat manusia. Gerda Heck mengingatkan kita tentang sejarah migrasi yang lama terlupakan dalam refleksinya tentang “Imajinasi Eropa dan Realitas Mobilitas Afrika”. Benua Afrika telah menjadi “tempat aman” bagi ribuan pengungsi dan migran ekonomi dari Eropa yang mencari suaka dan/atau kehidupan yang lebih baik di abad ke sembilan belas dan dua puluh.

Kini, globalisasi merupakan suatu kekuatan pendorong mendasar bagi migrasi dan pelarian; kekuatan luar biasa ini telah mengurangi efek dari jarak spasial. Saat ini jumlah negara dan penduduk yang terlibat dalam proses migrasi jauh lebih banyak daripada zaman-zaman sebelumnya dalam sejarah.

Kebijakan tentang migrasi di masa lalu dan masa kini memainkan peran penting dalam alur migrasi. Hubungan antara peningkatan aliran transnasional modal, barang, informasi dan orang adalah sisi lain lagi. Proses migrasi internasional terjadi karena hubungan berbagai faktor, dan tidak mungkin mengenali satu pola utama pergerakannya. Proses bermigrasi mungkin disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, politik, budaya atau lingkungan. Misalnya, Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi memramalkan bahwa perubahan iklim akan memicu pergerakan pengungsi besar-besaran di tahun-tahun mendatang. Demikian pula, perampasan lahan sudah jadi alasan utama bagi perpindahan penduduk majemuk.

Migrasi tidak bisa dilihat sebagai peristiwa yang berdiri sendiri; sebaliknya, migrasi harus dipandang sebagai tumpang tindihnya berbagai faktor tadi. Migrasi internasional bukan suatu proses saat orang berpindah dari satu negara ke negara lain; proses migrasi harus dilihat sebagai suatu peristiwa yang terus terjadi, melewati batas-batas ruang dan waktu. Carlos Sandoval merefleksikan saat-saat sosial dari pergerakan migrasi semacam itu dalam tulisannya, "*Karavan Dari Amerika Tengah: Suatu Eksodus dari Abad ke Dua Puluh Satu*". Karavan ini dimotivasi oleh beberapa faktor: Tingkat kemiskinan, naiknya ongkos listrik, gas alam dan bahan bakar minyak memicu eksodus besar-besaran dari Honduras atau El Salvador. Orang bermigrasi secara berkelompok dan menyeberang perbatasan bersama-sama. Karavan itu tidak hanya melindungi orang dari kekerasan seperti penculikan atau pemerasan, tetapi juga sekaligus memperlihatkan saat-saat kolektif dalam migrasi.

Globalisasi telah memudahkan penyeberangan perbatasan dan memperkuat relasi-relasi ekonomi. Restrukturisasi kapitalisme secara global memunculkan banyak permintaan akan pekerja migran. Pekerja migran berperan penting dalam ekonomi negara tempat mereka bekerja. Seperti ditunjukkan oleh Bediz Yilmaz mengenai Turki, jenis pekerjaan ini biasanya informal. 3,6 juta orang Suriah yang lari dari perang sekarang tinggal di Turki. Eksploitasi pekerja asal Suriah merupakan fenomena yang umum dan dibiarkan oleh otoritas Turki. Kontribusi Yilmaz, "*Pengungsi sebagai Tenaga Kerja Tak Bebas: Catatan dari Turki*", membicarakan kondisi eksploitatif yang dialami pekerja tak bebas (*unfree labor*).

Kita mengamati perluasan dan kelanjutan migrasi internasional yang melewati batas-batas ruang dan waktu. Banyak migran sekarang hidup di dua masyarakat atau lebih: kampung halaman dan negara tujuan mereka. Para migran antarnegara menciptakan suatu ruang bersama atau ruang representasi simbolik dan kolektif yang melampaui negara-bangsa. Ke-

ragaman merupakan satu sisi pokok dari pergerakan migrasi modern. Ada begitu banyak tipe migran: pencari suaka, pengungsi, migran tanpa dokumen, dan pekerja migran (yang mencakup para elit intelektual atau bisnis maupun pekerja domestik).

Alur migrasi kontemporer secara global menjadi makin signifikan karena kemajuan pada fasilitas transportasi dan komunikasi. Kita bisa berkomunikasi lintas batas dan membuka ruang-ruang komunikasi antarnegara. Baru-baru ini saya berkunjung ke Vercana, suatu tempat yang indah di Italia. Di sana saya berbicara dengan seorang kawan yang tumbuh besar di Yaman dan sedang pulang kampung selama tiga minggu persis ketika terjadi serangan rudal ke Arden. Ia mengunjungi keluarganya dan menulis tentang kelaparan dan orang-orang yang terbunuh. Ia menceritakan suara rudal-rudal yang berjatuhan. Teknologi baru dalam komunikasi dan informasi memungkinkan orang-orang yang berjauhan mengalami sesuatu seolah-olah secara langsung dan bersamaan (*contemporaneity of the non-contemporaneous*). Kita bisa mengalami akibat-akibat sosial dari ketidakadilan, perang dan persekusi ketika itu semua sedang berlangsung. Media mendorong bukan hanya penyebaran ketidakadilan tetapi juga perbaikan kondisi hidup, rute-rute migrasi dan hak-hak demokratis.

Seperti pernah dikatakan oleh sosiolog Zygmunt Bauman: "kekayaannya global, penderitaannya lokal." Uang, kewarganegaraan, atau jender menentukan apakah orang punya hak dan kesempatan untuk bermigrasi.

Kita pasti mengamati dinamika yang mendua antara fasilitasi gerakan perpindahan dan penghentiannya secara ketat di seluruh dunia. Politik agresif Donald Trump untuk membangun tembok antara Amerika Serikat dan Meksiko dan penciptaan serta implementasi benteng Eropa adalah contoh-contoh yang paling populer. Kita melihat secara simultan bangkitnya gerakan-gerakan sayap kanan dan sebetulnya nasionalisme agresif yang baru, sekaligus juga tindakan-tindakan solidaritas. Penyebaran secara global gagasan-gagasan berbasis hak-hak asasi manusia menghasilkan gerakan orang untuk melawan kebijakan-kebijakan yang bersifat membatasi. Dalam kontribusinya yang berjudul "*Membongkar Perbatasan di Kota-Kota Solidaritas*", Sarah Schilliger menerangkan konsepnya mengenai Kota-kota Solidaritas. Ruang politik kota telah menjadi ruang demokratisasi kehidupan perkotaan. Konsep kewarganegaraan akan dipandang tidak sebagai status tetapi sebagai suatu proses yang mencakup negosiasi tentang keanggotaan (*belonging*) dan akses pada hak-hak.

Berpikir tentang migrasi berarti merefleksikan kontingensi perbatasan, kriteria keanggotaan (*belonging*), dan kepemilikan sekaligus pelaksanaan hak-hak di suatu dunia global modern yang timpang. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Karin Scherschel
<Karin.Scherschel@hs-rm.de>

› Imajinasi Eropa

dan Kenyataan Mobilitas Orang Afrika

oleh **Gerda Heck**, American University di Kairo, Mesir

Di pertemuan puncak pemimpin-pemimpin Afrika yang digelar oleh Kanselir Jerman, Angela Merkel, di Berlin Oktober 2018, ia memperkenalkan dana pembangunan baru 1 milyar Euro untuk mengatasi pengangguran di Afrika, suatu persoalan yang menurutnya memicu “migrasi massal” dari Afrika ke Eropa. Hal ini memperlihatkan dua mitos yang masih menguasai wacana Eropa tentang migrasi Afrika: Bahwa kebanyakan orang Afrika yang bermigrasi ke luar negeri melarat, tak terdidik, atau semi-terampil, dan bahwa Afrika merupakan benua eksodus massal. Eropa nampaknya mengidap kealpaan historis terkait emigrasinya sendiri ke benua Afrika maupun warisan kolonialnya. Namun peninggalan kolonial serta hubungan rumit dengan negara-negara Afrika memiliki dampak yang besar terhadap kebijakan migrasi Eropa-Afrika serta wacana yang mengelilinginya.

Sebuah telusur sejarah terhadap migrasi Euro-Afrika mengungkap sejarah yang terlupakan. Dalam beberapa periode dari dua abad terakhir, benua Afrika menjadi “pelarian yang aman” untuk ribuan pengungsi serta migran ekonomi dari Eropa yang mencari perlindungan dan/atau kehidupan yang lebih baik di benua ini. Pada paruh kedua abad ke-19, orang-orang Yahudi Rusia lari dari pembersihan etnis anti Yahudi ke Mesir, sementara itu pekerja harian Yunani serta Itali mencari pekerjaan dalam proyek pembangunan Terusan Suez. Semasa Perang Dunia ke-2, lebih dari 40.000 pengungsi dari Polandia, Yunani, serta Yugoslavia mencari perlindungan di kamp-kamp pengungsian di Mesir, Palestina, dan Suriah. Yang lainnya mengungsi ke Tanzania, Kenya, dan Uganda.

› Pengawasan migrasi Eropa

Pengawasan pergerakan dari orang-orang secara global menjadi isu politik yang paling marak pada awal abad ke-

21. Merespons kedatangan nyaris 800.000 pengungsi di musim panas serta gugur 2015, pada November 2015 Uni Eropa memprakarsai “Dana Perwalian Darurat UE untuk Afrika” (EUTF for Africa) dan mengalokasikan 3,4 milyar Euro untuk melawan “akar masalah dari migrasi tak teratur” (Komisi Eropa 2017). Pemimpin-pemimpin UE mulai giat bermitra dengan negara-negara dari berbagai belahan Afrika, mencurahkan dana bantuan pembangunan untuk mengikat ikhtiar menerima kembali pengungsi dari Eropa dan menawarkan bantuan segar sebagai ganti janji untuk membatasi pergerakan migrasi.

Hal ini sama sekali tidak baru. Sejak akhir 1980-an, UE telah mengembangkan sejumlah perangkat serta aktivitas untuk memperketat kebijakan imigrasi dan visanya. Sejalan dengannya, daftar negara yang warganya membutuhkan visa untuk memasuki wilayah Schengen disetujui berdasarkan kriteria kemungkinan risiko imigrasi tak teratur dari negara-negara bersangkutan. Pada saat ini, penolakan visa tertinggi secara global terjadi di sejumlah negara Afrika. Pada 2014-2017, 45 persen dari permohonan visa di kedutaan besar Jerman di Yaoundé, Kamerun ditolak.

Lebih jauh, pengawasan perbatasan dan pergerakan migran telah menjadi masalah dalam negosiasi antara UE dengan negara-negara tetangga di Afrika sejak awal 2000-an. Sejak 2004, terdapat sejumlah kesepakatan di antara Libya dan Italia untuk membendung migrasi dari Libya, yang berujung, misalnya, pada deportasi orang-orang yang tiba di Pulau Lampedusa di Italia kembali ke Libya, di mana mereka ditahan di kamp ekstrateritorial. Pada 2008, Perdana Menteri Italia, Silvio Berlusconi, menetapkan “perjanjian persahabatan, kemitraan, dan kerja sama” dengan Muammar Gaddafi. Selama bertahun-tahun, Libya menuntut uang milyaran untuk kompensasi kejahatan kolonial Italia. Italia kini menjanjikan pembangunan dan

“Eropa nampaknya mengidap kealpaan historis terkait emigrasinya sendiri ke benua Afrika maupun warisan kolonialnya”

pembiayaan jalan raya pesisir Libya, membayar 250 juta Dolar setiap tahunnya selama dua puluh tahun. Pada 2011, seiring revolusi dan dukungan NATO untuk gerakan pemberontak Libya, Gaddafi membatalkan kerja sama dengan Italia, dan sebagai gantinya, menggunakan migrasi sebagai senjata terhadap UE, dengan satuan kepolisian yang masih setia kepadanya memberangkatkan paksa migran yang tidak pernah ingin pergi ke Eropa dengan kapal.

Selepas *Arab spring* pada April 2012, Italia dan Libya bersepakat untuk memulai kembali kolaborasi mereka dalam pengawasan migrasi. Pada 2 Februari 2017, Italia sekali lagi setuju untuk bekerjasama dengan militer Libya dan kesatuan pengawas perbatasan “untuk mencegah masuknya migran ilegal,” dengan jalan mencegah migran—dan juga pengungsi—untuk mencapai Eropa. Sejak saat itu, pemerintah Italia dan UE menyediakan bagi Penjaga Pantai Libya kapal, pelatihan, serta bantuan-bantuan lainnya untuk berpatroli di laut serta menarik kembali pengungsi dan migran yang mencoba berlayar ke Eropa, dan nyaris 38.000 orang telah dicegat oleh Penjaga Pantai Libya dan dibawa kembali ke sentra penahanan di Libya.

Sejak tahun 2015, sejumlah kesepakatan di antara negara-negara Eropa dan negara-negara Afrika terkait “manajemen migrasi, perjanjian pendaftaran kembali, serta pengawasan perbatasan, yang erat hubungannya dengan dana bantuan pembangunan serta janji untuk alokasi visa yang lebih besar” secara berangsur-angsur melingkupi Afrika Utara, Barat dan Timur. Dengan EUTF for Africa, pergeseran fokus terhadap aktivitas-aktivitas di benua Afrika diiringi dengan wacana baru yang menekankan bahwa “kutukan” (*evil*) pergerakan lintas perbatasan tak teratur dapat diatasi sampai ke akar-akarnya. Enam puluh tiga persen dana EUTF dialokasikan untuk proyek pembangunan, 22% ke proyek yang dititikberatkan pada manajemen migrasi, dan 14% untuk usaha langkah-langkah keamanan serta pembinaan perdamaian. Dengan demikian, kebanyakan dana EUTF tercurah untuk organisasi nasional di Eropa. Untuk Jerman, salah satu mitra yang mengimplementasikan EUTF adalah GIZ, yang, misalnya, bertanggung jawab di Afrika Timur untuk program “Manajemen Migrasi yang Lebih Baik.” Organisasi ini sangat dikritik pelbagai organisasi hak asasi manusia karena kolaborasinya dengan mantan panglima perang di Sudan.

› Kenyataan Afrika

Dampak dari EUTF untuk benua Afrika masih harus diteliti. Namun, cara-cara UE mencoba menekan pemerintah Afrika untuk menjaga perbatasannya dan menerima kembali pengungsinya yang dideportasi dapat dilihat sebagai babak lanjutan dari sejarah panjang pertautan dan ketimpangan

lintasan di antara kedua benua, yang dihasilkan oleh ketimpangan kekuasaan, dominasi kolonial, eksploitasi, serta rasisme. Pada saat yang sama, pemerintah Afrika bukanlah korban pasif semata dari upaya pengaruh Eropa, karena regulasi-regulasi ini dinegosiasikan secara fleksibel. Lebih jauh, kita tahu dari penelitian bertahun-tahun bahwa pergerakan migrasi tidak dapat dihentikan dengan mudah melalui pengawasan perbatasan.

Faktanya, Asmita Parshotam (2018) menunjukkan bahwa Afrika merupakan benua yang paling rendah migrasinya di dunia, dan kebanyakan migran internasional dari Afrika tetap berada di benuanya. Pada 2017, 19,4 juta migran internasional Afrika ditambah lima juta migran internasional dari luar Afrika berada di benua ini. Menurut UNHCR, negara-negara seperti Kamerun, Chad, Republik Demokrasi Kongo, Etiopia, Kenya, Sudan serta Uganda menjadi tempat tinggal sepertiga pengungsi global (4,9 juta pengungsi). Kendati jumlah migran Afrika yang tinggal di luar benuanya bertambah dari 6,9 juta pada 1990 menjadi 16,9 juta pada 2017, statistik semacam nyaris tidak berhubungan dengan citra yang ditayangkan media Eropa terkait migran yang tiba di pesisir Eropa.

Lebih jauh, tidak semua migran ini tinggal di Eropa. Contohnya, lebih dari 80% buruh migran Mesir bekerja di negara-negara teluk seperti Arab Saudi, Yordania, dan Kuwait. Dan lebih banyak ikatan migrasi muncul baru-baru ini di antara Afrika, Amerika Latin, Asia, serta negara-negara teluk. Sepanjang tiga dasawarsa terakhir, komunitas migran Afrika juga telah muncul di Guangzhou, Hongkong, Dubai, dan Istanbul. Jejaring migran ini terkait kuat dengan mobilitas tinggi para pedagang Afrika yang bergerak ulang-alik di antara benua-benua. Meskipun Eropa tetap relevan, tempatnya bukanlah tempat sentral yang didudukinya dalam wacana-wacana populer serta akademik yang membingkai mobilitas Afrika. Memang, Eropa sudah berinvestasi besar terhadap produksi pengetahuan untuk mengatur pergerakan migrasi Afrika, bukan hanya di perbatasan Eropa, namun juga di benua Afrika sendiri. Menanggapi ini, filsuf Achille Mbembe belakangan mengampanyekan benua Afrika tanpa batas. Sebagai respons terhadap pengawasan migrasi yang serba melingkupi oleh Eropa di Afrika, ia menekankan, fase berikutnya dari dekolonisasi Afrika mesti melingkupi pemberian kebebasan mobilitas pada seluruharganya serta mengubah persyaratan keanggotaan dalam suatu komunitas politik serta kebudayaan bersama yang tidak terbatas pada negara-bangsa. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Gerda Heck
<gerda.heck@aucegypt.edu>

› Karavan Amerika Tengah: Eksodus Abad-21*

oleh **Carlos Sandoval**, Universitas Costa Rica, Kosta Rika



Para migran melintas jembatan di perbatasan Guatemala-Meksiko pada tahun 2018. Foto: boitchy/flickr. Beberapa hak dilindungi.

Sejak bulan Oktober 2018, perhatian besar dunia internasional diarahkan pada pelarian kolektif orang-orang Amerika Tengah dari negara-negara mereka, terutama dari Honduras dan El Salvador. Apa yang disebut sebagai “karavan” (*caravan*) migran semula bergerak melalui Guatemala, dan kemudian Meksiko, dan banyak yang pada bulan Juni 2019 dengan penuh harapan menunggu di Tijuana, di perbatasan AS/Meksiko.

› Karavan atau eksodus?

Unsur pertama yang perlu didiskusikan dalam situasi ini adalah pengertian “karavan.” Setidaknya dalam penggunaan bahasa Spanyol sehari-hari, dan mungkin dalam bahasa-bahasa lain, kata “karavan” tidak selalu harus diasosiasikan dengan keberangkatan terpaksa yang berbahaya atau berisiko. “Eksodus” adalah suatu konsep dengan sejarah panjang, yang terutama diasosiasikan dengan teks-teks alkitab, yang dapat diberlakukan dalam kasus Amerika Tengah karena penekanannya pada sifat keterpaksaan dari migrasi tersebut. Di Amerika Tengah masa kini, migrasi bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Butir kedua yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana kita sesungguhnya dihadapkan pada meningkatnya migrasi dari Honduras. Data sensus di AS bisa digunakan sebagai perspektif dalam melihat fenomena ini. Jika kita membandingkan orang-orang Amerika Tengah yang

dihitung dalam Sensus tahun 2000 dan 2010, bisa dilihat bahwa dalam 10 tahun terjadi peningkatan 136%. Populasi migran Honduras meningkat 191%, dari Guatemala 180%, dan dari Salvador 151%. Hal yang baru bukanlah jumlah orang yang terpaksa bermigrasi, melainkan keputusan untuk bersama-sama meninggalkan negara mereka.

› Penjelasan migrasi kolektif dari orang Honduras

Kebaruannya bukan pada jumlah angka orang-orang yang bermigrasi, melainkan bahwa migrasi ini bersifat kolektif. Gerakan-gerakan kolektif dapat didorong oleh faktor-faktor temporer maupun struktural. Peningkatan harga listrik, gas alam, dan bahan bakar, juga berbagai macam produk makanan adalah beberapa hal yang memicu terjadinya migrasi.

Berangkat dalam suatu kelompok setidaknya akan mengurangi bahaya penculikan dan pemerasan. Orang-orang yang berasal dari negara-negara di Amerika Tengah, kecuali Kosta Rika, membutuhkan visa untuk bisa masuk ke Meksiko. Hal ini memaksa para migran untuk masuk dan lewat melalui perbatasan tidak resmi, sehingga menjadikan mereka rentan menjadi korban kejahatan terorganisir maupun otoritas polisi Meksiko itu sendiri. Dalam konteks meningkatnya media sosial, banyak orang bisa menjalin hubungan satu sama lain, dan apabila mereka memu-

lai perjalanan mereka dengan menggunakan bis malam, akan lebih masuk akal apabila mereka melakukannya bersama-sama.

Ketiadaan pekerjaan yang bermartabat adalah faktor pendorong yang menentukan dan bisa dikatakan lebih bersifat struktural. Angka kemiskinan mencapai 64.3% dari keseluruhan penduduk, dan ini menciptakan kondisi kekerasan struktural yang sangat sulit untuk diselesaikan, terutama bagi kaum muda yang merupakan mayoritas yang diam (*silent majority*) di antara mereka yang setiap malam meninggalkan negaranya.

Dalam konteks politik, tidak ada keraguan bahwa kudeta di Honduras menyebabkan tatanan sosial menjadi semakin rapuh. Bulan Juni 2019 adalah peringatan 10 tahun kudeta, dan pada bulan November 2017, Juan Orlando Hernández terpilih kembali setelah melalui pemilihan yang penuh dengan protes, keraguan, dan klaim kecurangan pemilihan umum. Hernández berhasil melakukan perubahan pada konstitusi sehingga bisa terpilih kembali; secara ironis, oposisi terhadap terpilihnya kembali Hernández adalah salah satu faktor pendorong kudeta tahun 2009.

Kombinasi ketiga adalah faktor sosial. Di Honduras terjadi kekerasan kriminal yang luar biasa. Pada tahun 2016, San Pedro Sula adalah kota dengan kekerasan tertinggi sedunia setelah Caracas, dengan angka pembunuhan sebesar 111 dari 100.000 penduduk.

› Rute dan penerimaan

Mayoritas dari mereka yang bergabung dalam rombongan ke Utara menempuh rute-rute yang terpanjang menuju perbatasan AS-Meksiko. Keputusan ini menjadikan perjalanan mereka lebih melelahkan lagi dan mungkin dimotivasi keinginan untuk menghindari rute di sepanjang Teluk Meksiko, di mana jelas hadir kejahatan terorganisir, dan dengan demikian pemerasan dan kematian. Terdapat jarak 2.700 kilometer di antara San Pedro Sula, Honduras, dan Tamaulipas, Meksiko (di pantai teluk). Tetapi sebagian besar migran memilih perjalanan melalui Tijuana, di sisi Pasifik Meksiko—yang jaraknya sekitar 4.348 kilometer.

Saat ini, otoritas imigrasi mensyaratkan agar orang-orang yang tiba di perbatasan sebagai bagian “karavan” mendaftarkan nama mereka dalam daftar yang dikontrol oleh otoritas Meksiko. Daftar ini memungkinkan para migran untuk bisa mendaftar sebagai pencari suaka di AS.

Pemerintah AS hanya menyetujui hampir 10% dari permohonan suaka yang mereka terima, dan Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) tampaknya tidak banyak menunjukkan peran kepemimpinan dalam situasi ini. AS menyediakan 40% dari anggaran UNHCR dan menjadi pendukung terbesar dari keuangannya.

› Untuk melanjutkan

Sebagai penutup, harus disebut tiga pertimbangan khusus yang penting. Yang pertama adalah bahwa pada tanggal 6 November 2018 diselenggarakan pemilihan paruh waktu di AS, dan di empat negara bagian yang berbatasan dengan Meksiko, delapan dari sembilan distrik kongres memilih wakil dari Partai Demokrat. Dorongannya untuk membenci para imigran tidak menghasilkan perolehan suara yang besar bagi Donald Trump, dan hal ini memberikan harapan mengenai kemungkinan bahwa kebencian anti imigran bisa dikalahkan secara politik.

Yang kedua, pada tanggal 1 Desember 2018 Andrés Manuel López Obrador dilantik sebagai Presiden Meksiko. Dia pasti akan dihadapkan pada beragam tantangan—kesemuanya sulit dan kompleks—termasuk pertanyaan tentang migrasi Amerika Tengah. Di dalam pertemuan puncak tentang migrasi yang baru-baru ini diselenggarakan di Marrakesh, Maroko, Pemerintah Meksiko mengusulkan untuk menawarkan peluang kerja bagi sekitar 200.000 orang dari Amerika Tengah yang tiap tahun melewati Meksiko. Namun pada bulan Juni 2019 López Obrador setuju untuk memperkuat kontrol terhadap imigrasi sebagai upaya agar Trump tidak melanjutkan rencananya untuk mengenakan pajak pada ekspor Meksiko ke AS.

Akhirnya, dan yang tidak kalah penting, di luar terpilihnya kembali Trump dan permulaan masa jabatan presiden dan legislatif di Meksiko, tantangan besar adalah untuk menjamin hak-hak warga Amerika Tengah untuk tidak bermigrasi. Tujuan jangka menengah dan jangka panjang adalah untuk bisa lepas dari ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang tinggi yang dialami di kawasan tersebut. Ini adalah suatu hambatan besar untuk diatasi, meskipun, sayangnya, kelas yang berkuasa tampaknya saat ini tidak berniat untuk mengatasinya. Bagaimana caranya memperbaiki suatu situasi yang sarat dengan ketidakadilan dan ketidaksetaraan pasti akan menjadi suatu ujian bagi pemikiran dan gerakan progresif di Amerika Tengah.

Dua orang perempuan Honduras yang diwawancarai oleh BBC saat sedang berjalan menuju Meksiko pada bulan Oktober 2018 menggambarkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan ini dengan sangat baik. Salah seorang dari mereka berkata, “bukan urusan saya jika Presiden Amerika Serikat tidak menolong Honduras, karena saya pun tidak ditolong olehnya.” Perempuan yang lain, pada gilirannya, menyimpulkan, “Kami tidak takut pada ancaman Trump; kami melarikan diri dari negara kami karena kami demikian takut pada negara kami sendiri.” ■

* Artikel yang telah diedit ini semula diterbitkan dalam bahasa Spanyol di laman www.madrimasd.org.

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Carlos Sandoval <carlos.sandoval@ucr.ac.cr>

› Pengungsi sebagai Angkatan Kerja Tidak-bebas: Catatan dari Turki

oleh **Bediz Yılmaz**, Universitas IMIS Osnabrück, Jerman dan Maya Association-Mersin, Turki



Anak-anak bermain di sekitar tonggak-tonggak rumah hijau, kawasan perdesaan, Adanalıoğlu, di pinggiran Mersin, sebelah selatan Turki, 2015. Foto: A. Öner Kurt.

Dengan 3,6 juta warga Suriah dan 600.000 lainnya yang berasal dari kebangsaan lain, Turki sejauh ini merupakan negara dengan populasi pengungsi terbesar di dunia. Ini telah menjadi suatu fakta bagi pihak berwenang Turki untuk sesumbar dan dipuji oleh negara-negara lain, sebagai sebuah model.

Dalam makalah singkat ini, saya membahas beberapa corak dari model Turki dengan contoh kota menengah di mana saya telah terlibat dalam penelitian dan aktivisme tentang isu-isu terkait migrasi. Tetapi izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu penggunaan istilah pengungsi. Warga Suriah di Turki berada dalam “Perlindungan Sementara” karena batasan geografis yang diterapkan oleh Turki pada Konvensi Jenewa 1951. Status ini memberi mereka sejumlah hak, seperti akses tanpa syarat ke layanan kesehatan dan pendidikan publik, tetapi status itu gagal memberikan prediktabilitas dan kepastian tentang status pengungsi. Dengan demikian, hal tersebut menempatkan para penerima-manfaat dalam posisi yang rawan dan tidak aman terutama karena kesewenang-wenangan dari Rezim Perlindungan Sementara yang sangat tergantung pada politik. Dengan menyebut mereka pengungsi, saya ingin menaruh perhatian pada karakteristik-karakteristik

Rezim Perlindungan Sementara ini dan menggarisbawahi fakta bahwa meskipun mereka dalam kondisi mengungsi, mereka tidak memiliki status.

› Karakteristik Rezim Perlindungan Sementara

Kekurangan ini sangat penting dalam menentukan nasib warga Suriah di Turki dan menjelaskan perbedaan di antara berbagai negara yang mempunyai populasi pengungsi & pengungsi yang besar. Dalam artikel ini, saya akan fokus pada aspek perburuhan para pengungsi, khususnya mereka yang bekerja di pertanian. Tidak salah untuk menyatakan bahwa Turki saat ini bergantung pada tenaga kerja pengungsi: sementara kira-kira setengah dari 3,6 juta warga Suriah di Turki memiliki usia kerja, hanya 31.000 orang di antara mereka yang telah memperoleh izin kerja karena sulitnya mendapatkan izin. Akibatnya, kondisi kerja para pengungsi ditentukan oleh informalitas. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa informalitas, yang sudah sangat tersebar luas di Turki (sekitar 50% secara keseluruhan, dan lebih dari 85% di bidang pertanian), adalah situasi yang membuat model Turki bekerja. Dengan kata lain, tanpa tingkat informalitas yang tinggi dalam perburuhan, tanpa diakui oleh semua orang, ditoleransi oleh pihak berwe-

nang, dimanfaatkan oleh para pengusaha, sejumlah besar warga Suriah tidak akan mampu hidup di negara ini. Eksploitasi orang Suriah dalam perburuhan dan diskriminasi terhadap mereka dalam bahasa sehari-hari telah menjadi hal biasa bagi hampir semua anggota masyarakat terlepas dari afiliasi politik mereka.

Pertanian memiliki kekhasan dalam lanskap ini. Izin kerja, yang hampir tidak diperoleh untuk sektor-sektor lain dan mewajibkan para *pengungsi* untuk bekerja dengan tingkat eksploitasi yang ekstrem, sekalipun tidak diminta di bidang pertanian, membuka pintu untuk eksploitasi lebih lanjut. Menurut Pasal 5 (4) dari Peraturan tentang Izin Kerja untuk Orang Asing yang berada dalam Perlindungan Sementara (2016/8375), orang-orang asing dalam perlindungan sementara dan yang bekerja di pertanian dan peternakan dibebaskan dari kebutuhan untuk mendapatkan izin kerja. Berdasarkan pengamatan saya sebagai aktivis-peneliti di Adanalıođlu, zona pertanian di pinggiran Mersin, sebuah kota Mediterania Timur di Turki, saya berpendapat bahwa para *pengungsi* di sektor pertanian mewakili suatu bentuk tenaga kerja tidak-bebas (*unfree labor*). Saya akan mengikuti skema yang disediakan oleh Nicola Phillips dalam artikelnya 2013 tentang buruh tidak-bebas untuk mendefinisikan tenaga kerja tidak-bebas masa kini.

› **Pengungsi sebagai tenaga kerja tidak bebas**

Dimensi pertama dalam skema ini terdiri dari kontrak informal, verbal, dan berjangka pendek yang didasarkan pada “ikatan hutang” [...] yang digunakan untuk mendisiplinkan pekerja dan mengikatnya ke dalam hubungan itu, dan sering dimanipulasi untuk memaksimalkan eksploitasi pekerja. pekerja.” Di zona pertanian tempat kami melakukan pengamatan, perantaratena kerja (*labor intermediaries*) muncul sebagai tokoh penting dalam hubungan produksi di pertanian. Kuasa peran mereka yang sangat besar terbangun atas warga Suriah yang juga tidak menguasai bahasa lokal. Para perantara mendapatkan bagian dari setiap pembayaran upah harian, biasanya 10%. Mereka bertindak sebagai negosiator dalam mencari pekerjaan, akomodasi, dan pembayaran upah untuk para pekerja, dan memastikan penyelesaian tugas dan penanganan masalah terkait pekerja apa pun bagi pengusaha. Ini membawa ketergantungan mutlak bagi para pekerja *pengungsi* terhadap para perantara pertanian.

Kedua, ketidakbebasan “dibentuk terutama bukan oleh pemaksaan untuk masuk ke dalam pekerjaan tetapi oleh terhalangnya mereka keluar dari pekerjaan; kondisi-kondisi ini seringkali ditentukan oleh lunasnya hutang dan/atau penahanan upah sampai kontrak berakhir.” Dalam kasus

yang kami teliti, pembayaran-pembayaran dilakukan pada akhir musim panen untuk setiap produk, yang mungkin berlangsung selama enam hingga tujuh bulan. Selama musim, pekerja diberikan uang saku, atau berhutang dan terikat ke pasar lokal, yang biasanya dimiliki oleh perantara sendiri.

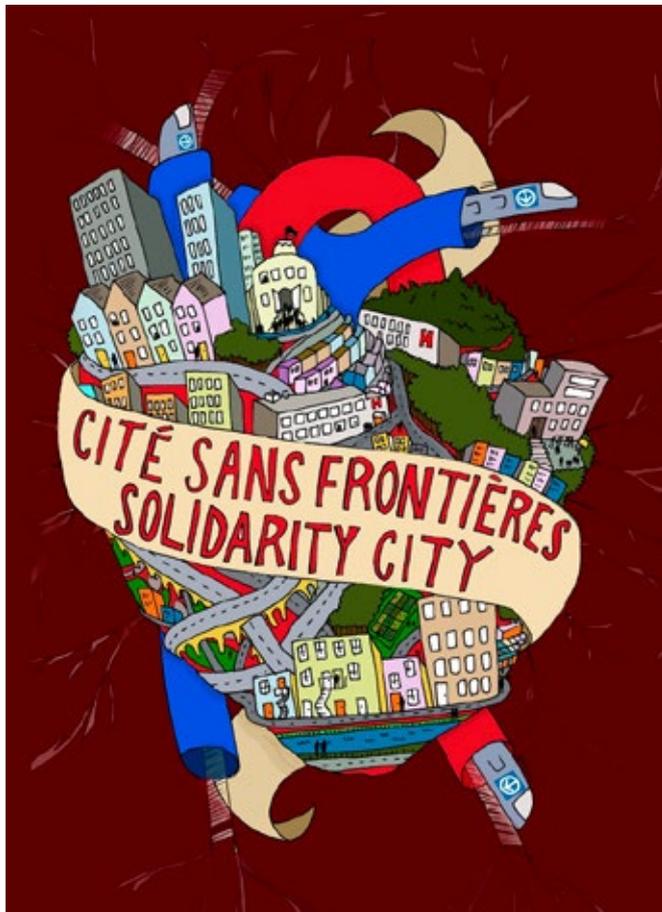
Ketiga, bentuk-bentuk kontemporer dari pekerjaan yang tidak-bebas umumnya bukan terdiri dari pekerja yang tanpa upah dan yang melibatkan jual-beli tenaga kerja; tetapi, pekerjaan di mana “ketidaksetaraan upah dengan nilai tambah yang diberikan oleh tenaga kerja yang bekerja dalam kondisi tersebut sangatlah tidak masuk akal.” Pengamatan kami menunjukkan bahwa para pekerja dibayar lebih rendah dari upah yang ditetapkan, dan kadang-kadang tidak dibayar. Tetapi mereka tidak dapat keluar dari pekerjaan karena mereka biasanya memiliki “uang di dalam,” yang mereka harapkan bisa peroleh setidaknya sebagian. Akhirnya, ketidakbebasan-ketidakbebasan dibentuk dalam kondisi-kondisi yang eksploitatif yang “diasosiasikan dengan kondisi kerja yang keras, merendahkan dan berbahaya, serta pelanggaran hak-hak perburuhan dari para pekerja (juga seringkali hak asasi manusia) dan bentuk-bentuk koersi serta manipulasi yang dirancang untuk membuat para pekerja bekerja lebih keras demi upah yang lebih kecil dan lama diperoleh. ”Memang, para pekerja *pengungsi* tinggal di tenda-tenda yang dibangun di atas ladang yang disewakan oleh para perantara untuk tujuan ini (di mana para pekerja juga membayar sewa untuk membuka tenda); infrastruktur dasar kurang tersedia, dan mereka [harus] membayar air saat menggunakan listrik “secara ilegal” dengan mencantol kabel-kabel ke kawat kabel di atas lapangan. Perantara pertanian lah yang memutuskan tempat kerja [bagi para *pengungsi*] sesuai dengan musim untuk tanaman tertentu; pekerja [*pengungsi*] hanya tahu beberapa hari sebelumnya bahwa mereka harus pindah ke tempat baru.

Ya, Turki memiliki populasi *pengungsi* terbesar tetapi tidak menawarkan mereka sebuah kehidupan yang bermartabat, sebuah jalan integrasi, sebuah masa depan yang menjanjikan; sebaliknya, memberikan langkah-langkah harian yang tidak terstruktur dan dipandu oleh kebutuhan-kebutuhan politik dalam dan luar negeri membentuk model tersebut. Sangatlah tidak mungkin model ini akan menawarkan kepada rakyat Turki suatu model kehidupan bersama yang transparan dan terstruktur. Apakah pemerintah Turki dapat diandalkan, akuntabel, bertanggung jawab? Bisakah ini benar-benar menjadi sebuah model? ■

Semua korespondensi ditujukan kepada Bediz Yılmaz <bedizyilmaz@yahoo.com>

› Membongkar Perbatasan di Kota-Kota Solidaritas

oleh **Sarah Schilliger**, Universitas Basel, Swiss



Kota-kota di seluruh dunia telah menjadi ruang perjuangan dan eksperimentasi seputar masa depan sistem migrasi, tetapi juga ruang bagi demokratisasi kehidupan perkotaan menuju hak atas kota bagi semua.

Di kala para pemimpin negara-negara anggota UE mendorong kebijakan pembatasan migrasi, menerima kematian ribuan orang di Laut Mediterania, dan mengkriminalisasi mereka yang menyelamatkan para pengungsi yang menderita, pemerintah-pemerintah berbagai kota di Eropa mendeklarasikan kota mereka sebagai “Kota-kota Solidaritas.” Dengan demikian, kota-kota tidak hanya menjadi ruang perjuangan dan eksperimen di tengah masa depan rezim migrasi, tetapi juga turut meletakkan fundamen demokratisasi kehidupan perkotaan dalam artian hak atas kota untuk semua. Perjuangan untuk “kewargaan perkotaan” ini menunjukkan kemungkinan bagi kota-kota untuk menantang tidak hanya kemampuan negara-bangsa untuk menetapkan dan menegakkan batas-batas nasional, tetapi juga makna mendasar kewarganegaraan.

› Jembatan dari laut menuju kota-kota

Intervensi politik yang signifikan di tingkat lokal melibatkan komitmen terhadap suatu “kota pengungsian.” Para walikota progresif di kota-kota pesisir Italia (misalnya Napoli, Palermo) dan Spanyol (Barcelona) telah bersepakat mendukung pembukaan pelabuhan mereka dan telah menyambut mereka yang telah diselamatkan di laut. Setelah ratusan orang tenggelam di lepas pantai Sicilia, Leoluca Orlando, walikota ibukota Sicilia, Palermo, termasuk orang pertama di Eropa yang menyatakan kotanya sebagai “kota pengungsian.” Leoluca Orlando telah menarik perhatian besar di seluruh Eropa dengan kalimatnya: “Jika Anda bertanya berapa banyak pengungsi yang tinggal di Palermo, saya tidak akan menjawab: 60.000 atau 100.000, melainkan: tidak ada. Siapapun yang datang ke Palermo adalah warga Palermo.” “Piagam Palermo” yang diprakarsainya menuntut bahwa hak-hak sipil secara eksklusif terkait dengan tempat menetap seseorang.

Di Jermanpun pemerintah-pemerintah kota telah menyatakan kesediaan mereka untuk menawarkan perlindungan bagi orang-orang yang mencari tempat menetap yang aman. Aliansi-aliansi yang besar (misalnya “Seebrücke” dan #unteilbar) dengan ribuan orang dari berbagai masyarakat sipil telah membela penciptaan *Safe Harbours* (Pelabuhan Aman) melalui rangkaian demonstrasi dan aksi-aksi kreatif. Mereka menyerukan adanya rute pengungsian yang aman, dekriminalisasi penyelamatan laut, serta penerimaan langsung dan manusiawi terhadap para pengungsi, mirip dengan suatu program relokasi.

› Akses ke infrastruktur perkotaan tanpa rasa takut

Pengalaman dari Amerika Utara, khususnya gerakan Kota Suaka (*Sanctuary Cities*) yang telah berkembang sejak 1980-an, telah menjadi inspirasi bagi gerakan Kota Solidaritas di Eropa. Titik sentral keberangkatan dari Kota-kota Suaka adalah penduduk ilegal di kota-kota tersebut. Bagi kaum migran yang tidak memiliki dokumen resmi, konsep perbatasan (*border*) direproduksi dalam kegiatan sehari-hari seperti bersekolah, pergi ke rumah sakit, atau penggunaan transportasi umum. Mereka yang tidak dapat membuktikan kepemilikan dokumen resmi akan dieksklusikan dari akses ke layanan sosial dasar dan dapat dikriminalisasi, ditangkap, dan dideportasi.

Untuk melindungi penduduk perkotaan dari deportasi dan memberikan akses ke infrastruktur perkotaan dan hak-hak sosial, beragam bentuk kerjasama antara gerakan sosial dan pemerintah kota—yang bersama-sama menentang otoritas nasional dan kebijakan migrasi mereka—telah diuji. Suatu kebijakan “Don’t Ask Don’t Tell” (Jangan Tanya, Jangan Katakan),





Panji Jejaring Keadilan Migran Solidaritas
Lintas Batas. Kredit: Solidarity Across
Borders.

seperti yang diperkenalkan di Toronto, melarang pegawai kota yang menyediakan layanan publik untuk menanyakan status migrasi (“Jangan Tanya”) seseorang dan, jika hal itu diketahui, pegawai pemerintah dilarang untuk meneruskannya ke aparat negara yang lain (“Jangan Katakan”). Di beberapa kota seperti New York atau San Francisco, setiap orang yang dapat membuktikan identitas dan tempat tinggal mereka di kota berhak mendapatkan kartu identitas kota yang resmi, yang lebih menjamin rasa aman dalam kehidupan perkotaan sehari-hari bagi orang-orang tanpa status tempat tinggal tetap serta memfasilitasi akses mereka ke sumber daya kota.

Saat ini, para aktivis gerakan Kota Solidaritas menyerukan digunakannya Kartu Tanda Pengenal Kota (City ID Cards) di berbagai kota berbahasa Jerman (misalnya di Hamburg, Zurich, Bern), mengikuti contoh serupa di New York. Pemerintah kota Bern telah mendukung inisiatif tersebut meskipun kriteria akses dan manfaat konkret dari kartu tersebut masih diperdebatkan.

› Meniadakan perbatasan

Pemerintah-pemerintah kota memainkan suatu peran sentral dalam rezim perbatasan (internal) karena pengembangan dan implementasi layanan kesejahteraan bergantung pada interpretasi kota-kota tersebut terhadap peraturan-peraturan nasional. Sementara pembatasan hak-hak sosial bagi imigran dengan status rentan merupakan bentuk kontrol migrasi internal, penyediaan akses ke layanan kesejahteraan bagi migran tidak resmi di tingkat lokal dapat menantang konsep yang berlaku mengenai perbatasan nasional.

Hal ini mencerminkan perluasan gagasan mengenai kewarganegaraan. Kewarganegaraan tidak hanya didefinisikan sebagai suatu status melainkan sebagai suatu proses yang melibatkan negosiasi atas akses atas dan pelaksanaan hak-hak. Interpretasi ini di satu sisi meredupkan peraturan hukum tetapi di sisi lain, lebih berfokus pada hubungan-hubungan sosial, norma, praktik solidaritas, dan negosiasi tentang kepemilikan. Oleh karena itu, fokus terhadap berbagai lokus aktual di mana kewarganegaraan dinegosiasikan dalam kehidupan sehari-hari menjadi lebih penting, termasuk di mana bentuk-bentuk solidaritas baru diterapkan dalam komunitas-komunitas perkotaan.

Masalah utama yang diangkat di sini bukan hanya migrasi, namun distribusi hak-hak sosial dan akses yang tidak merata menuju sumber daya. Hal ini memungkinkan terjadinya

pergeseran dalam wacana mengenai migrasi—menjauh dari wacana akan “keharusan integrasi,” menuju di atasinya ketidaksetaraan serta pertanyaan menyangkut partisipasi sosial. Di sinilah letak hubungan dengan perjuangan hak atas kota, yang pada intinya adalah perlawanan terhadap gentrifikasi dan komodifikasi ruang-ruang publik, kepemilikan kolektif atas infrastruktur perkotaan, serta hak-hak untuk berpartisipasi.

› Utopia konkret

Kesemua inisiatif yang memobilisasi dengan slogan Kota Solidaritas ini memiliki suatu kesamaan, yaitu bangkitnya suatu utopia yang konkret. Utopia konkret tersebut memiliki potensi untuk menghindari kendala politik dengan cara mengaitkan migrasi dengan isu-isu kebijakan sosial, alih-alih mengadukan domba satu sama lain.

Selain itu, konsep Kota Solidaritas memungkinkan aliansi yang lebih luas untuk melawan kemiskinan, dan mendukung perumahan sosial, infrastruktur perkotaan, partisipasi budaya dan demokrasi. Dimulai dari kebutuhan dan realitas keseharian di ruang perkotaan yang sangat konkret, perjuangan sehari-hari dari berbagai bentuk gerakan sosial, yang seringkali beroperasi secara terpisah, dapat bersatu dan setidaknya menciptakan suatu kesadaran baru berupa bentuk-bentuk eksploitasi, penindasan, dan diskriminasi yang dialami bersama dalam suatu prekariat perkotaan yang beragam.

Seringkali inisiatif dan gerakan akar rumput konkret seperti inilah yang menjadi dasar bagi eksperimen politik tertentu. Demi keberhasilan implementasi, terciptanya jembatan antara aktivis, politisi progresif perkotaan, serta otoritas/administrasi lokal merupakan hal yang sangat penting. Namun demikian, jenjang perkotaan tidak boleh terlalu dibesar-besarkan: Meskipun ada ruang untuk bermanuver, bagaimanapun juga, kota-kota terintegrasi dalam suatu struktur kekuasaan global dan negara-bangsa akan tetap menjadi arena penting bagi perjuangan politik.

Pada akhirnya, konsep ini mencakup pula kesempatan untuk menciptakan suatu pemahaman baru tentang konsep kepemilikan. Masalahnya bukan siapa dan bagaimana “Liyān” itu dan bagaimana mereka seharusnya. Sebaliknya, hal tersebut menawarkan kemungkinan untuk secara kolektif membayangkan “kita” yang baru. Ini merupakan suatu penyesuaian yang telah lama tertunda terhadap realitas masyarakat pascamigran saat ini, dalam mana migrasi telah diakui sebagai sebuah fakta. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Sarah Schilliger
<sarah.schilliger@unibas.ch>

› Pelajar untuk Masa Depan: Menuju Politik Kelas Ekologis

oleh **Julia Kaiser**, Universitas Leipzig, Jerman dan **Jasper Stange**, Universitas Humboldt di Berlin, Jerman



Mahasiswa Universitas Leipzig bertemu untuk suatu rapat umum. Kredit: Julia Kaiser.

Bagaimana dunia kita akan terlihat dalam satu abad? Menurut penelitian terbaru, mayoritas populasi global akan mengalami kondisi panas di luar kemampuan bertahan hidup manusia selama beberapa minggu per tahun. Aridifikasi (penggurunan) akan memengaruhi lebih dari 30% permukaan tanah dunia. Lebih dari satu miliar orang akan tergusur dari zona tropis. Mungkin, sebagaimana disimpulkan fisikawan Jerman Harald Lesch baru-baru ini, umat manusia kemudian harus mengakui bahwa ia hanya belajar melalui malapetaka. Kita tampaknya tidak memiliki minat serius untuk mencegah situasi ini, meskipun sepenuhnya menyadari kedatangannya.

Namun, hari ini di seluruh dunia, kaum muda, yang terinspirasi oleh pemogokan sekolah mingguan oleh Greta Thunberg, membawa kemarahan mereka ke jalan-jalan dan menuntut perubahan dalam politik iklim. Ini telah berkembang menjadi gerakan global *Fridays for Future* (FFF). Melalui pemogokan sekolah mingguan, demonstrasi, dan bentuk protes lainnya, mereka bertujuan untuk memberikan tekanan pada para politisi terutama untuk membuat mereka mematuhi tujuan 1,5° C yang dinyatakan dalam Perjanjian Paris.

Di Jerman, gerakan ini mendapat dukungan yang luas. Lebih dari 250 kelompok lokal telah didirikan, dan 55% dari populasi telah menyatakan dukungan untuk mendukung keprihatinan gerakan ini. Dalam solidaritas dengan aspirasi pelajar sekolah tersebut, organisasi seperti *Scientists for Future* dan *Artists for Future* telah dibentuk. Perluasan basis sosialnya adalah salah satu tujuan strategis yang paling penting dari gerakan ini, mengikuti logika bahwa semakin besar gerakan itu, semakin banyak tekanan yang bisa diberikan pada mereka yang bertanggung jawab. Setiap orang, terlepas dari afiliasi

politiknya, dipanggil untuk bergabung dalam perang melawan krisis iklim yang akan datang—dan banyak yang telah menjawab panggilan tersebut. Pandangan strategis ini kontras dengan kecenderungan utama dalam aktivisme iklim selama beberapa dekade terakhir. Dengan pendekatannya yang melibatkan sejumlah besar orang dalam protes jalanan, FFF berpotensi membawa perubahan struktural mendasar.

Di Jerman, pelajar secara kolektif bergabung dengan FFF pada awal 2019 sebagai *Students for Future* (SFF). Berikut ini, kami berpendapat bahwa SFF dapat memiliki dampak yang signifikan pada karakter politik gerakan iklim dengan menetapkan pendekatan sistematis dan berbasis kelas untuk organisasi mayoritas. Di sini kami akan meringkas secara singkat sejarah SFF, diikuti oleh analisis tentang apa yang membedakan pendekatan mereka terhadap politik iklim. Kami menyimpulkan dengan beberapa saran tentang bagaimana pelajar dan ilmuwan sosial di seluruh dunia dapat mendukung gerakan melawan krisis yang akan dihadapi oleh umat manusia di masa yang akan datang.

› FFF menaklukkan universitas-universitas

Menyusul pertumbuhan yang cepat dari *Fridays for Future*, pada musim semi 2019, para aktivis mahasiswa di seluruh Jerman mulai membahas bagaimana melibatkan universitas mereka dalam gerakan iklim yang muncul. Sejak awal, tujuannya adalah untuk mengatur pelajar sebanyak mungkin dengan mengadakan pertemuan terbuka di bawah slogan-slogan seperti “Bertindaklah sekarang! Mari kita bawa protes ke universitas: Untuk keadilan iklim yang lebih besar.” Sebagian karena dampak signifikan FFF terhadap wacana publik pada titik ini, pertemuan terbuka ini masing-masing menarik hingga

300 pelajar. Dalam waktu beberapa bulan, kelompok aktivis dan mahasiswa yang beraneka ragam secara politis ini menyelenggarakan rapat umum di lebih dari dua puluh universitas di seluruh negeri, yang sering kali merupakan pertemuan politik terbesar yang pernah dilihat oleh universitas-universitas ini selama bertahun-tahun. Bagaimana kesuksesan cepat ini terjadi?

Karena metode yang digunakan di kota Leipzig, Jerman timur telah diadopsi di banyak kota lain, kami akan menggunakannya di sini sebagai contoh yang representatif. Untuk mencapai sebanyak mungkin pelajar, konsep yang dikembangkan dalam pengorganisasian serikat pekerja diterapkan oleh para aktivis Leipzig. Untuk melaksanakan rapat umum yang resmi, tujuannya adalah untuk membuat pelajar-pelajar lainnya tidak mungkin untuk tidak mendengar tentang rapat umum yang direncanakan dan secara aktif memutuskan apakah akan mendukung atau tidak. Untuk itu, sebuah petisi diedarkan yang menyatakan solidaritas dengan FFF dan menuntut rapat umum untuk membahas langkah-langkah menuju universitas dan kota yang lebih berkelanjutan. Para aktivis dan pendukung secara sistematis menyebarkan petisi di semua fakultas dan di kampus utama, dan memberi tahu para pelajar tentang hal itu dalam ceramah, seringkali dengan dukungan staf pengajar. Dalam seminggu, 2.500 pelajar telah menandatangani petisi.

Pada rapat tersebut, para pelajar menyetujui daftar tuntutan setelah pembicara dari universitas dan serikat pekerja menekankan kesalingterkaitan antara ekologi dan sosial politik. Di kota-kota lain seperti Berlin, tuntutan tidak hanya menargetkan universitas tetapi juga serikat pekerja dan para politikus kota; serikat pekerja diundang ke “pemogokan iklim,” dan senat Berlin didesak untuk memperkenalkan langkah-langkah menuju pembentukan sistem transportasi umum yang lebih luas dan gratis.

› **Pertukaran dalam skala nasional yang lebih luas dan generalisasi metode**

Untuk menyebarkan metode yang diterapkan oleh aktivis di kota-kota seperti Leipzig dan Berlin, pertemuan nasional aktivis SFF diselenggarakan pada Juni 2019, dengan dihadiri oleh perwakilan lebih dari 30 kota. Pendekatan yang berhasil dalam mobilisasi universitas dipresentasikan dan dibahas. Penyelenggara dan penulis serikat pekerja AS, Jane McAlevey diundang untuk mengajar para aktivis metode pengorganisasian yang telah terbukti dan membahas langkah-langkah selanjutnya dari gerakan iklim. Pertemuan ini adalah pertemuan pertama dalam rangkaian koordinasi nasional mahasiswa aktivis untuk perubahan iklim. Dilengkapi dengan metode-metode ini, para aktivis mengorganisasikan rapat umum di empat belas kota pada akhir semester musim panas.

Bersamaan dengan itu, para pelajar mulai lebih aktif terlibat dalam dialog dengan serikat pekerja yang telah diinisiasi oleh FFF. Sampai saat ini, hampir setiap serikat pekerja utama di Jerman telah bertemu dengan aktivis SFF dan FFF di tingkat nasional dan lokal. Konvergensi serikat pekerja dan gerakan sosial seperti itu jarang terjadi di Jerman dalam beberapa ta-

hun terakhir. Beberapa serikat pekerja, seperti yang mewakili pekerja angkutan umum, tampaknya merupakan sekutu alami dari gerakan iklim karena banyak kepentingan mereka yang tumpang-tindih. Misalnya, setelah pembicaraan dengan para aktivis FFF, Frank Bsirske, kepala serikat pekerja layanan *ver.di*, secara terbuka mendorong anggota *ver.di* untuk menghadiri hari pemogokan global pada 20 September 2019. Tetapi bahkan serikat pekerja seperti IG Metall yang kuat, yang mewakili sektor industri padat karbon dari ekonomi, terlibat dalam dialog dengan FFF, meskipun fakta bahwa tempat kerja mereka akan menjadi yang paling terpengaruh oleh restrukturisasi ekologis terhadap ekonomi. Gerakan iklim harus menyelesaikan banyak masalah dan menjawab banyak pertanyaan untuk menciptakan kemungkinan kolaborasi aktual dengan serikat pekerja. Sekalipun demikian, konvergensi-konvergensi ini dapat mengarahkan kepada jalan menuju pergerakan iklim massal yang cukup kuat untuk menciptakan perubahan sosial dan ekologis yang nyata, seperti yang kami paparkan berikut ini.

› **Sebuah tipe baru gerakan iklim?**

Dari sketsa di atas tentang arah yang telah diambil oleh *Students for Future* sejauh ini, kami dapat memperoleh beberapa karakteristik yang, jika disatukan, adalah jarang atau unik dalam gerakan keadilan iklim yang lebih luas.

Pertama, SFF bertujuan untuk menjadikan perjuangan melawan krisis iklim sebagai perjuangan yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat. Dalam hal itu, ia berbeda dari bentuk tindakan lain (yang tidak kurang relevan) yang menuntut peserta menerima risiko fisik dan hukum yang signifikan—seperti menduduki tambang permukaan atau hutan. Bentuk tindakan seperti ini tak terelakkan sebagian besar menarik aktivis yang telah diradikalisasi sampai batas tertentu, suatu lingkungan terbatas dari apa yang oleh Jane McAlevey disebut sebagai “aktivis yang memilih diri-sendiri.” Sebaliknya, *Fridays for Future* menekankan ambisinya untuk menyediakan ruang bagi mayoritas masyarakat dalam “pemogokan” mingguan. SFF memiliki sentimen serupa.

Pendekatan mayoritas memiliki implikasi baik untuk pekerjaan di kalangan pelajar dan pembentukan aliansi dengan aktor lain. Di dalam universitas, SFF bertujuan untuk mengkonfrontasi seluruh organisasi pelajar dengan isu krisis iklim alih-alih membatasi diri pada peristiwa yang lebih kecil yang hanya membahas mereka yang sudah terlibat dalam aktivisme iklim. Politisasi sejumlah besar anak muda dalam beberapa bulan terakhir adalah hasilnya. Strategi ini telah mengarah pada pengembangan keterampilan dan kepercayaan diri yang cepat di antara para aktivis inti; bahkan mereka yang tidak pernah terlibat secara politis sebelumnya sekarang berbicara di depan ratusan pelajar, mengorganisir demonstrasi, dan mewakili gerakan dalam dialog serikat pekerja. Menariknya, mayoritas aktivis ini adalah wanita muda.

Kedua, dalam hal memperluas basis sosial gerakan secara eksternal di luar sekolah dan universitas, SFF (serta bagian-bagian dari FFF) berbagi, setidaknya dalam praktiknya, konsepsi khusus kelas tentang apa yang sebenarnya



dimaksud dengan “mayoritas”. Wajah-wajah terkemuka FFF sebagian besar telah mendekati partai-partai politik, bisnis, dan bahkan bank untuk mendapatkan lebih banyak dukungan bagi gerakan ini, dan telah menyatakan kepercayaan yang kuat pada lembaga-lembaga seperti UE untuk memerangi perubahan iklim. Banyak aktivis SFF kritis terhadap kecenderungan ini. Dalam upaya mereka untuk memasukkan aktor sosial lebih lanjut dalam gerakan ini, dibentuk gugus tugas khusus yang didedikasikan untuk membangun dialog dengan serikat pekerja untuk mengatur mayoritas penerima upah. Ini terjadi tidak hanya untuk mengekspresikan solidaritas timbal balik, tetapi untuk bergabung dengan sekutu potensial dalam pemogokan di mana kekuatan tawar-menawar ekonomi dapat diberikan untuk mencapai perbaikan sosial dan ekologis. Pendekatan terhadap serikat pekerja ini tidak hanya dimotivasi oleh pengakuan akan kekuatan ekonomi pekerja yang terorganisir. Ini juga merupakan upaya untuk mengatasi dugaan kontradiksi antara kepentingan iklim global dan pekerja, terutama mereka yang berada di cabang industri karbon intensif. Kelompok politik tengah dan kanan tanpa lelah, dan sering berhasil, memperkuat narasi ini, mengejutkan di antara mereka yang secara langsung terkena dampak restrukturisasi ekonomi, seperti di bekas wilayah pertambangan Lusatia (Lausitz) di Jerman Timur. Sementara pertanyaan mendasar tetap terbuka, dialog baru-baru ini antara aktivis SFF dan serikat pekerja telah menunjukkan bahwa kepentingan iklim global dan kepentingan pengemudi bus serta pekerja baja kerap terselaraskan.

› **Perspektif untuk waktu dekat**

Dua karakteristik pandangan strategis dari *Students for Future* ini—yang bertujuan untuk keterlibatan aktif dari mayoritas masyarakat dalam gerakan iklim dan pendekatan kelas khusus untuk organisasi mayoritas ini—membuka pintu bagi bentuk-bentuk tindakan yang mampu mencapai perubahan struktural menuju masyarakat yang lebih berkelanjutan melalui aktivitas mandiri mayoritas. Misalnya, di Jerman, negosiasi perundingan bersama nasional yang akan datang di sektor transportasi umum dapat memberikan peluang untuk membangun koalisi antara aktivis iklim, serikat pekerja, dan komunitas. Seperti halnya di sektor kesehatan dan pendidikan, transportasi umum tidak hanya berdampak kecil pada perubahan iklim antropogenik, tetapi juga penting untuk reproduksi sosial dan kesejahteraan seluruh kota dan wilayah. Berdasarkan ini, SFF dapat mengorganisir kelompok terbuka di lingkungan permukiman dan universitas mereka, yang akan menunjukkan solidaritas dengan karyawan, berpotensi mendukung mereka dalam aksi pemogokan, dll. Tekanan politik eksternal dari gerakan sosial seperti FFF/SFF dapat mempolitisasi proses perundingan kolektif dan menekankan besarnya signifikansi negosiasi ini bagi masyarakat. Upaya gabungan oleh serikat pekerja dan gerakan iklim massal dapat mencapai kondisi kerja yang lebih baik dan upah yang lebih ting-

gi untuk karyawan angkutan umum, meningkatkan standar hidup bagi mereka yang menggunakannya melalui perluasan dan dekomodifikasi infrastruktur transportasi umum, dan mengurangi emisi karbon melalui pengurangan transportasi individual melalui mobil.

Strategi hegemonik di antara para aktivis *Fridays for Future*, yang menaruh kepercayaan pada partai politik, bisnis, dan lembaga negara untuk menyelesaikan krisis iklim yang akan datang, telah mencapai semacam jalan buntu. Meskipun telah berperan dalam peningkatan pesat Partai Hijau di Jerman, dan menyebabkan perubahan iklim mendominasi wacana publik selama berbulan-bulan, hal itu tidak menghasilkan tindakan nyata terhadap restrukturisasi ekologis ekonomi Jerman dan masyarakat pada umumnya. Orientasi ke arah politik kelas ekologis, dengan serikat pekerja yang berjuang berdampingan dengan gerakan iklim untuk transformasi ekologis dan sosial, mungkin dapat menawarkan jalan keluar dari kebuntuan strategis ini.

› **Bergabunglah bersama kami!**

Kami percaya universitas memiliki potensi untuk memainkan peran penting dalam membangun gerakan iklim yang luas, berbasis kelas, dan mengglobal. Ini akan membutuhkan organisasi pelajar yang terorganisasi serta para ilmuwan kritis yang secara aktif mendukung proses organisasi dan mengembangkan kontribusi teoretis menuju pemahaman yang lebih dalam tentang penyebab krisis iklim dan kemungkinan solusinya. Ini bukan hanya isu yang berkaitan dengan ilmu teknis atau alam; teknologi berkelanjutan saja tidak akan menghentikan perubahan iklim antropogenik. Seluruh ekonomi dan masyarakat kita harus direstrukturisasi. Dengan cara bagaimana dan apa konsekuensinya akan menjadi pertanyaan penting yang harus dijawab oleh ilmuwan sosial.

Untuk lebih spesifik: Para pelajar, organisasikan diri dalam gerakan iklim! Para ilmuwan, selaraskan penelitian Anda dengan pertanyaan mendesak yang dihadapi umat manusia dan buat hasil Anda dapat diakses publik! Akhirnya, bekerjalah bersama kami untuk memperkuat gerakan. Saat ini, *Students for Future* sedang mendiskusikan kemungkinan pemogokan iklim mahasiswa selama seminggu. Selama satu minggu kami dapat membuka universitas untuk umum dan mengorganisir ceramah dan diskusi tentang krisis iklim dan kemungkinan solusi untuk itu. Konferensi Rektor-rektor Jerman (HRK) telah mendefinisikan peran universitas sebagai “pusat dari budaya demokratis yang berkontribusi pada diskusi-diskusi produktif untuk memahami tantangan-tantangan utama masyarakat.” Dengan berkaca pada situasi dunia saat ini dan di masa depan, kami berpikir bahwa sudah tiba saatnya untuk memenuhi tanggung jawab ini. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada:
 Julia Kaiser <julaidakaiser@gmail.com>
 Jasper Stange <jasper.stange@hotmail.de>

› Pendidikan Katolik Swasta di Senegal

oleh **Moustapha Tamba**, Universitas Cheikh Anta Diop di Dakar, Senegal

Di Senegal pendidikan Katolik swasta tetap menonjol hingga saat ini. Pada tahun 1816, pemerintah kolonial mempercayakan pengajaran bahasa Prancis kepada Gereja, khususnya kepada beberapa kongregasi seperti Suster-suster Cluny Santo Yosef, para Bruder Ploërmel, para Misionaris Roh Kudus, para Suster Konsepsi Imakulata dari Castres, dan para Putri Hati Kudus Maria. Pada abad kedua puluh, setelah Perang Dunia Kedua, pengembangan pendidikan Katolik mengambil langkah maju yang menentukan dengan dorongan Monsignor Marcel Lefebvre, Vikaris Apostolik dari tahun 1946 hingga 1960. Kongregasi-kongregasi lain pun menetap di sana, seperti Persaudaraan Santo Gabriel, Persaudaraan Hati Kudus, para Suster Ursulin, para Suster Santo Charles dari Angers, dan para Marist.

Setelah kemerdekaan pada tahun 1960, Gereja mempercayakan kebijakan pengajaran kepada Direktorat Nasional Pendidikan Katolik pada tahun 1970. Pada tahun 1976, suatu struktur koordinasi nasional dibentuk, yang kini digantikan oleh sebuah Sekretariat Nasional. Sejak tahun 2003, pendidikan Katolik swasta telah dibentuk sebagai sebuah asosiasi yang disebut Kantor Nasional Pendidikan Katolik Senegal (*Office national de l'enseignement catholique du Sénégal*).

Namun demikian, pendidikan Katolik swasta telah terus didesentralisasikan melalui pembentukan direktorat-direktorat keuskupan. Saat ini ada tujuh keuskupan yang masing-masing memiliki Direktorat Pendidikan Katolik Keuskupan (*Direction diocésaine de l'enseignement catholique*), atau Didec. Dengan adanya pendelegasian oleh uskup keuskupan,

direktur keuskupan bertanggung jawab atas semua sekolah Katolik di suatu keuskupan.

Untuk melakukan penelitian ini, kami berpaling kepada mereka yang bertanggung jawab atas pendidikan swasta Katolik, khususnya kepala direktorat pendidikan Katolik Keuskupan Agung Dakar dan Sekretaris Kantor Nasional Pendidikan Katolik Senegal, untuk memperoleh data kuantitatif. Kedua kantor terletak di S.I.C.A.P. Distrik Baobab di Dakar di seberang Gereja Santo Peter, di mana kami melakukan survei dokumenter dengan menggunakan arsip yang disediakan bagi kami. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel penyortiran tabulasi silang atau entri ganda.

Tabel 1 menunjukkan bahwa Keuskupan Agung Dakar sendiri telah menyumbang hampir 50% dari jumlah total sekolah. Itu terdiri dari

Tabel 1: Distribusi Sekolah Katolik menurut Jenjang Pendidikan berbeda pada 2018-19

KEUSKUPAN	JENJANG					TOTAL	%
	Prasekolah	Dasar	Menengah	Atas			
Dakar	58	54	23	14	149	48,5%	
Thiès	22	24	3	1	50	16%	
Kaolack	12	13	2	1	28	9%	
Ziguinchor	11	15	8	1	35	11%	
Saint-Louis	8	6	3	1	18	6%	
Kolda	6	6	3	1	16	5%	
Tambacounda	4	5	1	1	11	4,5%	
TOTAL	121	123	43	20	307	100%	

Sumber: Kantor Nasional Pendidikan Katolik Senegal, Maret 2019.

Tabel 2: Distribusi Sekolah Katolik menurut Jenjang Pendidikan berbeda pada 2018-19

KEUSKUPAN	JENJANG					
	Prasekolah	Dasar	Menengah	Atas	TOTAL	%
Dakar	6.442	36.304	16.467	6.696	65.909	57%
Ziguinchor	2.268	5.735	1.856	491	10.350	9%
Thiès	1.983	11.080	2.665	836	16.564	14%
Kaolack	1.441	5.326	733	248	7.748	7%
Saint-Louis	970	3.519	1.212	262	5.963	5%
Kolda	656	3.465	958	245	5.324	4,5%
Tambacounda	417	2.630	479	143	3.669	3,5%
TOTAL	14.177	68.059	24.370	8.921	115.527	100%

Sumber: Kantor Nasional Pendidikan Katolik Senegal, Maret 2019.

dua daerah kerasulan, yang pertama termasuk wilayah Le Plateau, Grand Dakar-Yoff, dan Les Niayes, dan yang kedua termasuk wilayah Sine dan Petite Côte. Secara keseluruhan, Keuskupan Agung terdiri dari 41 paroki. Keuskupan Thiès dan Ziguinchor masing-masing mewakili 16% dan 11% dari masing-masing institusi. Keuskupan Kolda dan Tambacounda memiliki lebih sedikit institusi.

Keuskupan Agung Dakar memimpin dengan 57% dari seluruh populasi siswa. Menurut statistik Didec, di wilayah perkotaan, khususnya Dakar dan pinggirannya, terdapat 25.360 siswa pendidikan dasar sedangkan di daerah perdesaan (Petite Côte dan Sine) terdapat 10.944 siswa. Pada tingkat pendidikan menengah di tahun 2018-19, Keuskupan Agung memiliki

14.002 siswa di daerah perkotaan dan 2.465 siswa di daerah perdesaan. Menguasai 75% dari jumlah keseluruhan siswa di sekolah swasta, Keuskupan Agung tetap menjadi organisasi terbesar dalam pendidikan menengah. Collège Sacré-Cœur tetap merupakan sekolah Katolik swasta terbesar, dengan jumlah mahasiswa terdaftar sebanyak 1.059 siswa pada 2018-19.

Di samping itu, menurut Didec Keuskupan Agung Dakar, di semua tingkatan terdapat lebih banyak siswa beragama Muslim daripada mereka yang beragama Katolik. Pada pendidikan dasar di tahun 2018-19, misalnya, 72% siswa adalah Muslim, 26% Katolik, dan 2% beragama lain. Ini adalah bukti dari dialog antaragama di antara orang Senegal.

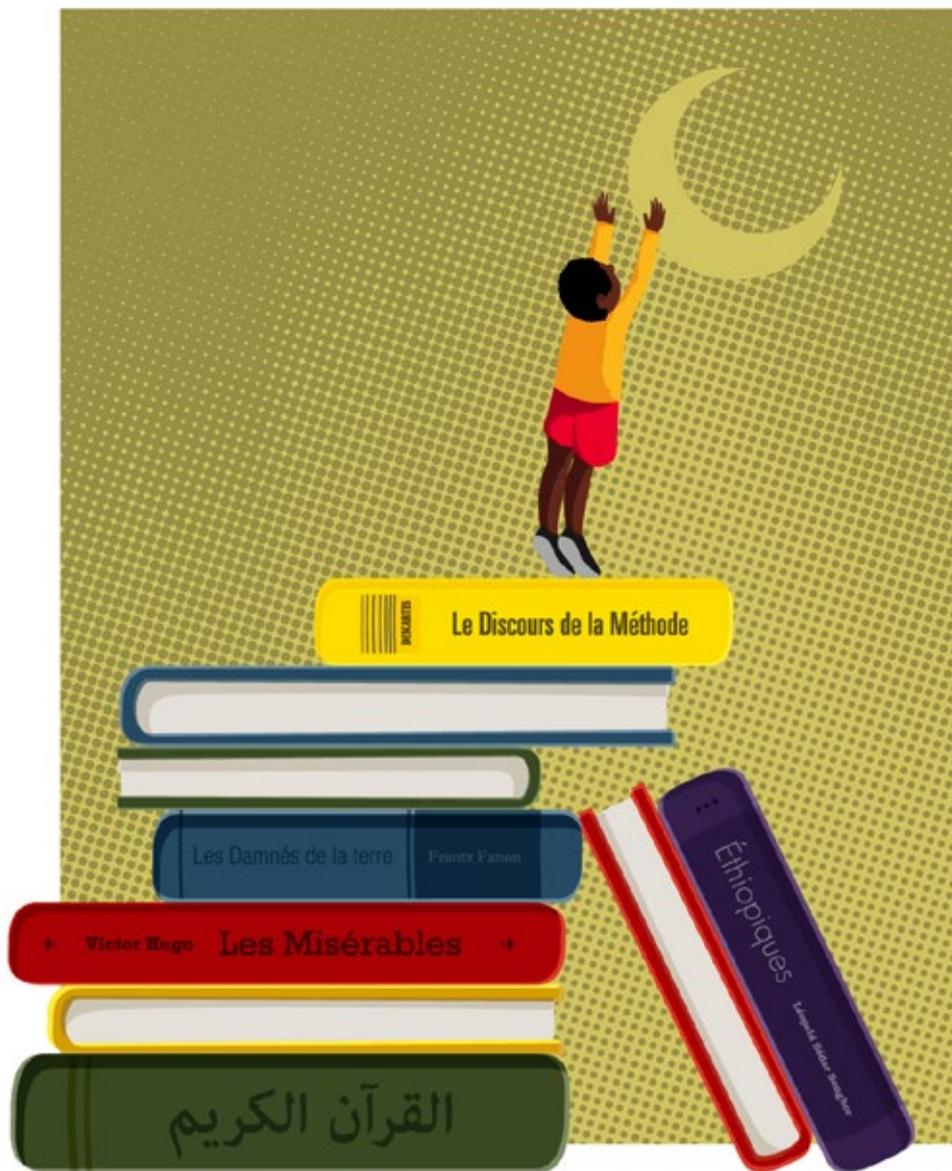
Sebagai kesimpulan, dapat dikatakan bahwa penyebaran pendidikan Katolik swasta sebagai institusi pendidikan secara historis mendahului pendidikan publik dan sekuler. Pada abad kesembilan belas, pendidikan Katolik swasta sudah hadir di empat kotamadya: Saint Louis, Gorée, Dakar, dan Rufisque. Kondisi yang sama juga dapat ditemukan saat ini di seluruh negeri, meskipun sebagian besar infrastruktur dan pendaftaran siswa terletak di Keuskupan Agung Dakar, yang mencakup semua paroki di Dakar, Petite-Côte, dan Sine. Fakta menarik lainnya adalah bahwa sebagian besar siswa di sektor pendidikan Katolik swasta beragama Islam, bukan Katolik. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Moustapha Tamba <moustapha.tamba@ucad.edu.sn>

› Sosiologi

Sistem Sekolah Senegal

oleh **Souleymane Gomis**, Universitas Cheikh Anta Diop di Dakar, Senegal



| Ilustrasi oleh Arbu.

Refleksi dimensi-dimensi sosiologi mengenai sistem pendidikan Senegal memberi peluang bagi analisis yang bersifat komprehensif dan sistematis. Tujuannya adalah untuk memperlihatkan kekuatan-kekuatan dan ke-

lemahan-kelemahan dari struktur dan fungsi sejak era kolonial hingga saat ini, dan untuk mengidentifikasi prospek-prospeknya. Di sini mungkin perlu dicatat bahwa Senegal adalah salah satu dari sedikit negara di Afrika yang memiliki tradisi pendidikan yang panjang. Memang, jauh sebelum berkontak dengan Eropa, Senegal telah menjadi pusat utama pendidikan alquran selama periode Islamisasi di Benua Hitam ini.

Tokoh-tokoh sejarah dan agama utama seperti El-Hadji Malick Sy, Sheikh Ahmadou Bamba, dan Sheikh Ibra Niass membantu menyebarkan pendidikan alquran di seluruh Senegal dan di luarnya. Tradisi pembelajaran dalam bahasa Arab ini memainkan peranan penting dalam perlawanan Senegal terhadap invasi Prancis. Namun, penjajah Prancis sebenarnya berhasil memanfaatkan tradisi berbahasa Arab dari orang Senegal untuk mempromosikan sistem sekolah kolonial. Pada tahun 1960, ketika Senegal memperoleh kemerdekaannya, sistem sekolah berbahasa Prancis yang diwarisi dari para penjajah dipertahankan sebagai alat untuk membantu membangun negara-bangsa. Bahasa Prancis telah dipertahankan oleh para pejabat baru sebagai bahasa resmi negara tersebut.

Namun, debat yang terus bergulir hingga sekarang ialah apakah orang Senegal telah memperoleh kepemilikan atas sistem pendidikan mereka sendiri. Rakyat Senegal masih melihat diri mereka sebagai pengguna semata-mata dari sistem pendidikan

ini. Masalah memperkenalkan bahasa nasional di sekolah untuk memajukan pendidikan bilingual membuktikan hal ini.

› **Terbentuknya sistem sekolah di Senegal**

Sekolah berbahasa Prancis pertama di Afrika Hitam didirikan pada tahun 1817 di Saint Louis, Senegal, oleh seorang guru muda Prancis yang berusia 27 tahun bernama Jean Dard. Sejak saat itu, lebih banyak sekolah dibangun, yang secara bertahap menyebar, pada mulanya di kota-kota pantai dan kota-kota, kemudian di komunitas-komunitas di pedalaman. Pembangunan sekolah-sekolah di daerah-daerah lain di negara ini dipercepat oleh para penjajah untuk memfasilitasi pertukaran komersial dan politik.

Seperti di sebagian besar bekas negara jajahan Afrika, Senegal mengalami Perancisasi kurikulum sampai kemerdekaannya pada tahun 1960, kemudian Africanisasi dari tahun 1970-an, dan akhirnya nasionalisasi pada tahun 1990. Namun, terlepas dari evolusi ini dari waktu ke waktu, sistem sekolah Senegal secara struktural dan fungsional tetap menggunakan model seperti model mantan penjajah Prancis. Sekolah adalah wajib dan gratis untuk semua anak perempuan dan laki-laki yang berusia antara enam sampai enam belas tahun.

Mengikuti standar UNESCO, 2% penduduk dari setiap negara seharusnya mencapai tingkat pendidikan tinggi. Mengingat bahwa penduduk Senegal saat ini diperkirakan 15 juta, negara ini seharusnya memiliki sekitar 300.000 mahasiswa pendi-

dikan tinggi. Tetapi jumlah sebenarnya adalah hanya 150.000 mahasiswa, baik di lembaga pendidikan tinggi swasta maupun publik. Masalah lain yang sama pentingnya adalah ketidakcocokan antara kurikulum dan harapan rakyat Senegal.

› **Kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan**

Sistem pendidikan sekolah publik Senegal diakui sebagai suatu model keberhasilan, yang telah mendidik dalam bidang-bidang sains, kedokteran, hukum, sastra, dan ekonomi, tokoh-tokoh sejarah dunia—seperti Léopold Sédar Senghor dalam karya sastra dan Cheikh Anta Diop dalam sejarah dan fisika—yang karyanya telah meninggalkan jejak mereka pada sejarah modern umat manusia. Satu kekuatan dari sistem sekolah Senegal terletak pada kualitas pelatihan pengajar. Komitmen dan tekad negara untuk mendukung sekolah dan sistem pendidikan tingginya juga patut diperhatikan, dan demikian juga keterlibatan dan investasi keluarga. Rakyat bebas untuk berkontribusi untuk membiayai sekolah anak-anak mereka.

Namun, harus dicatat bahwa negara, guru, serikat guru, atau mitra teknis dan keuangan tidak mempertimbangkan untuk melibatkan orang tua dalam pengembangan kurikulum sekolah. Penduduk hanya dianggap sebagai konsumen dari sistem sekolah dan layanannya

Sistem pendidikan Senegal mengalami banyak keterbatasan yang berbeda-beda—pada tingkat politik, psikologis, infrastruktur, program, materi, keuangan, dan manusia. Misalnya, Senegal tidak sepenuh-

nya otonom dalam menentukan visi dan orientasinya dalam hal kebijakan pendidikan: mereka tunduk pada keterbatasan teknis dan finansial dari mitra seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional.

Dari sudut pandang psikologis, kami menemukan bahwa lembaga sekolah belum cukup terintegrasi ke dalam mentalitas penduduk meskipun kehadiran lembaga pendidikan di Senegal sudah lama dan bersifat wajib sejak usia dini. Sekolah masih dianggap oleh orang Senegal sebagai alat yang diwarisi dari penjajahan Prancis yang tidak dapat sepenuhnya menjadi milik mereka sendiri.

Pada tingkat program, isi pendidikan masih tetap berkaitan dengan model kurikulum Prancis, dengan sedikit variasi di beberapa mata pelajaran. Kurikulum baru, walaupun dirancang dan diajarkan oleh warga negara mereka sendiri, tidak sepenuhnya merefleksikan realitas budaya lokal namun lebih merupakan reproduksi pola-pola kolonial.

Pada tingkat materi, sistem sekolah Senegal menderita karena kekurangan sumber daya yang berakar. Masih ada ruang kelas di tempat-tempat penampungan sementara di semua tingkatan, dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.

Walaupun menghadapi berbagai kesulitan yang parah, dapat dikatakan bahwa Senegal memiliki suatu sistem sekolah yang baik. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Souleymane Gomis <Souleymane.gomis@ucad.edu.sn>

› Penyesuaian Strategis dalam Pendidikan Arab-Prancis Di Senegal

oleh **El Hadji Malick Sy Camara**, Universitas Cheikh Anta Diop di Dakar, Senegal



Pendidikan dasar di Senegal difokuskan pada perolehan literasi dalam bahasa Arab dan Prancis. Kredit: Global Partnership of Education/flickr. Beberapa hak dilindungi.

Dengan diperkenalkannya Islam, semakin banyak rumah tangga di seluruh Senegal menjadi terbiasa dengan bahasa Arab. Sebenarnya bahasa Arab sangat penting bagi penduduk, yang 95% Muslim. Bahasa Arab nampaknya sangat dihargai di kalangan Muslim Senegal karena merupakan pula bahasa melalui mana alquran diturunkan. Sesungguhnya, seseorang dengan pemahaman mengenai alquran dianggap berpendidikan dan seorang Muslim yang baik. Namun sejak awal kolonisasi menerapkan suatu sistem pendidikan yang didasarkan pada pengajaran bahasa Prancis.

Koeksistensi di antara kedua sistem pendidikan tersebut terbukti sangat sulit. Untuk memenuhi kebutuhan sebagian besar penduduk, sekolah Arab-Prancis swasta dan negeri menawarkan pendidikan ganda dalam bahasa Prancis dan Arab. Islam sebenarnya merupakan bagian yang integral dari kehidupan rakyat Senegal karena melampaui kekhususan etnik dan regional serta membentuk kehidupan rakyat secara terbuka, terlepas dari asal-usul sosial, tingkat pendidikan, dan latar belakang budaya atau geografis mereka.

Berdasarkan suatu telaah pustaka, artikel ini menggambarkan bagaimana rakyat Senegal telah berhasil memanfaatkan pendidikan Arab-Prancis sebagai suatu peluang

untuk menghindari jebakan administrasi kolonial.

› Model-model pembelajaran dalam sekolah-sekolah Arab-Prancis

Sekurang-kurangnya ada dua kategori sekolah Arab-Prancis yang dapat diidentifikasi: sekolah yang ditandai oleh kuatnya dominasi kurikulum Islam (alquran, fikih, sunah dsb.), dan sekolah yang sedikit-banyak ditandai oleh keseimbangan antara pendidikan Prancis dan Arab-Islam. Di masa ini, para pemilik sekolah Arab-Prancis sangat terlibat dalam pendidikan prasekolah dan pendidikan dasar.

Dalam kategori pertama sekolah Arab-Prancis, pendidikan di dua tahun pertama di sekolah dasar difokuska pada diperolehnya literasi

dalam bahasa Arab dan belajar al-quran dan hadis. Kelas-kelas bahasa Prancis terbatas pada pengantar abjad dan pengembangan ketrampilan komunikasi. Selama dua tahun tersebut, para siswa diharapkan untuk dapat menghafal sebanyak mungkin surah alquran. Namun setelah tahun ketiga dan selanjutnya, mereka diharapkan untuk “mengejar ketinggalan” kurikulum tahun pertama, kedua, dan ketiga. Pada tahun keenam dan terakhir di sekolah dasar, para siswa diharuskan menempuh ujian mereka dalam bahasa Prancis dan Arab untuk memperoleh kualifikasi dasar mereka sebagai lulusan dalam kedua bahasa (kurikulum nasional dan sertifikat tanda lulus kurikulum Islam-Arab).

Kategori kedua dari sekolah Arab-Prancis menerapkan keseimbangan antara pendidikan umum sekuler dan pendidikan Muslim-Arab. Diciptakannya gerakan-gerakan *Al Falaq* dan *Jama'atou Ibadou Rahmane* (JIR) telah memberikan sumbang-an signifikan pada dipromosikannya pendidikan Arab-Prancis, suatu bidang yang nyaris diabaikan samasekali oleh negara, yang telah memilih bahasa Prancis sebagai bahasa resminya.

Opsi untuk mengkombinasikan atau sedikit-tidaknya menyeimbangkan pendidikan Islam-Arab dan pendidikan umum sekuler ini terutama ditujukan pada terciptanya dan/atau dididiknya warga negara di masa mendatang dalam nilai-nilai agama (Islam) yang telah mengakar secara mendalam tetapi juga dalam kapasitas untuk meraih segala sesuatu yang harus diketahui oleh seorang siswa sekolah umum. Sekolah alquran Bilal¹, yang diciptakan oleh gerakan JIR, misalnya, telah memilih sistem ini. Namun, terlepas dari sekolah ini, yang hanya menawarkan pendidikan dasar, JIR telah menciptakan suatu sekolah menengah yang, seandainya

pun dimaksudkan untuk menampung lulusan sekolah Bilal, tidak memerlukan persetujuan orang tua yang menginginkan agar anak-anak mereka melanjutkan ke pendidikan publik dengan kurikulum yang sekuler. Di sekolah-sekolah JIR terdapat dua orang guru di tiap kelas untuk semua mata pelajaran, artinya, seorang guru yang berbahasa Prancis dan seorang guru yang berbahasa Arab. Di samping itu, JIR membantu banyak institusi pendidikan dengan pelatihan guru dan mata pelajaran. Sesungguhnya, di sekolah El Hadji Omar Tall, kurikulum Islam-Arab pada umumnya lebih utama daripada kurikulum sekuler pendidikan publik. Meskipun beberapa orang tua lebih menyukai pendidikan Islam-Arab, namun ditempuhnya jalur ini dalam banyak hal merupakan suatu bentuk eksklusi bagi para siswa. Namun perlu dikemukakan bahwa karena *École Normale Supérieure* (diubah namanya menjadi FASTEF²) menyelenggarakan pendidikan dalam bahasa Arab bagi para lulusan, tidak ada lagi perbedaan antara para guru berbahasa Arab dengan guru-guru lain: kesemuanya memperoleh gaji yang sama (Thierno Ka, Alioune Diop dan Djim Dramé, 2013).

› Sekolah Arab-Prancis: mengklaim identitas ganda

Walaupun klaim atas kewarganegaraan budaya (atau bentuk-bentuk kewarganegaraan baru) pada awalnya diajukan oleh apa yang dinamakan “kontra-elite” (*counter-elite*) yang terdiri atas para penutur bahasa Arab yang berpendidikan, klaim tersebut kini semakin diambil alih oleh suatu elite Muslim baru penutur bahasa Prancis yang dididik dalam institusi-institusi sekuler (Camara, 2016). Identitas ganda ini memungkinkan para anggotanya untuk melepaskan diri dari posisi-posisi “kewarganegaraan kelas dua” dan klaim keanggotaannya dalam kewarganegaraan

nasional. Klaim mereka, walaupun bersifat kritis terhadap negara dan institusi-institusi sekulernya, tidak dinyatakan di luar kerangka institusi dan pengendalian oleh negara. Sebaliknya, dalam menyatakan hak-hak kewargan dan politik mereka, para warga negara Muslim ini cenderung mengadopsi aturan permainan demokrasi untuk mempromosikan proyek mereka berupa suatu “masyarakat Islam” dan menantang hegemoni kaum elit kebarat-baratan dan sekuler yang telah memerintah Senegal sejak mereka merdeka.

› Kesimpulan

Sekolah-sekolah Arab-Prancis sekarang sudah cukup mapan di Senegal, khususnya di pusat-pusat perkotaan. Para lulusan sekolah-sekolah Islam-Arab, yang oleh karenanya menamakan diri mereka “Arabis” (*arabisants*) [orang yang mempelajari bahasa atau peradaban Arab], telah lama menderita karena ketiadaan peluang untuk berkarir. Di masa kini, nilai baik yang diraih sekolah-sekolah Arab-Prancis dalam ujian-ujian nasional (BFEM, *baccalaureate*) [bakal-oreat, sarjana muda] pada akhirnya telah mendorong pendapat umum dan negara Senegal untuk memandang mereka sebagai aset nyata bagi negara. Para pelaku ini, yang sebagian besar aktif dalam gerakan Islam Senegal, telah berhasil mengubah perspektif Barat dengan menggunakan sekolah-sekolah Arab-Prancis sebagai instrumen kunci bagi suatu identitas yang dianut. ■

1. Beberapa orang mantan siswa sekolah ini sekarang menjadi pejabat tinggi publik sedangkan yang lain menjadi pengajar jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

2. Faculté des Sciences et Technologies de l'Éducation et de la Formation.

Seluruh korespondensi ditujukan kepada El Hadji Malick Sy Camara <asmalick20031@gmail.com>

› Pendidikan Swasta Sekuler di Senegal

oleh **Samba Diouf**, Universitas Cheikh Anta Diop di Dakar, Senegal



Di Senegal, sekolah-sekolah swasta telah meraih reputasi yang baik di kalangan orang tua yang memandangnya sebagai jaminan kestabilan karena ketiadaan pemogokan. Kredit: Alan Levine/flickr. Beberapa hak dilindungi.

Sistem-sistem pendidikan di negara-negara Selatan Global memiliki ciri ganda dari struktur-struktur tradisional dan dari penjajah. Model yang diekspor dari Eropa pasti tidak diperkenalkan di atas wilayah hampa di Afrika. Model tersebut selalu diperoleh melalui cara yang khas, baik oleh mereka yang bertugas menyesuaikan dengan konteks-konteks khas maupun oleh mereka yang menerimanya. Sementara penerjemahannya ke konteks lokal melibatkan pembelotan terhadap beberapa di antara prinsip-prinsip awalnya, penerjemahan tersebut melibatkan pula penyesuaian prinsip-prinsip awal tersebut oleh pihak lain terhadap budaya [sempat] ini (Charlier, 2002). Sebagai akibatnya, apa yang nampak sebagai supremasi model sekolah yang ditegakkan penjajah tidak dapat mengelabui kita: dengan menggambarkannya sebagai “Barat,” “Prancis,” “formal” atau “modern,” orang menandakan bahwa kedua pihak menganggapnya sebagai hal yang asing dan hanya bersedia menghormatinya sepanjang mereka dapat memperoleh darinya akses ke benda-benda material yang terkait dengan modernitas Barat. Bentuk dukungan bersyarat ini telah menyisakan ruang bagi pengaturan-pengaturan pendidikan tradisional: sekolah-sekolah alquran telah senantiasa tetap aktif di Senegal, secara terus-menerus menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi baru yang dibawa oleh perubahan sosial. Sekolah negeri, alih-alih menggantikan

institusi-institusi sosialisasi yang lebih tua tersebut, datang sebagai pelengkap terhadapnya sambil memperkenalkan kriteria mereka sendiri untuk menegakkan hirarki-hirarki orang dan pengetahuan.¹

Kemerdekaan dari penjajahan kolonial mendorong Senegal untuk membuat eksplisit sifat dan bentuk hubungan yang dibayangkannya antara berbagai badan yang akan cenderung terlibat dalam pendidikan generasi-generasi mudanya. Dengan demikian Konstitusi tahun 1963 mengatur bahwa: “Republik ini sekuler, demokratis dan sosial. [...] Setiap orang mempunyai hak atas pendidikan [...]. Pendidikan kaum muda disediakan oleh sekolah-sekolah publik. Lembaga-lembaga dan komunitas-komunitas keagamaan diakui pula sebagai cara untuk memperoleh pendidikan. [...] Sekolah-sekolah swasta dapat beroperasi dengan izin dan di bawah pengawasan negara. [...] Lembaga-lembaga dan komunitas-komunitas keagamaan [...] bebas dari pengawasan negara.” Republik Senegal yang sekuler dengan demikian mencabut pengawasannya atas institusi-institusi dan komunitas-komunitas keagamaan yang diakui sebagai “cara memperoleh pendidikan.” Dengan kata lain, pengawasan atas pendidikan hanya digambarkan sebagai suatu tujuan yang jauh, dan secara bertahap ditinggalkan: pada tahun 1996, dekret untuk menerapkan undang-undang mengenai pengalihan urusan kompetensi ke wilayah, kotamadya dan komunitas perdesaan untuk sebagian mengalihkan tanggung jawab atas pendidikan ke jenjang-jenjang daerah (*sub-state*). Konstitusi tahun 2001 kemudian mengklarifikasi peran tiap badan. Negara “mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mendidik dan melatih kaum muda melalui sekolah publik. Semua anak [...] mempunyai hak akses atas sekolah. [...] Semua lembaga nasional, publik atau swasta, berkewajiban untuk

menjadikan anggotanya mampu membaca dan menulis (*literate*) dan untuk ikut serta dalam upaya literasi nasional dalam salah satu dari bahasa-bahasa nasional.” Sementara tanggung jawab negara ditegaskan secara kuat, peran badan daerah dan swasta juga diperkuat.

› Sekolah-sekolah swasta sekuler

Pendidikan swasta non-agama berkembang di Senegal di tahun 1980-an. Sekolah-sekolah swasta sekuler telah didirikan oleh para pemrakarsa perorangan yang bertanggungjawab atas pengelolaan administratif, keuangan dan pendidikannya. Berbeda dengan sekolah swasta Katolik, pengoperasian sekolah swasta sekuler tidak diawasi oleh pengelola umum apapun meskipun mereka, seperti halnya semua sekolah swasta, terhubung dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Swasta, yang merupakan bagian dari Kementerian Pendidikan Nasional

Sejak tahun 2000-an, sekolah-sekolah swasta sekuler telah meraih keberhasilan yang meyakinkan dalam penyediaan pendidikan massal. Meskipun mereka lebih diutamakan daripada sekolah-sekolah lain, mereka sering dihadapkan dengan gangguan yang menghalangi pelaksanaan fungsinya secara memadai. Ini dapat mencakup kelambatan dalam pembayaran gaji guru, gaji yang di bawah upah minimum, dan penunggakan pembayaran sewa tempat yang mengakibatkan sejumlah pemilik menutup sekolahnya.

› Persepsi orang tua mengenai pendidikan swasta sekuler

Perlu dicatat bahwa ekspansi sekolah swasta dan jumlah siswa yang terdaftar dalam sektor ini mengindikasikan bahwa pendidikan swasta telah menduduki tempat yang tak terban-

tahan di Dakar. Mayoritas orang tua yang diwawancarai mengklaim bahwa kestabilan sektor swasta merupakan salah satu alasan utama mengapa mereka memilih untuk mendaftarkan anak mereka di sektor ini. Kestabilan seperti ini tercermin dalam ketiadaan pemogokan atau ketidakhadiran yang diorganisasi oleh gerakan serikat buruh, yaitu ketiadaan gangguan-gangguan yang melanda sektor pendidikan publik di masa kini. Salah seorang responden kami menyatakan bahwa “kekerasan dan kasus-kasus kejahatan remaja yang nampak di beberapa sekolah publik telah mendorong banyak orang tua untuk menyekolahkan anak mereka di sekolah-sekolah swasta.” Seorang responden lain, seorang ibu rumah tangga berusia 38 tahun, mempertimbangkan bahwa “jika seorang anak sekarang tidak berhasil di pendidikan swasta, itu karena dia tidak suka belajar. Di sektor swasta tidak ada pemogokan atau kekurangan guru, dan orang tua banyak berinvestasi dalam pendidikan anak-anak mereka. Yang menarik ialah bahwa orang tua menempatkan titik berat lebih besar pada kestabilan sekolah swasta bila dibandingkan dengan sekolah publik, ketimbang pada mutu pendidikan yang ditawarkan. Dalam pandangan mereka, kestabilan sekolah merupakan suatu faktor kunci keberhasilan dan setiap anak yang terdaftar dalam suatu sekolah swasta harus berhasil.

Persepsi publik mengenai pendidikan swasta sekuler menunjukkan bahwa kebanyakan orang tua memilih sekolah swasta demi kestabilan. Sekolah-sekolah ini telah memperoleh suatu tempat yang meyakinkan di kalangan penduduk karena nilainya yang baik, tetapi yang lebih penting lagi, karena kestabilan mereka. ■

1. Lihat Suzie Guth dan Éric Lanoue (eds.), (2004). *Écoles publiques, Écoles privées au “Sud”: usages pluriels, frontières incertaines, Cahiers de la recherche sur l'éducation et les savoirs*, 3.

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Samba Diouf <bathie78@yahoo.fr>

› Kajian Sosio-Antropologis Kepemimpinan Agama di Senegal

oleh **Mouhamed Moustapha Dieye**, Universitas Sheikh Anta Diop di Dakar, Senegal



Masjid Ilahi di Dakar, Senegal.

Kredit: Valentina Buj/flickr. Beberapa hak dilindungi.

› Warisan kepemimpinan agama

Sejak awal, Senegal adalah pusat dalam berbagai pertukaran antara Eropa, Afrika, dan Amerika, yang, sampai batas tertentu, menjelaskan keterbukaan orang Senegal, rasa keramahan dan toleransi mereka antara kaum Muslim dan Kristen. Nilai-nilai sosial-budaya mereka berasal dari tiga sumber budaya: tradisi budaya yang tertanam secara mendalam, agama Islam dan Kristen, dan modernitas gaya barat yang didasarkan pada nilai-nilai Republik. Di antara ketiga sumber tersebut, Islam merupakan pengaruh yang paling menentukan. Sebanyak 95% dari penduduk Senegal adalah Muslim dan sebagian besar menjadi anggota dari kelompok persaudara-

an keagamaan yang menjadi regulator sosial yang nyata: sebanyak 49% menjadi anggota persaudaraan Tijanya, 35% anggota Mouride, 7% anggota persaudaraan Qadiriyya, dan 5% anggota Layenne.

Sejarah politik-agama Senegal menunjukkan bahwa Islam telah menghasilkan, secara mencolok, pria dan pemimpin yang mampu mencapai dan mempertahankan keseimbangan sosial negara. Para pemimpin agama ini telah sangat berkontribusi pada pembentukan secara evolutif negara Senegal dan rakyatnya. Tindakan dan komitmen para pemimpin agama seperti El Hadj Omar Tall di Futa-Toro, Samori Toure, pemimpin terkenal revolusi Dioula, Maba Diakhou Bâ dan Thierno Souleymane Baal yang memimpin revolusi Torobe di Futa-Toro melawan

Kekaisaran Songhai dari Koly Tenguela tetap berada dalam memori kolektif Senegal. Kekuatan kepemimpinan mereka dihasilkan dari konvergensi antara Islam dan tradisi “lama” dari demokrasi Afrika, yang dasarnya adalah ketidakpercayaan terhadap kekuasaan dan keyakinan bahwa ekspansi dan kesewenang-wenangan harus dibatasi dan dicegah. Menyadari efek buruk dari kekuasaan absolut apapun, masyarakat tradisional Afrika sering mencegah para pemimpin mereka menjadi “pemeran penguasa” dan melakukan segala upaya untuk memastikan kepemimpinan yang otentik sehingga kekuasaan absolut tidak muncul.

Dalam masyarakat Wolof, pada upacara penobatan raja, kepala suku berjanji untuk bertindak sesuai dengan tradisi dan untuk bekerja demi kemakmuran semua orang. Di Waalo (Kekaisaran Wolof), misalnya, juru bicara para tokoh memperingatkan Brak (raja) yang baru saja terpilih, mengatakan kepadanya bahwa: “Jika Anda menyimpang dari jalur normal yang sudah ditentukan terhadap warga Anda, Anda akan memberi segenap hidup Anda kepada kami. Jika Anda bertindak melawan arus, Anda akan memicu tantangan para pemilih Anda dan tentu saja kebencian rakyat Anda.” Ketidakpercayaan ini dapat ditemukan dalam pepatah Wolof populer yang mengingatkan raja tentang tugasnya terhadap rakyat: “Buur du mbokk” atau “seorang raja bukan orang tua.” Dengan sebuah analogi, kita dapat mengingat bahwa dalam Islam, sejak seseorang menyatakan keimanannya, mereka menanggalkan ketergantungan atau kesetiaan kepada orang lain. Oleh karena itu, Islam tidak memiliki kependetaan (*clergy*) dan karena kepala adalah seorang pemandu, maka kepatuhan yang dicurahkan orang kepadanya harus selalu dikondisikan oleh rasa hormatnya terhadap prinsip-prinsip Islam yang sesuai dengan nilai-nilai tradisional yang sudah disebutkan di atas. Thierno Souleymane Baal, panglima perang dan cendekiawan Muslim abad ke-18 dari Futa tahu bagaimana menampilkan kepemimpinan otentik yang masih menginspirasi banyak gerakan keagamaan atau sipil di Senegal. Dia berkata:

“Saya merekomendasikan panduan berikut untuk memilih seorang pemandu:

- pilihlah seorang pria yang bijak, saleh dan jujur, yang tidak memonopoli kekayaan dunia ini untuk keuntungannya sendiri atau anak-anaknya;
- turunkanlah imam manapun yang kekayaannya telah tumbuh dan sita semua hartanya;
- pastikanlah bahwa Imamah tidak berubah menjadi monarki turun-temurun di mana para putra mewarisi dari ayah mereka;
- lawanlah dia dan usir dia jika dia terus mau bertahan;
- imam dapat dipilih dari suku apa saja;
- selalu pilih seorang pria yang bijaksana dan bekerja keras;
- jangan pernah membatasi pilihan pada suatu suku tunggal dan sama;
- selalu dasarkan diri pada kriteria kemampuan.”

› **Nilai-nilai yang membentuk signifikansi kepemimpinan**

Pemimpin agama haruslah seorang pria yang dibentuk oleh nilai-nilai keadilan, tidak mementingkan diri sendiri dan kejujuran, yang keputusannya selalu melampaui kepentingan dan motivasi pribadi. Memiliki komitmen yang sangat tinggi terhadap nilai-nilai dan rekan-rekannya, ia harus mempertahankan keyakinannya, kejujuran moralnya, dan objektivitasnya di semua tempat dan keadaan. Dua pemimpin agama dalam sejarah baru-baru ini mencontohkan kepemimpinan seperti itu: Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh, khalifah ketiga persaudaraan Tidjane Senegal dari tahun 1957-1997, dan Serigne Saliou Mbacké, khalifah kelima Mouride. Yang pertama tidak ragu untuk memberi tahu murid-muridnya: “Jika Anda melihat saya melakukan hal-hal yang tidak sejalan dengan apa yang saya katakan dan sarankan kepada Anda, silakan hubungi saya untuk menegur saya atau saya tidak akan pernah memaafkan Anda, dan jika perlu pisahkanlah diri Anda dari saya.”

Di samping penciptaan suatu visi bersama dan kode moral, kekuatan pemimpin didasarkan pada kemampuannya untuk menerapkan pada dirinya

sendiri apa yang dia minta dari orang lain. Pemimpin harus menghormati komponen nilai-nilai moral dari model antropologis “nit ku baax” (seorang pria yang baik) yang menyiratkan “nit ku am jom” (rasa kehormatan), “nit ku am Kersa” (seorang pria pendiam, yang memiliki kesopanan publik), “nit ku jub” (seorang pria yang saleh), “nit ku am dine” (seorang pria yang beriman), “nit ku doylu” (seorang pria yang sadar), “nit ku am kadu” (seorang pria yang menepati kata-katanya) dan “nit ku gore” (pria yang pantas). Di antara nilai-nilai ini, “jom” memiliki keutamaan khusus karena mencakup berbagai makna: tanggung jawab, rasa hormat dan martabat, “Warugal” (rasa tugas), upaya yang dilakukan dengan baik, pengorbanan diri, keberanian, kesadaran diri, dan kesadaran akan nilai seseorang. Bagi orang-orang Wolof, pemimpin harus mewujudkan semua nilai yang terangkum dalam “jom”—nilai-nilai yang berlawanan dengan kemalasan, pengecut, kurangnya suara hati, dan kebohongan.

Keengganan orang-orang Senegal pada janji-janji kosong diilustrasikan secara sempurna oleh dua kasus para pemimpin politik yang membalikkan janji-janji mereka sebelumnya. Mantan Presiden Abdoulaye Wade melakukan “wakh wakheet” (“Saya katakan, saya menarik kata-kata saya”), menarik kembali kata-katanya setelah mengatakan bahwa ia tidak akan maju untuk masa jabatan ketiga dalam pemilihan presiden 2012. Presiden saat ini yang menggantikannya, Macky Sall pada gilirannya baru saja membuat “wakh wakheet” yang sama dengan menarik kembali janjinya untuk mengurangi masa jabatan untuk mana ia dipilih dari tujuh menjadi lima tahun. Pepatah Wolof yang terkenal “gor sa waxja” (kebangsawanan ditentukan oleh penghormatan pada kata yang diucapkan) mencerminkan arti penting yang dibagikan orang Senegal pada kata-kata mereka, dan diterapkan untuk mengkritik para presiden ini. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada: Mouhamed Moustapha Dieye <mouhamed.dieye@gmail.com>

› Menjadikan Hak-Hak Perempuan

sebagai Bagian dari Kehidupan Sehari-hari

oleh **Bengi Sullu**, The Graduate Center, City University of New York, AS¹



Pembukaan sidang ke-63 Komisi Status Perempuan. Kredit: UN Women/flickr. Beberapa hak dilindungi.

Sesi ke-63 Komisi Status Perempuan (CSW63), dengan tema prioritas “Sistem perlindungan sosial, akses ke layanan publik dan infrastruktur berkelanjutan untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan,” diadakan di Markas Besar PBB di New York dari 11 hingga 22 Maret 2019. Berbagai acara dan panel mengamati berbagai aspek promosi dan perlindungan hak-hak sosial, ekonomi, budaya, dan politik perempuan dan anak perempuan dari perspektif lokal, nasional, dan global dan dalam kaitannya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Suatu fokus penting Komisi adalah pada *implementasi perlindungan dan manfaat bagi perempuan*: masih ada jalan panjang untuk memastikan perempuan dan anak perempuan di berbagai belahan dunia berpartisipasi penuh dan berkembang dalam kehidupan, kendati terjadi



Sidang pleno ke-63 Komisi Status Perempuan. Kredit: Africa Renewal/flickr. Beberapa hak dilindungi.

peningkatan pemahaman dan konsensus luas tentang status perempuan.

Ucapan Ketua Komisi (dan Wakil Tetap untuk PBB dari Irlandia) Geraldine Byrne Nason dalam Hari Konsultasi-acara informasi dan mobilisasi untuk LSM dalam status konsultatif dengan PBB—menggarisbawahi perbedaan antara pengakuan hak-hak perempuan sebagai hak asasi manusia dan akses perempuan ke peluang ekonomi, sosial, dan pendidikan yang akan memungkinkan mereka untuk berpartisipasi penuh dalam peluang-peluang kehidupan. Kesenjangan yang perlu kita selesaikan adalah antara pengakuan hak-hak perempuan dan pembangunan dan penerapan langkah-langkah dan program pencegahan dengan pendekatan inovatif, sistematis, berkelanjutan, peka budaya, responsif gender yang bertujuan untuk menghilangkan ketidaksetaraan gender di daerah dan dalam kehidupan sehari-hari. Kita perlu melihat hubungan antara perwakilan politik perempuan dan partisipasi pendidikan, ekonomi, dan sosial mereka dalam kehidupan publik dengan cara yang akan berkontribusi pada pembuatan pengetahuan, praktik, dan kebijakan yang berasal dari pengalaman, sudut pandang, wawasan, dan posisi perempuan. Kita juga perlu menyadari bahwa beragam bentuk diskriminasi gender melintasi ras, kelas, identitas nasional, agama, geografi, pekerjaan, dan banyak lagi “sistem penindasan yang saling terkait,” menurut kata-kata P.H. Collins, yang berkontribusi pada bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender dalam konteks tertentu.

Perlunya mengkoordinasikan kebijakan dan praktik serta pemikiran titik temu untuk hasil kesetaraan gender yang paling efektif dan permanen diilustrasikan dengan beralih ke masalah kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, keselamatan perempuan di ruang publik dan lingkungan pendidikan, eksklusi perempuan dari keuntungan ekonomi dan kesempatan sosial dan politik melalui penahanan, dan pembagian yang tidak merata dari pekerjaan perawatan yang tidak dibayar dan

tanggung jawab keluarga selama proses kembali [ke masyarakat]. Masalah-masalah ini, yang dibahas dalam panel yang ikut disponsori oleh Asosiasi Sosiologi Internasional di CSW63², menggambarkan keterkaitan sistem kebijakan seperti pendidikan, perawatan anak, peradilan pidana, pekerjaan, dan kebijakan perkotaan yang mencakup perumahan dan transportasi dalam menjamin partisipasi perempuan dalam ekonomi, sosial, budaya, dan politik dan menunjukkan perlunya pemikiran inovatif, implementasi yang efektif, dan penegakan hukum.

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, misalnya, adalah masalah yang seringkali sulit diatasi karena terbatas pada ruang privat dan dengan demikian dianggap sebagai masalah pribadi dalam keluarga. Pengetahuan perempuan tentang layanan yang ada tidak serta merta sejalan dengan banyaknya hambatan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi, termasuk tetapi tidak terbatas pada akses terbatas ke peluang kerja, perumahan yang mandiri dan aman, pengasuhan anak yang gratis atau terjangkau, dan layanan perlindungan dan konseling.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak-hak perempuan yang menunjukkan bahwa hukum saja tidak cukup untuk melindungi perempuan tanpa penegakan hukum yang tepat. Masalah keamanan perempuan di ruang publik adalah masalah lain. Seperti ditekankan oleh Dr. Jackie Sebire di panel *Akses terhadap Keadilan bagi Perempuan dan Anak Perempuan: Peran Perempuan dalam Penegakan Hukum dan Penjaga Perdamaian*, berdasarkan pengalamannya sebagai Asisten Kepala Polisi di Departemen Kepolisian Bedfordshire, Inggris, hak-hak perempuan dilindungi dan dipraktikkan dengan sangat baik oleh anggota masyarakat yang mampu mengenali masalah perempuan dan bagaimana hal ini mereka rasakan dan beban yang mereka terangkat. Advokasi untuk partisipasi perempuan dalam profesi kepolisian akan berkontribusi pada pemberdayaan perempuan dan memungkinkan adanya terobosan budaya, karena bertentangan dengan norma-norma

patriarki yang terkait dengan profesi; ini memiliki potensi untuk menjadikan pengalaman perempuan atau “pengetahuan feminis” sebagai alat utama untuk mengambil posisi dalam perjuangan melawan kekerasan gender yang tidak diprioritaskan dalam model penegakan hukum yang ada. Ini juga penting mengingat semakin banyaknya hasil penelitian mengenai masalah-masalah remaja putri yang bepergian ke sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Seperti yang didokumentasikan oleh Natarajan *et al.* (2017), mahasiswi sering menghadapi viktimisasi seksual dalam perjalanan mereka ke sekolah. Penelitian seperti ini, yang mengacu pada persepsi dan pengalaman perempuan, dapat membantu menginformasikan kebijakan perkotaan dan menyalurkan teknologi dan layanan publik untuk meningkatkan keselamatan perempuan di ruang publik perkotaan dan di dalam institusi.

Kekerasan dan masalah keamanan bukan satu-satunya faktor yang menghambat perempuan untuk mendapatkan manfaat dari peluang sosial dan ekonomi. Perawatan dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar yang harus dikerjakan perempuan membatasi kesempatan mereka untuk memasuki pasar tenaga kerja dan mendapatkan pekerjaan yang memungkinkan bagi kemandirian dan keuntungan ekonomi mereka. Penelitian menunjukkan bahwa: “di seluruh dunia, perempuan menghabiskan dua hingga sepuluh kali lebih banyak pada pekerjaan perawatan yang tidak dibayar daripada laki-laki.” (Ferrant *et al.*, 2014). Jelaslah bahwa pekerjaan perawatan belum diakui oleh pemerintah sebagai bagian integral dari kelangsungan ekonomi dan kehidupan; kurangnya cuti hamil dan cuti orang tua, dan tunjangan jaminan sosial merupakan kekurangan terpenting dalam sistem kesejahteraan sosial yang membuat perempuan tidak memasuki—atau meninggalkan—pasar kerja ketika mereka melahirkan. Jika para perempuan ini kemudian ingin mengambil pekerjaan, mereka sebagian besar dipaksa untuk mengambil bentuk pekerjaan informal yang tidak memberikan perlindungan. Seperti yang dibahas dalam *panel Perempuan, Masuk Kembali dan Perlindungan Sosial*, diskriminasi struktural ini terutama memengaruhi perempuan yang dipenjarakan, yang kembali masuknya ke pasar tenaga kerja menjadi sangat sulit ka-

rena terbatasnya riwayat pekerjaan. Kurangnya kebijakan yang berorientasi keluarga yang menekankan pada distribusi tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki dalam keluarga dan keseimbangan kerja-keluarga berdampak pada semua perempuan tetapi lebih cenderung membahayakan perempuan yang paling tidak beruntung yang sebelumnya telah kehilangan kesempatan selama dipenjarakan. Ini khususnya terjadi ketika dipasangkan dengan kurangnya intervensi yang bertujuan untuk memungkinkan kelangsungan pendidikan dan partisipasi dalam kehidupan selama masa tahanan.

Implementasi perlindungan dan manfaat bagi perempuan memerlukan pendekatan holistik dan komprehensif. Bagaimana kita memastikan bahwa intervensi yang menemukan tempat dalam hukum dan kebijakan akan ditegakkan? Pemerintah perlu lebih proaktif dalam memastikan bahwa sebanyak mungkin perempuan mampu memiliki akses ke mekanisme yang tidak hanya memungkinkan perlindungan tetapi juga membantu mereka berkembang. Organisasi masyarakat sipil, seperti Asosiasi Sosiologi Internasional, berfungsi untuk mendidik para pembuat kebijakan mengenai topik-topik tersebut dan mengadvokasi kebijakan dan praktik kesetaraan gender. ■

1. Penulis adalah seorang wakil pemuda di PBB untuk ISA dan menghadiri Sesi ke-63 Komisi Status Perempuan untuk pertama kalinya pada tahun 2019.

2. Panel ini disponsori bersama oleh ISA, the American Society of Criminology, the World Society of Victimology, Criminologists without Borders. Anda dapat mendengar [Dr. Rosemary Barberet](#), Perwakilan ISA untuk PBB, berbicara tentang CSW63 di PBB atau menonton daftar putar video ([video playlist](#)) dari keenam panel, foto-foto ([photographs](#)) dari keenam panel, dan melihat daftar bacaan ([reading lists](#)) yang didistribusikan di acara-acara tersebut, yang dikembangkan oleh perwakilan ISA ke PBB.

Referensi:

Ferrant, G., L.M. Pesando dan K. Nowacka (2014). “Unpaid care work: The missing link in the analysis of gender gaps in labour outcomes.” OECD Development Centre Policy Brief.

Natarajan, M., Schmuhi, M., Sudula, S. & Mandala, M. (2017). “Sexual victimization of college students in public transport environments: a whole journey approach.” *Crime Prevention and Community Safety*, 19(3-4): 168–182. (Special Issue: Women’s victimisation and safety in transit environments: An international perspective).

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Bengi Sullu <bsullu@gradcenter.cuny.edu>